

EKONOMI PEMBANGUNAN

Bonaraja Purba • Muhammad Fitri Rahmadana • Edwin Basmar
Diana Purnama Sari • Antonia Klara • Darwin Damanik
Annisa Ilmi Faried • Darwin Lie • Nadia Fazira
Noni Rozaini • Rahman Tanjung • Nur Arif Nugraha



EKONOMI PEMBANGUNAN

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomi Pembangunan

Bonaraja Purba, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar
Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik
Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fazira
Noni Rozaini, Rahman Tanjung, Nur Arif Nugraha



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomi Pembangunan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Bonaraja Purba, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar
Diana Pumama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik
Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fazira
Noni Rozaini, Rahman Tanjung, Nur Arif Nugraha

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Anggota IKAPI: 044/SUT/2021

Bonaraja Purba, dkk.

Ekonomi Pembangunan

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 196 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6840-76-4

Cetakan 1, Februari 2021

- I. Ekonomi Pembangunan
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Hanya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga dengan tepat waktu tim penulis mampu menyusun buku yang berjudul Ekonomi Pembangunan. Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi dan studi pembangunan.

Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menguraikan tentang:

Bab 1 Konsep, Kriteria, dan Ukuran Pembangunan Nasional

Bab 2 Persoalan Dalam Pembangunan Nasional

Bab 3 Karakteristik dan Sistem Ekonomi Indonesia

Bab 4 Struktur dan Prospek Ekonomi Indonesia

Bab 5 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 6 Masalah Pembentukan Modal Di Negara Berkembang

Bab 7 Masalah Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Indonesia

Bab 8 Aspek Perdagangan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi

Bab 9 Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 10 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan pembangunan Nasional

Bab 11 Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 12 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dengan mengandalkan semangat kolaborasi yang solid dan kompak dari beberapa penulis bidang Ilmu Ekonomi dari berbagai perguruan tinggi sehingga buku ini dapat terwujud dan terbit sesuai dengan target waktu. Penyusunan buku ini juga merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim Penulis sungguh merasakan bahwa dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Tim Penulis sungguh menyadari jika dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, akan tetapi Tim Penulis siap menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini di kemudian hari, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Pimpinan Penerbit Yayasan Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa dalam segala tugas dan pekerjaan kita. Amin

Medan, 5 Februari 2021

Penulis

Bonaraja Purba, dkk

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab 1 Konsep, Kriteria, dan Ukuran Pembangunan Nasional

1.1 Konsep Pembangunan.....	1
1.2 Sejarah Pembangunan Nasional	5
1.3 Pengertian Pembangunan Nasional.....	6
1.4 Hakikat Pembangunan Nasional	7
1.5 Tujuan Pembangunan Nasional.....	8
1.6 Visi dan Misi Pembangunan Nasional.....	9
1.7 Prinsip Pembangunan Nasional.....	11
1.8 Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan	12
1.9 Kriteria Pengukuran Hasil Pembangunan Nasional.....	13

Bab 2 Persoalan Dalam Pembangunan Nasional

2.1 Pendahuluan.....	15
2.2 Pertumbuhan Ekonomi	16
2.3 Ketimpangan Pembangunan.....	21
2.4 Kemiskinan	23
2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....	26
2.6 Keseimbangan Neraca Pembayaran.....	29

Bab 3 Karakteristik dan Sistem Ekonomi Indonesia

3.1 Pendahuluan.....	33
3.2 Karakteristik Sistem Ekonomi	35
3.3 Sistem Ekonomi Indonesia	47

Bab 4 Struktur dan Prospek Ekonomi Indonesia

4.1 Struktur Perekonomian	65
4.2 Prospek Ekonomi	68

Bab 5 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional

5.1 Perkembangan Teori Pembangunan Ekonomi.....	77
5.2 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional	83

Bab 6 Masalah Pembentukan Modal Di Negara Berkembang

6.1 Pendahuluan.....	87
6.2 Arti Pembentukan Modal.....	88
6.2.1 Pentingnya Pembentukan Modal	89
6.2.2 Sebab-sebab Rendahnya Laju Pembentukan Modal	90
6.3 Sumber-Sumber Pembentukan Modal.....	94
6.3.1 Sumber Pembentukan Modal Domestik	95
6.3.2 Sumber Pembentukan Modal dari Eksternal	98

Bab 7 Masalah Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Indonesia

7.1 Pendahuluan.....	101
7.2. Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja	103

Bab 8 Aspek Perdagangan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi

8.1 Pendahuluan.....	111
8.2 Manfaat Perdagangan Internasional	112
8.3 Hambatan dalam Perdagangan Internasional	115
8.3.1 Beberapa Isu Penting Perdagangan Internasional.....	116
8.4 Lima Pertanyaan Dasar Mengenai Perdagangan dan Pembangunan	119
8.5 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut	120
8.6 Teori Perdagangan dan Pembangunan: Argumen-Argumen Tradisional ..	121
8.7 Pandangan Yang Berlawanan.....	122
8.8 Kritik Terhadap Pandangan Yang Berlawanan.....	124

Bab 9 Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

9.1 Pendahuluan.....	127
9.2 Pentingnya Hubungan Internasional	128
9.3 Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	129
9.3.1 Wilayah Perbatasan	129

9.3.2 Globalisasi	130
9.3.3 Aksi Terorisme.....	131
9.4 Upaya Mengatasi Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	132
9.4.1 Wilayah Perbatasan	132
9.4.2 Globalisasi	135
9.4.3 Aksi Terorisme.....	137

Bab 10 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan pembangunan Nasional

10.1 Pendahuluan.....	141
10.2 Pengertian Kebijakan	142
10.3 Pengertian Pembangunan	143
10.4 Kebijakan Pembangunan Nasional	144
10.5 Pembangunan Manusia.....	145
10.6 Hakikat Pembangunan	147
10.6.1 Dimensi-Dimensi Pembangunan.....	147
10.7 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi.....	149

Bab 11 Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

11.1 Pendahuluan.....	151
11.2 Tantangan Pembangunan Ekonomi Nasional	152
11.2.1 Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi	153
11.2.2 Rendahnya Daya Saing	153
11.2.3 Kualitas Infrastruktur yang Kurang Baik	153
11.2.4 Pelemahan Ekonomi Global	154
11.3 Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional.....	154
11.3.1 Strategi Perencanaan Pembangunan (Pembentukan Modal dan Tabungan).....	155
11.3.2 Strategi Upaya Minimum kritis	155
11.3.3 Strategi Pembangunan Seimbang.....	156
11.3.4 Strategi Pembangunan Tak Seimbang.....	158
11.3.5 Strategi Pembangunan Negara Industri Baru	159
11.3.6 Strategi Interaksi Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi ..	160
11.3.7 Strategi Baru Pembangunan Ekonomi.....	161
11.3.8 Strategi Pembangunan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024	162

Bab 12 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

12.1 Pendahuluan.....	165
12.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024..	166
12.3 Ketidakpastian Perkembangan Ekonomi Global	167
12.4 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	170
12.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Ekonomi.....	174
12.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi.....	175
 Daftar Pustaka	 179
Biodata Penulis	191

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Infografis Produk Domestik Bruto Triwulan III tahun 2020...	18
Gambar 2.2: Infografis Perkembangan Gini Ratio Periode Maret 2017 – Maret 2020	22
Gambar 2.3: Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2019	24
Gambar 2.4: Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2020.....	26
Gambar 2.5: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 – 2020	27
Gambar 2.6: Infografis Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2020	30
Gambar 3.1: Sistem Perekonomian Indonesia	50
Gambar 7.1: Data Tenaga Kerja Pada 6 Sektor.....	102
Gambar 7.2: Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1950-2100 (ribu Jiwa)....	105
Gambar 7.3: Pekerja Terdampak Covid-19	106
Gambar 7.4: Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Periode Agustus 2019 Sampai Agustus 2020 Berdasarkan Sektor (%)	106
Gambar 7.5: Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2013-2019	107
Gambar 8.1: Hambatan Perdagangan Internasional.....	116
Gambar 12.1: Indonesia Menuju Negara Maju	166
Gambar 12.2: Sasaran Pembangunan 2020-2024	167
Gambar 12.3: Sasaran Makro Pembangunan	169
Gambar 12.4: Proyeksi Postur APBN 2020-2024	170

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Laju Implisit Q to Q PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020	16
Tabel 2.2: Laju Implisit Q To Q PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020	19
Tabel 5.1: Lima Tahap Pembangunan Menurut W. W. Rostow	80
Tabel 7.1: Tingkat Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Serta Keseimbangan Tenaga Kerja Persektor.....	102
Tabel 8.1: Manfaat tidak Langsung Perdagangan Internasional.....	114

Bab 1

Konsep, Kriteria, dan Ukuran Pembangunan Nasional

1.1 Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Kuncoro, 1997; Jhingan, 2016).

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu: pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk, 2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut Rostow (Abdul, 2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan

pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya (Rochajat,dkk, 2011).

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energy (Arifin, 2013; Mulyani et al., 2017).

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut (Harahap, 2019). Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia, mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan dan
6. Pemberdayaan (Jhingan, 2016)

Menurut Rostow transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya, yaitu:

1. Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern untuk menuju negara industri.
3. Tingkat landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industri
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa (Witjaksono, 2009).

Untuk menjadi negara dengan masyarakat yang tingkat pembangunannya lebih baik maka ada tahapan-tahapannya, menurut Tjokrowinoto memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat manusia: Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri; Kedua, fokus utama adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka; Ketiga, pendekatan ini menoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi lokal; Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses sosial learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; Kelima, proses pembentukan jejaring (networking) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satu-satunya organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal, melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiosis antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal (Kuncoro, 1997).

Dasar interpretasi pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis, karena itu pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan pengabdian ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi, negara dengan masyarakat.

Dari penjelasan elemen-elemen di atas maka muncullah teori pemberdayaan (empowerment) yang dipandang sebagai pemikiran alternatif terhadap pembangunan (Rahayu, 2017). Untuk mewujudkan delapan kondisi utama di atas Mahbub UI Haq (Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013) Menawarkan tiga komponen penting dalam pembangunan manusia yaitu:

1. Kesetaraan dalam memperoleh kesempatan (Equal Access To Opportunity)
2. Berkelanjutan (Sustainability) dipahami bahwa generasi yang akan datang harus bisa menikmati kesempatan yang sama dengan generasi sekarang
3. Produktivitas (Productivity) hal ini dibutuhkan investasi pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan set-up ekonomi makro untuk memfasilitasi pengembangan SDM (Mulyani et al., 2017).

Pemberdayaan (Empowerment) yang diterjemahkan bahwa masyarakat memiliki pilihan untuk kepentingan sendiri, sehingga mereka harus bisa memengaruhi keputusan yang terkait dengan hidup mereka. Logika yang dominan dari paradigma ini adalah suatu ekologi manusia yang seimbang, dengan sumber-sumber daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan prakarsa kreatif yang tidak habis-habisnya, dan yang tujuan utamanya adalah pertumbuhan manusia yang mendefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia. Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya (Mulyani et al., 2017).

Pembangunan yang berpusat kepada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Menurut

pendekatan ini, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Walaupun sederhana, tujuan ini sering terlupakan oleh keinginan untuk meningkatkan akumulasi barang dan modal. Banyak pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidaklah terjadi dengan sendirinya (Huda, 2017).

Teori pembangunan dalam perkembangannya semakin kompleks dan semakin tidak terikat pada satu disiplin ilmu. Dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat akan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah (Arifin, 2013; Jhing, 2016).

1.2 Sejarah Pembangunan Nasional

Dalam pergolakan Revolusi Kemerdekaan sejak hari proklamasi 1945 maka rakyat Indonesia telah berhasil membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang bebas dan berkedaulatan rakyat dari sabang sampai merauke, Negara kesatuan itu ialah negara kebangsaan. Tujuan dan maksud pembangunan nasional ialah membangun masyarakat yang adil dan makmur, adil dan makmur yaitu menurut tinjauan ajaran Pancasila, yang di duga telah dikenal dengan sempurna oleh para anggota Dewan Perancang Nasional (Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959-1966) sebelum dan sesudah mengangkat sumpah menjadi anggota Dewan Perancang Nasional (sekarang Bappenas-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Dewan Perancangan Nasional akan memberi isi kepada proklamasi dengan bertujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Artinya ada suatu perencanaan overall
2. Oleh karena soal pembangunan adalah soal yang tidak berdiri sendiri, yang tidak lepas dari hubungannya dengan bidang-bidang lain yaitu kehidupan negara dan masyarakat. Maka dalam melaksanakan pembangunan semesta perlu adanya suatu perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia (Kuncoro, 1997).

1.3 Pengertian Pembangunan Nasional

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan di sini lebih diarahkan pada pembangunan potensi, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dengan pembangunan, masyarakat diharapkan semakin mampu mengelola alam bagi peningkatan kesejahteraannya. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi kelestarian manusia dan alam (Subandi, 2011).

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu

peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederhana dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila (Witjaksono, 2009).

1.4 Hakikat Pembangunan Nasional

Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan ialah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula.
4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ialah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional (Hasan and Azis, 2018).

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan

tujuan nasional. Dalam pengertian lain, mewujudkan pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

1.5 Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945 (Hasan and Azis, 2018).

Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembangunan nasional yang dilakukan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan ini terbagi atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

1. Tujuan jangka pendek dari pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
2. Tujuan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan

pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai (Hasan and Azis, 2018).

1.6 Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional.

Visi Pembangunan Nasional:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang aman, bersatu, rukun dan damai;
2. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi Pembangunan Nasional:

1. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman masyarakat. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran
5. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
7. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
9. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
11. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global (Kuncoro, 1997).

1.7 Prinsip Pembangunan Nasional

Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dengan berpegang pada prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraannya, antara lain sebagai berikut:

1. Kesemestaan;
Bahwa pembangunan nasional bersifat komprehensif, artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.
2. Partisipasi rakyat;
Betapapun kualifaidnya para aparat penyelenggara Negara dan matangnya program-program pembangunan yang dicanangkan; tidak akan membawa hasil yang optimal tanpa didukung oleh partisipasi rakyat.
3. Keseimbangan;
Mengandung makna bahwa pembangunan nasional harus seimbang.
4. Kontinuitas;
Cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi. Hal ini berarti bahwa usaha mewujudkannya harus diperjuangkan secara terus-menerus.
5. Kemandirian;
Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri yang bersendikan pada kepribadian bangsa.
6. Skala prioritas;
Pelaksanaan pembangunan dibatasi oleh berbagai keterbatasan, sehingga tidak mungkin semua bidang atau masalah dilaksanakan atau ditangani dalam waktu bersamaan.
7. Pemerataan disertai pertumbuhan;
Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh bangsa Indonesia (Mulyani et al., 2017).

1.8 Faktor-Faktor Penghambat Pembangunan

Faktor-Faktor yang menghambat Pembangunan sejak tahun 1950. Pembangunan semesta dan berencana baru dapat berjalan setelah kembali ke UUD 1945 yang memungkinkan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Sebelum tahun 1959, pembangunan terbentur pada berbagai macam faktor yang menjadi penghambat bagi terlaksananya pembangunan tersebut. sebab-sebab pokok sudah sama kita pahami, sehingga pada akhir-akhir ini setelah fikiran liberalisme, sabotase, percobaan intervensi dan gerakan subversif dan pemberontakan berhasil di tindas, timbul kebulatan fikiran untuk mengadakan retooling dalam susunan ekonomi, ketatanegaraan dan susunan masyarakat, yang tentu akan berakibat besar bagi kebijaksanaan politik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu suatu susunan yang pada hakekatnya bukan merupakan barang baru bagi masyarakat Indonesia yang di sebut pelaksanaan demokrasi terpimpin atau yang di sebut dengan kata-kata yang sederhana oleh rakyat, ialah gotong royong, sebagai satu-satunya jalan keluar menuju kepada pembangunan semesta atau pembangunan sosialisme ala Indonesia (Huda, 2017; Hasan and Azis, 2018).

Faktor-faktor yang merupakan ke bulatan fikiran itu kiranya tidak perlu kita bahas lagi, akan tetapi karena persoalan itu merupakan suatu persoalan yang sangat luas, karena tidak berdiri sendiri, maka perlulah kiranya meminta perhatian kepada aspek-aspek yang di timbulkan oleh sebab-sebab pokok itu agar kita dapat mendapat hasil yang guna mencapai pembangunan nasional:

1. Faktor politis;

Pelaksanaan pembangunan berlangsung atas stabilisasi di bidang politik sehingga pelaksanaannya ini tidak terbentur pada seringkali di adakannya pergantian program pemerintah yang mungkin sekali berlainan dengan program yang semula, bahkan mungkin bertentangan dengan yang telah di laksanakan.

2. Faktor psikologi;

Tekanan ekonomi, keguncangan politik, pertentangan ideologi dan akibat-akibat revolusi bersenjata masih sangat berkesan pada kaum buruh, tani, dan pemuda serta potensi nasional lainnya di tambah pula dengan politik adu domba imperialisme yang dengan sadar atau tidak

telah dilaksanakan justru oleh gembong-gembong politik, mengakibatkan rakyat diam dalam seribu bahasa dalam menyelesaikan revolusi.

3. Faktor pendidikan;

Faktor pendidikan yang sebagian besar menurut dasarnya masih mempergunakan sistem lama, yaitu sistem pendidikan kolonial sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional.

4. Menghidupkan potensi rakyat;

Pembangunan semesta dan berencana baru terjamin akan berhasil baik, apabila pembangunan itu tidak saja mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur, tetapi juga harus didukung oleh rakyat sendiri yang diikutsertakan dalam menyusun, mengesahkan, menilai, mengawasi, dan melaksanakan pembangunan itu (Witjaksono, 2009).

1.9 Kriteria Pengukuran Hasil Pembangunan Nasional

Kriteria pengukuran keberhasilan pembangunan ekonomi Pendapatan Nasional antara lain;

1. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerja tinggi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil.
2. Pendapatan per Kapita; Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat juga diukur dengan pendapatan per kapita. Tinggi-rendahnya pendapatan per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Pendapatan per kapita memberikan petunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan warganya.

3. Distribusi pendapatan; Distribusi pendapatan yang merata juga merupakan ukuran yang penting. Jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah, keberhasilan pembangunan belumlah sempurna. Distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata juga tidak bermanfaat bila ditinjau dari kemungkinan investasi karena penduduk berpenghasilan tinggi biasanya konsumtif.
4. Peranan sektor industri dan jasa; Pada umumnya semakin besar kontribusi sektor industri dan jasa, maka akan semakin maju suatu negara. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya proporsi kontribusi sektor industri dan jasa merupakan salah satu indikasi yang penting bagi tingkat kemajuan ekonomi.
5. Kesempatan kerja; Apabila suatu negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (full employment) berarti masyarakat mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya investasi, meningkatnya lapangan kerja baru, dan berkurangnya pengangguran.
6. Stabilitas ekonomi; Tingkat perekonomian yang stabil meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja serta tingkat harga memengaruhi pasar produk dalam negeri. Suatu negara dikatakan berhasil di dalam perkembangan ekonominya apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya.
7. Neraca pembayaran luar negeri; Pada umumnya setiap negara menginginkan agar neraca pembayarannya seimbang sebab jika neraca pembayaran mengalami defisit berpengaruh terhadap kredibilitas negara tersebut. Apalagi bila neraca pembayaran mengalami surplus. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi seimbang karena berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi negara tersebut (Ferinia et al., 2020; Purba, Nainggolan, et al., 2020; Purba, Sudarmanto, et al., 2020).

Bab 2

Persoalan Dalam Pembangunan Nasional

2.1 Pendahuluan

Pada dasarnya tujuan dari suatu negara melaksanakan pembangunan adalah untuk mengatasi atau keluar dari masalah-masalah yang selama ini dihadapi. Jika dilihat pada buku-buku literatur yang ada maka setidaknya terdapat 4 masalah pokok dalam perekonomian yaitu: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran. Berbagai literatur lainnya juga mencoba mengelompokkan masalah pokok yang dihadapi oleh suatu negara, terutama negara yang sedang berkembang dan negara terbelakang yaitu kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan pengangguran (Mankiw, 2012).

Oleh sebab itu maka dari kedua referensi tersebut dalam buku ini dirangkum menjadi enam masalah yang dihadapi dalam pembangunan nasional serta data-data terbaru terkait dengan aspek-aspek yang menjadi permasalahan pembangunan nasional tersebut.

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan jangka panjang kemampuan suatu negara dalam meningkatkan ketersediaan barang-barang ekonomi penduduknya. Kemampuan ini tumbuh mengikuti kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. Kondisi ini merupakan satu indikator pertumbuhan ekonomi. Kondisi daerah yang secara geografis dan sumber alam yang berbeda, menimbulkan kondisi ada daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah lain.

Oleh karena itu kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada sesuai dengan kondisi perbedaan masing-masing daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan terlaksana secara lebih merata. Sehubungan dengan hal ini diharapkan perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus. Kondisi inilah kemudian yang menegaskan bahwa sumberdaya manusia yang efektif menjadi prasyarat utama bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja memiliki keterkaitan.

Kesempatan kerja dimaknai sebagai jumlah penduduk yang bekerja, serta menggambarkan peran masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kuantitas serta semakin tinggi kualitas sumberdaya yang ada, maka semakin besar pula potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhannya. Namun demikian, kenyataannya hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan mengalami kesenjangan antar daerah.

Tabel 2.1: Laju Implisit Q to Q PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020

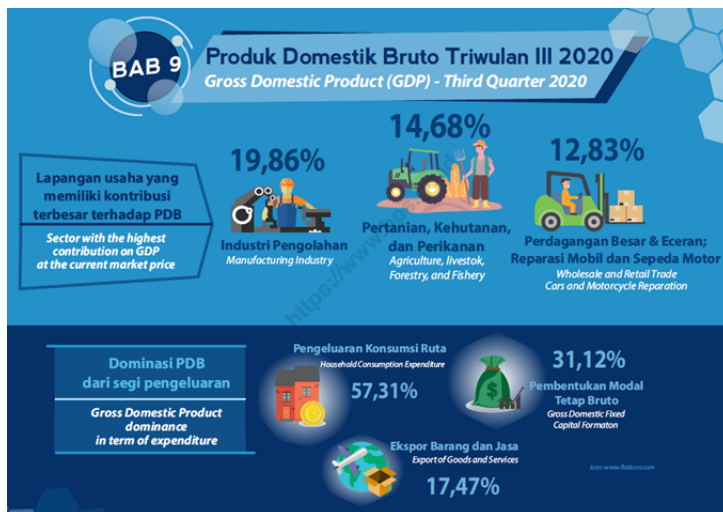
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	2,02	1,21	1,54	1,54	1,95
2. Pengeluaran	2,22	1,30	1,57	1,57	2,04

Konsumsi LNPR					
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-2,10	1,19	2,36	2,36	0,83
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,20	0,07	1,17	1,17	0,61
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-7,27	-0,78	4,27	4,27	-1,70
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-6,21	-4,09	-3,59	-3,59	-3,63
8. Produk Domestik Bruto	-1,74	-0,79	-0,03	-0,03	-0,46
a. Bangunan	-0,02	0,29	1,36	1,36	0,64
a. Barang	-5,50	1,76	7,00	7,00	0,07
a. Barang	-6,35	-4,16	-3,75	-3,75	-3,85
a. Konsumsi Kolektif	-3,11	0,87	1,72	1,72	0,24
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,24	2,07	2,61	2,61	3,44
a.1. Barang Non-migas	-3,02	3,64	9,45	9,45	1,88
a.1. Barang Non-migas	-0,74	-1,97	-2,56	-2,56	-1,34
a.b. Barang migas	-34,68	-28,77	-23,72	-23,72	-26,25
a.b. Barang migas	-48,86	-20,96	-18,07	-18,07	-22,81
b. Jasa	-1,68	-1,50	-2,47	-2,47	-0,71
b. Jasa	6,55	5,88	4,05	4,05	4,51
b. Konsumsi Individu	-0,49	1,63	3,45	3,45	1,77
b. Mesin dan Perlengkapan	-0,88	-1,58	-0,95	-0,95	-0,65
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	3,74	1,74	0,98	0,98	2,69
c. Kendaraan	0,90	0,28	2,17	2,17	1,29
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	1,70	1,09	0,72	0,72	1,37
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,39	2,30	2,00	2,00	2,74

d. Peralatan Lainnya	-0,79	-0,74	-0,06	-0,06	-0,32
Diskrepansi Statistik	-	-	-	-	-
e. CBR	-1,32	-3,31	0,85	0,85	-1,40
e. Transportasi dan Komunikasi	-5,10	-3,40	-1,86	-1,86	-2,72
f. Produk Kekayaan Intelektual	9,06	4,53	4,46	4,46	6,99
f. Restoran dan Hotel	3,18	2,57	2,13	2,13	2,75
g. Lainnya	4,50	6,15	5,77	5,77	4,91

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b)

Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan suatu kegiatan perekonomian, baik yang dilakukan warga lokal (WNI) maupun warga asing (WNA) yang bermukim atau menetap di negara bersangkutan. Ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (Mankiw, 2012).



Gambar 2.1: Infografis Produk Domestik Bruto Triwulan III tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Kemampuan suatu Negara dalam mengembangkan potensi sumber dayanya merupakan proses pertumbuhan ekonomi. Semakin besar kuantitas serta semakin tinggi kualitas sumberdaya yang ada, maka semakin besar pula potensi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Tabel 2.2: Laju Implisit Q To Q PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	0,99	0,09	-0,05	0,52	1,95
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,89	0,34	-0,01	0,35	2,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,59	2,55	1,10	0,32	0,83
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-0,15	0,07	0,26	0,99	0,61
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-2,96	-3,16	5,19	5,48	-1,70
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	0,08	-3,60	0,87	-0,94	-3,63
8. PRODUK DOMESTIK	0,02	-1,87	0,54	1,31	-0,46

BRUTO					
a. Bangunan	0,01	-0,15	0,32	1,18	0,64
a. Barang	-2,57	-1,78	5,63	5,86	0,07
a. Barang	0,28	-3,38	0,83	-1,47	-3,85
a. Konsumsi Kolektif	-2,87	2,58	1,26	0,83	0,24
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2,17	1,18	-1,16	0,42	3,44
a.1. Barang Non-migas	-0,98	-0,18	4,71	5,76	1,88
a.1. Barang Non-migas	1,03	0,82	-2,05	-2,33	-1,34
a.b. Barang migas	-22,40	-22,32	12,64	12,35	-26,25
a.b. Barang migas	-4,19	-41,56	39,64	4,78	-22,81
b. Jasa	0,05	-0,83	-0,97	-0,75	-0,71
b. Jasa	1,99	5,17	-1,17	-1,84	4,51
b. Konsumsi Individu	0,52	2,46	0,84	-0,39	1,77
b. Mesin dan Perlengkapan	-1,35	-0,02	0,12	0,30	-0,65
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	0,35	0,26	0,17	0,21	2,69
c. Kendaraan	-1,74	0,44	1,23	2,27	1,29
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	0,31	0,27	0,08	0,05	1,37
d. Kesehatan dan Pendidikan	0,29	0,38	0,71	0,60	2,74
d. Peralatan Lainnya	-0,76	-0,55	0,65	0,61	-0,32
Diskrepansi Statistik	-	-	-	-	-
e. CBR	0,09	0,10	-0,17	0,83	-1,40
e. Transportasi dan Komunikasi	-1,08	-3,63	1,45	1,48	-2,72
f. Produk Kekayaan Intelektual	3,87	0,14	-	0,43	6,99
f. Restoran dan Hotel	0,51	0,62	0,50	0,48	2,75
g. Lainnya	1,20	1,87	2,16	0,43	4,91

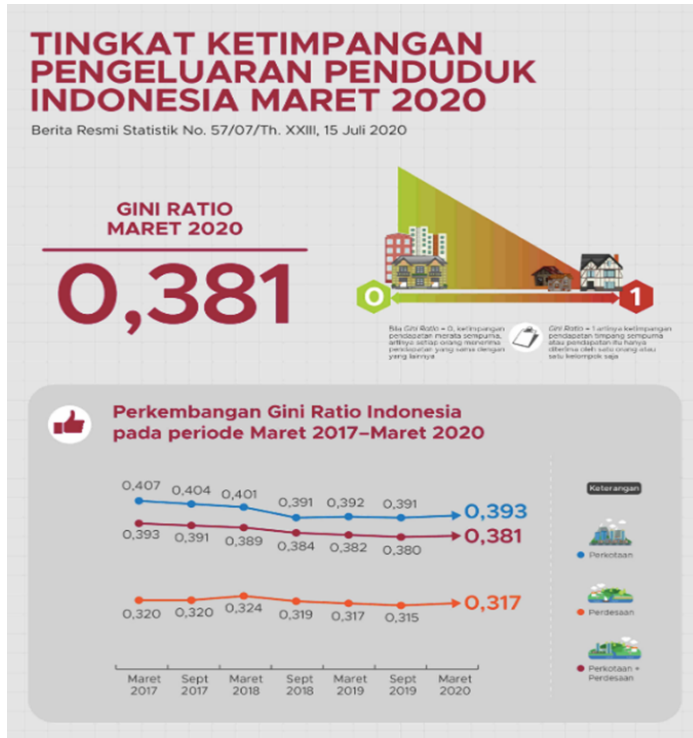
2.3 Ketimpangan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan implikasi politik dan ketentraman masyarakat.

Ketimpangan wilayah adalah konsekuensi logis dari adanya proses pembangunan dan ia akan berubah sejalan dengan tingkat perubahan proses pembangunan itu sendiri. Pola pembangunan dan tingkat ketimpangan dalam pembangunan yang ditemui di beberapa negara tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda yang dijumpai di negara tersebut, seperti kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, sejarah wilayah tersebut, lokasi dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan wilayah berkurang demikian sebaliknya. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu untuk membangun daerah tetapi bukan syarat cukup. Karena ada faktor lain yang sangat penting yaitu bagaimana dengan pembangunan tersebut membuat masyarakat daerah menjadi jauh lebih sejahtera dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

Untuk itu, sangat penting dilakukan penyelenggaraan pembangunan secara terencana dan terarah terhadap pengurangan ketimpangan wilayah. Memahami secara menyeluruh persoalan ketimpangan perlu menjadi acuan dalam perumusan perencanaan pembangunan, sehingga upaya pemerataan pembangunan di Indonesia dapat tercapai. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban baru yaitu daerah yang miskin di sekitarnya akan berpindah ke daerah tersebut. Hal ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Permasalahan yang muncul akibat hal tersebut adalah, terjadinya kepadatan penduduk dapat meningkatkan tingkat pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu mempekerjakan seluruh penduduk.



Gambar 2.2: Infografis Perkembangan Gini Ratio Periode Maret 2017 – Maret 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020c)

Menurut Neo-Klasik Ketimpangan Pembangunan Wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumberdaya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh tiap daerah adalah berbeda-beda. Hipotesa Neo-Klasik merupakan dasar teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Termasuk dalam hal ini adalah hasil studi dari Jeffrey G. Williamson yang melakukan pengujian terhadap kebenaran Neo-Klasik tersebut. Menurut Neo-Klasik bahwa ketimpangan wilayah akan berkurang dengan sendirinya.

Neo-Klasik berpendapat bahwa dalam awal pembangunan yang dilaksanakan di negara yang sedang berkembang justru ketimpangan meningkat, hal ini dikarenakan pada saat proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu

memanfaatkan peluang karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain faktor ekonomi, faktor sosial-budaya juga turut mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 melalui studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan wilayah, tetapi pada tahap awal pembangunan justru terjadi hal yang sebaliknya. Pembuktian hipotesa ini bisa dilihat pada tahap awal pembangunan di Amerika Serikat yang terjadi ketimpangan antara negara-negara bagian selatan yang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara bagian utara yang sudah lebih maju.

Salah satu model yang cukup representative untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks williamson yang dikemukakan oleh Williamson. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang atau weighted index terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang atau unweighted index) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu negara pada waktu tertentu. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah .

2.4 Kemiskinan

Masalah perekonomian makro Indonesia yang selalu menjadi sorotan adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang harus segera diatasi dan diselesaikan. Meski tidak mungkin untuk dihilangkan tetapi paling tidak dapat dikurangi jumlahnya. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan di antaranya dengan pembangunan ekonomi. Berbagai kegiatan pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan

pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam penurunan jumlah miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan.

Hal ini berarti salah satu kriteria utama pemilihan sektor titik berat atau sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang belum tuntas diselesaikan terutama di Negara berkembang. Khusus di daerah pedesaan, kemiskinan seringkali menjadi penyebab terjadinya urbanisasi yang menyebabkan terjadinya 2 regional disparity. Oleh karena itu, pedesaan haruslah ditangani secara lebih serius agar kesejahteraan masyarakatnya dapat ditingkatkan.



Gambar 2.3: Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2019 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020e)

Pada hakikatnya, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali di Indonesia. Karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan itu pastinya selalu ada, baik itu di negara miskin, negara sedang berkembang, bahkan negara maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa

besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing negara tersebut (Gwartney et al., 2011).

Pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep ekonomi, di mana kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dalam buku “The End of Poverty” yang menjelaskan bentuk kemiskinan ini sebagai “The Extreme Poverty”. Menurutya, bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan maupun non pangan.

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai kondisi posisi individu yang berada di bawah tingkat standar hidup minimal yang dapat diterima masyarakat. Para ahli membuat pengertian kemiskinan dengan berbagai versi. Dapat berupa gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu dan lainnya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Statistik).

Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa. Sekarang Pun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Persoalan itu masih terus dipikirkan dan ditemukan solusinya. Perubahan keadaan membuat masalah menjadi lebih kompleks sehingga membahas merupakan termasuk hal yang prioritas saat ini. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan kondisi pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan pendapatan nasional. Termasuk di dalamnya meningkatkan produktivitas (Rinaldi and Rahmadana, 2020).

Pembangunan ekonomi memberi kesempatan kepada masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitar. Selain itu dapat

juga mempertinggi tingkat kebebasan masyarakat dalam melakukan tindakan tertentu. Kegiatan investasi seperti penanaman modal dalam negeri atau asing diharapkan akan meningkat dengan pembangunan ekonomi. Investasi yang berlangsung di suatu daerah akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan investasi dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Investasi memungkinkan masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang sebelumnya pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan adanya kegiatan investasi.



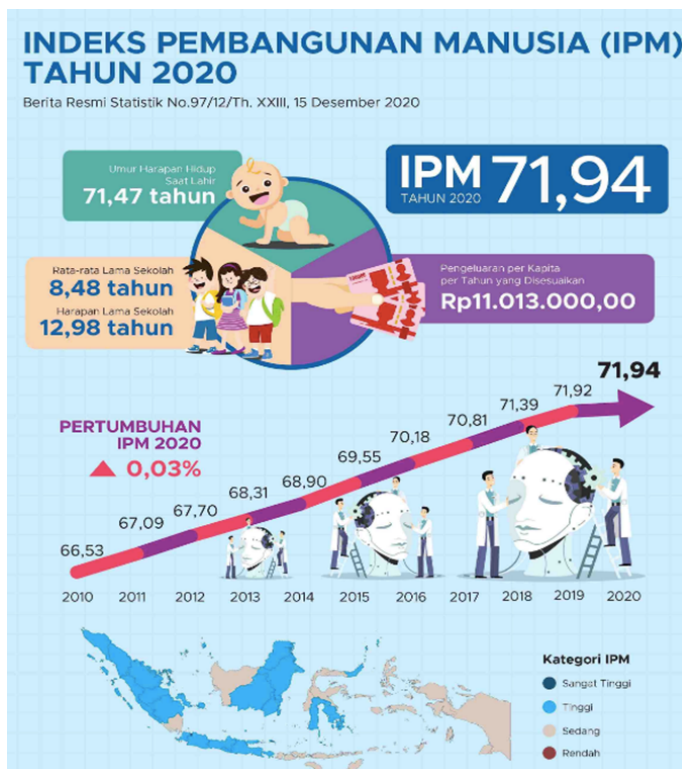
Gambar 2.4: Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020d)

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan sebuah konsep yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Namun, ide dasar dari pembangunan manusia sebenarnya cukup sederhana yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Sebelum muncul konsep Indeks Pembangunan Manusia, lebih dahulu digunakan angka pendapatan perkapita yang dijadikan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Penggunaan angka pendapatan perkapita sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dinilai tidak mampu memberikan

gambaran yang utuh terhadap kondisi yang sesungguhnya dari kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan angka pendapatan perkapita lebih terfokus pada aspek ekonomi saja. Adapun kesejahteraan masyarakat memiliki dimensi yang lebih kompleks di luar aspek ekonomi, yaitu meliputi pula aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menyertakan komponen kesejahteraan manusia dalam dimensi sosial tersebut meliputi daya beli (pendapatan), pendidikan, dan kesehatan masyarakat sehingga peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen penyusunnya.



Gambar 2.5: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 – 2020
(Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020a)

Menurut United Nation Development Programme (UNDP, 2018) untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah dapat

dilihat melalui pengelompokkan kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke dalam beberapa kategori, yaitu: $IPM < 60$: IPM rendah, $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang, $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi dan $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi.

Semakin tinggi skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh suatu wilayah maka dapat diartikan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut yang diukur melalui komponen dimensi daya beli (pendapatan), pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Sebaliknya, apabila skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didapatkan oleh suatu wilayah semakin rendah, maka semakin rendah pula tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut (Ball and Mankiw, 1992).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu hal yang perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dalam rangka pembangunan daerah. Teori Rostow dan Musgrave merupakan pandangan yang muncul dari pengamatan yang dialami oleh banyak Negara, namun tidak didasari pada suatu teori yang khusus. Pandangan tersebut menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan manfaat intrinsik (*intrinsic benefit*). Pendidikan dan kesehatan memainkan peranan yang besar untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi yang disebut dengan istilah manfaat instrumental (*instrumental benefit*). Salah satu faktor yang diharapkan mampu untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu belanja modal. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan internal pemerintah tersebut mengenai aspek pembangunan manusianya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan, dan realisasi dari anggaran tersebut. Salah satu wujud dari alokasi anggaran yang dimaksud adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah dalam menambah aset atau kekayaan daerah dengan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi pula Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh suatu daerah.

2.6 Keseimbangan Neraca Pembayaran

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyulitkan suatu Negara dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya jika hanya mengandalkan kemampuan internalnya saja. Perlu dukungan dari sisi eksternal dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang tidak terbatas. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kunci pemenuhan kebutuhan tersebut. Melalui perdagangan internasional akan memudahkan setiap negara melakukan pertukaran barang dan jasa maupun uang serta modal yang didasarkan atas spesialisasi dan keunggulan komparatif masing-masing negara, sehingga masing-masing negara mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini memicu semua negara di belahan dunia termasuk Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Kerjasama ekonomi internasional dapat memberikan dampak bagi perekonomian suatu negara, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dengan terjalannya kerjasama internasional, suatu negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi negaranya yang merupakan dampak positif dari kegiatan perdagangan internasional, namun di samping itu kerjasama ekonomi internasional dapat menimbulkan guncangan di berbagai kegiatan ekonomi suatu negara yang disebabkan oleh perubahan perekonomian negara lain.

Kondisi perekonomian suatu negara sendiri dapat dilihat dari sisi internal maupun eksternal. Dan Neraca pembayaran merupakan kondisi perekonomian eksternal suatu negara yang menggambarkan aktivitas ekonomi internasional suatu Negara. Neraca pembayaran dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengukur kemampuan perekonomian suatu negara. Selain itu neraca pembayaran juga merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tindakan para pelaku pasar beserta sejumlah besaran yang ada di dalamnya, yang memiliki peranan penting dalam pembentukan pendapatan suatu negara. Oleh karena itu, neraca pembayaran merupakan sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mendorong perbaikan ekonomi di dalam negeri. Neraca pembayaran akan memberikan gambaran mengenai hubungan ekonomi yang berlaku di antara satu negara dengan negara lain, neraca pembayaran memberi informasi tentang nilai ekspor dan impor, transaksi jasa-jasa, aliran modal (penanaman modal jasa dan aliran masuk modal asing) (Dafflon, 2010).



Gambar 2.6: Infografis Ekspor-Import Indonesia Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b)

Sehubungan dengan kerjasama internasional neraca pembayaran dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor internal yang disebabkan oleh kondisi fundamental makroekonomi guncangan perekonomian domestik dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh guncangan dan kelesuan perekonomian global serta kondisi perekonomian negara yang menjadi mitra dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional. Sehingga sebagai mitra dagang yang menjalin hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia, guncangan perekonomian China mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui neraca pembayaran Indonesia.

Namun fluktuasi yang terjadi pada neraca pembayaran tentunya tidak hanya disebabkan oleh kinerja ekspor, impor dan investasi saja, akan tetapi ada beberapa hal yang secara teoritis terkait dengan kinerja ekspor, impor dan investasi itu sendiri yang menentukan saldo dari transaksi neraca transaksi berjalan dan saldo transaksi keuangan dan financial yang akhirnya berpengaruh terhadap neraca pembayaran Indonesia. Pendekatan elastisitas Keynes menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar sebagai alat pengubah untuk memperbaiki neraca pembayaran, ekspor dan impor serta nilai tukar akan memberikan pengaruh terhadap neraca pembayaran melalui analisis Marshall Lenner Condition. Menurut pendekatan absorpsi Keynesian menjelaskan bagaimana kondisi perubahan pendapatan dan kurs untuk memulihkan keseimbangan eksternal neraca pembayaran. Melalui pendekatan IS-LM teori

Keynesian menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga suatu negara diatas suku bunga dunia akan menarik modal dari luar dan akan memperbaiki neraca transaksi modal dan financial yang merupakan bagian dari neraca pembayaran.

Bab 3

Karakteristik dan Sistem Ekonomi Indonesia

3.1 Pendahuluan

Keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka yang mampu memilih dan mengembangkan sistem perekonomiannya, tidak terlepas adanya doktrin dari kolonialisme dan imperialisme. Perjuangan panjang yang ditempuh untuk memerdekakan negara dari kuasa Belanda (350 tahun) dan Jepang (3,5 tahun) tidaklah mudah, Indonesia harus menghadapi fasisme (Trotsky) dan komunisme (Stalin) kala itu. Ikrar kemerdekaan diperoleh dan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, membuat Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas menjalankan ideologi negara tanpa adanya tekanan dari penjajah, dan aspek terpenting dari keberadaan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat adalah aspek ekonomi, politik, sosial dan budayanya.

Struktur perjalanan aliran sistem ekonomi Indonesia bermula kaum penjajah, yang masih menjadi dominan dalam pengaturan aktivitas ekonomi di Indonesia, namun karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia yang penuh rasa kegotongroyongan dan tenggang rasa, menjadi ciri khas tersendiri dari perubahan sistem perekonomian di Indonesia.

Karakter kegotongroyongan dan tenggang rasa ini diaplikasikan melalui konsep perkoperasian, yang membangkitkan usaha kerakyatan tanpa mengurangi pangsa pasar usaha kecil, semuanya bekerja sama dengan harapan dapat meningkatkan yang baru bangkit dari penjajahan. Konsep kegotongroyongan merupakan perubahan bentuk perekonomian yang sebelumnya dipengaruhi oleh sistem perekonomian dunia, sistem tersebut dicetuskan oleh para kaum Klasik (Adam Smith), yang menggunakan model ekonomi kapitalis dengan menganggap bahwa tingkat ekuilibrium perekonomian akan berjalan baik, manakala dalam perekonomian tersebut tidak terdapat campur tangan pemerintah. (Agustiati, 2015)

Pemikiran kaum klasik tersebut terkonsentrasi pada tingkat produksi, konsumsi dan distribusi kekayaan, di mana unsur tersebut akan berjalan secara natural yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum ekonomi dalam sebuah perekonomian. Kaum Klasik berpandangan bahwa, terdapat masalah-masalah dalam suatu perekonomian yang harus diselesaikan berdasarkan teori ekonomi, di mana suatu nilai dan harga barang terbentuk karena adanya pengaruh dari upah dan profit melalui persaingan antara pelaku ekonomi di pasar, sehingga pemerintah tidak memiliki kuasa untuk mengatur nilai dan harga suatu barang, melainkan hanya membuat agar penetapan harga tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah dalam konteks pemikiran kaum klasik hanya bekerja untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (aktivitas perekonomian) serta memastikan terjadi pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, agar tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat pada suatu negara (Basmar et al, 2020b).

Tugas dasar pemerintah di sektor ekonomi harus dapat berjalan dengan baik, karena tingkat kesejahteraan hidup setiap manusia dapat diukur melalui peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun sebagai negara yang baru beranjak tentunya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai sistem lainnya seperti politik, hukum, sosial dan budaya, kondisi tersebut cukup berat untuk dijalankan, tetapi pemerintah harus terus berupaya untuk melepaskan rantai kemiskinan yang terjadi diakibatkan dominasi dari sistem kapitalisme *laissez-faire*.

Secara naluria, manusia diciptakan bukan untuk hidup secara individual, namun mereka hidup dengan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam kondisi apapun, terlepas dari faktor ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lain sebagainya, selain itu manusia telah dilengkapi dan dicukupkan dengan segala bentuk kekayaan alam dan teknologi, yang dapat

digunakan sebaik mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan hidup sekarang maupun nanti (Pangiuk, 2011). Atas dasar pengakuan tersebut, maka perbaikan sistem perekonomian kemudian dilakukan oleh kaum sosialis, konsep ini menemukan pengukuran baru yang merupakan turunan sistem perekonomian termasuk pertumbuhan Marxis, konsep pasar, demokrasi dan lain sebagainya (D.F. Griffith, 1984).

Segala perbedaan dari konsep sistem ekonomi yang ada akan bermuara pada pencapaian arti kesejahteraan bagi masyarakat, walaupun terdapat sistem ekonomi yang menganut kebebasan individualistik (kapitalisme – Adam Smith), namun sasaran akhir dari sistem tersebut tetap pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama melalui efisiensi perekonomian (Trialdi et al, 1999).

3.2 Karakteristik Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian telah mengalami perubahan dari masa ke masa, setiap periode sistem ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, demikian pula bagi negara yang mengadopsi sistem perekonomian tersebut dalam penerapannya juga memiliki perbedaan tersendiri. Karakteristik tersebut ditunjang melalui elemen-elemen perekonomian setiap negara, sehingga efektivitas penerapan sistem ekonomi ini sangat tergantung dengan kondisi negara masing-masing. Secara keseluruhan sistem perekonomian yang terjadi di dunia terdiri dari beberapa bentuk antara lain Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Ekonomi Sosialis, Sistem Ekonomi Campuran, Sistem Ekonomi Komunis Dan Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Kapitalis (Liberal), merupakan sistem ekonomi yang berideologi Yahudi, yang sejarahnya berasal pada abad ke 18 pada perekonomian Inggris, di mana konsep ini diprakarsai oleh Adam Smith (Kaum Klasik) dalam bukunya "The Wealth of Nations", konsep ini mengandung prinsip bahwa perekonomian akan mengalami peningkatan produksi jika faktor-faktor produksinya dikuasai oleh orang-orang berkapital (bermodal) besar.

Kapitalis (Kapitalisme), merupakan istilah yang dikemukakan oleh Karl Marx (1818- 1883) yang terjadi di pertengahan zaman sebagai konsep pengganti sistem feodal, kapitalisme ini berkembang melalui sistem feodal yang mengalami perubahan pada sistem produksi yang dijalankan dengan anggapan

bahwa jika pihak swasta menguasai faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal, maka akan mampu menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga tidak diperlukan peranan pemerintah dalam mengelola faktor produksi tersebut, sementara itu dengan peningkatan produksi tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran secara individu, karena mereka diberikan kebebasan dalam mengatur dan menjalankan semua kekayaan yang dimilikinya agar dapat mencapai keuntungan yang maksimal.

Karakteristik sistem kapitalis ini memandang bahwa peralatan produksi, distribusi serta pertukaran, harus dikuasai dan dimiliki oleh individu (swasta) secara utuh, di mana konsep ini telah banyak dianut oleh negara-negara yang merupakan induk dari pemikiran sistem perekonomian. Ilustrasi konsep ini dijalankan oleh pemilik modal (individu, swasta, badan usaha, atau korporasi) yang mendapat bantuan modal usaha (pinjaman berbunga) untuk menjalankan aktivitas produksinya dalam upaya mendapatkan keuntungan yang tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui penggunaan sumber daya manusia serta pembayaran upah dari hasil kerja mereka (Chaudhry, 2012 ; Basmar, 2020a).

Adam Smith berpandangan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat ditunjang oleh peningkatan perekonomian, sementara perekonomian akan berjalan ketika pengendalian kekuatan dikuasai oleh pengaruh kepentingan individual. Hal ini didasari bahwa setiap masyarakat/manusia akan berusaha menjauhkan dirinya dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup, sehingga dengan memberikan kebebasan dalam melakukan proses ekonomi maka mereka dapat memenuhi kesejahteraan dan kemakmurannya masing-masing.

Adam Smith berpandangan ketika kebanyakan masyarakat merasakan kesejahteraan dan kemakmuran yang sama, tentunya akan memengaruhi kesejahteraan negara, pengendalian kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan dalam menjalankan usaha, mempunyai peralatan produksi, penetapan harga, melakukan persaingan, dan perundingan. Dengan berbagai penguasaan yang dimilikinya, tentu akan memberikan pengaruh pada aktivitas kegiatan perekonomian yang berjalan dengan cepat, sehingga lambat-laun berpengaruh pada kesejahteraan negara, dan kemudian kaum kapitalis ini menyebutnya *laissez faire* (biarkan saja).

Konsep *laissez faire* ini dapat diartikan secara luas yang bermakna biarkan perekonomian berjalan dengan sendirinya melalui hubungan permintaan dan

penawaran tanpa adanya pengaruh lain termasuk campur tangan pemerintah sekalipun.

Laissez faire dalam buku Adam Smith dengan judul *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang berkembang sebagai konsep persaingan sempurna yang bersumber dari prinsip kegiatan ekonomi melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi yang berjalan sendiri melalui mekanisme pasar ekonomi, sehingga pengaruh pemerintah menjadi kurang efektif (Gregory Grossman, 2004).

Karakteristik sistem kapitalis ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi bekerja melalui tangan tersembunyi (Adam Smith), yang terjadi melalui sistem pertukaran antara masyarakat yang berkehendak memberikan barang dan jasa yang dimilikinya demi mendapatkan barang kebutuhan lainnya. Sistem Kapitalis ini memiliki karakteristik lain melalui perubahan permintaan dan penawaran pasar, yang mengakibatkan perubahan harga baru, perubahan harga ini terjadi melalui 2 cara yang berbeda, untuk jangka pendek harga dapat berfluktuasi (harga tinggi maupun harga rendah), sementara untuk jangka panjang harga cenderung seimbang.

Karakteristik kapitalis ini ditandai dengan kebebasan individu baik perorangan maupun perusahaan dalam hal kepemilikan faktor produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik) di mana produksi dilakukan atas dasar praksis dan tanggung jawab oleh pengusaha swasta itu sendiri, disamping itu karakteristik kapitalis ini memberikan kepada masyarakat kebebasan menentukan sendiri jenis usaha, lapangan pekerjaan, dan bebas bersaing dengan strategi apapun. Karakteristik kapitalis ini juga memberikan kebebasan pada pengusaha untuk mendapatkan kekayaan yang maksimal melalui penciptaan produk serta besaran jumlah produksi yang hendak dibuat, kebebasan berproduksi tersebut menjadikan harga akan terbentuk dengan sendirinya melalui efektivitas permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, sehingga campur tangan pemerintah tidak penting dalam meningkatkan perekonomian negara.

Konsep Kapitalis dikatakan dapat mengubah wajah perekonomian dunia yang sebelumnya masih menggunakan sistem penjajahan atau kolonialisme, sehingga pertumbuhan industri perusahaan dan perdagangan berkembang dengan pesat, namun dibalik perkembangan perekonomian tersebut menimbulkan perilaku ketidakadilan terhadap pelaku-pelaku ekonomi yang lain, sehingga merusak tatanan kehidupan sosial dalam kemasyarakatan (Munthe et al, 2021).

Karakteristik kapitalis ini menjadikan seseorang untuk menimbun kekayaan sebanyak-banyaknya serta berusaha untuk dapat mewariskan pada penerus berikutnya, sehingga ini memberikan dampak buruk pada perekonomian di mana akan terjadi kesenjangan yang besar antara kaum kaya dan miskin, hal ini terjadi karena peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sangat terbatas, konsep ini efektif untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian pasar permintaan dan penawaran produk dan jasa, namun untuk keseimbangan pasar secara makro ekonomi tidak efisien (Gregory Grossman, 2004).

Karakteristik kapitalis ini juga memberikan dampak negatif lain seperti timbulnya perilaku monopoli ekonomi, sehingga konsep permintaan dan penawaran tidak selalu menjadi sistem persaingan sempurna, karena terdapat perusahaan yang memiliki kekuasaan penuh dalam pasar, sehingga penetapan harga tergantung pada konsep permintaan dan penawaran yang diciptakannya, dengan demikian mereka dapat menentukan jumlah dan besaran produk yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Karakteristik kapitalis juga menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tidak efisien, dan memberikan pengaruh pada golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya akan meningkat kekayaan terus menerus melalui kemampuannya dalam memperoleh dan menggunakan faktor-faktor produksi sebanyak mungkin dan tidak terbatas, sementara disisi lain kemampuan kaum miskin akan semakin membuat sulit untuk tumbuh dan berkembang karena memiliki keterbatasan, sehingga konsep ini dapat menimbulkan sistem kanibalisme (antara kaum kaya dengan kaum miskin, pengusaha kecil dan kaum buruh).

Karakteristik kapitalis dapat menimbulkan krisis keuangan, karena perputaran keuangan tidak dapat terkendali dengan baik, sehingga membuat aktivitas perekonomian bergerak secepat mungkin tanpa adanya kebijakan yang memberikan batasan pergerakan keuangan, selain itu perekonomian yang terintegrasi dengan negara lain akan mudah memengaruhi aktivitas perekonomian dalam negeri, hal ini menimbulkan celah dalam proses terjadinya krisis keuangan.

Karakteristik kapitalis juga menciptakan fluktuasi perekonomian yang tidak stabil, kondisi ini digambarkan melalui adanya kondisi perekonomian mengalami peningkatan kemakmuran yang tinggi, namun disisi lain perekonomian juga dapat berubah dengan kemerosotan yang mengakibatkan kerusakan sistem perekonomian, kejadian tersebut akibat adanya perilaku

pengusaha yang juga mengalami perubahan perekonomian, sehingga terjadi kontraksi pada tingkat inflasi, pengangguran yang meningkat dan kemiskinan yang semakin melebar

Dalam karakteristik kapitalis ini peranan pemerintah terbatas untuk menanggulangi kesenjangan karena pada sistem kapitalis fokus penangan pemerintah hanya pada penciptaan keamanan dan menjaga negara dari bentuk perekonomian negara lain yang hendak memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara melalui pertama menegakkan prinsip hukum bagi masyarakat dalam kapasitas menetapkan keadilan dan mencegah penindasan dari setiap pelaku ekonomi, kedua pelaksanaan pekerjaan umum dengan membuat atau mengembangkan fasilitas umum untuk memperlancar proses berjalannya aktivitas perekonomian (Suroso, 1997).

Meski memiliki keterbatasan dan berdampak negatif, namun beberapa negara masih menerapkan konsep pemikiran kapitalis ini antara lain Amerika Serikat, Hongkong, Swedia, Belanda dan Prancis, implementasi kapitalis itu sendiri sudah mengalami gradasi dalam perekonomian sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perekonomian tersebut telah tercampur dengan sistem perekonomian lainnya, dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari suatu priode ke priode lainnya.

Konsep kapitalis yang memiliki keterbatasan ini, kemudian berganti setelah terjadi depresi ekonomi di tahun 1929, konsep ini menunjukkan perubahan ekonomi yang cukup drastis di berbagai belahan dunia, ditandai dengan peningkatan berbagai aspek penunjang kesejahteraan dan kemakmuran negara melalui perkembangan teknologi dan informasi yang sudah memadai, namun aplikasi konsep kapitalisme yang murni belum ditemukan di semua negara, karena negara yang menganut paham kapitalis ini cenderung lebih sosialis dibandingkan negara yang menganut sistem sosialis itu sendiri. (Tho'in 2015).

Sistem Ekonomi Sosialis (terpimpin), merupakan sistem ekonomi yang berideologi Nasrani, sistem ekonomi ini merupakan antitesis dari sistem ekonomi kapitalis yang mana terjadi perbedaan prinsip pemikiran, berupa sistem yang digunakan adalah sistem kolektivisme, dan semua kebijakan memerlukan penangan dari pemerintah.

Sistem ekonomi sosialis, mengacu pada konsep pemikiran Karl Marx, yang menganggap peranan pemerintah dapat mengontrol perekonomian agar dapat berjalan dengan baik, sehingga sasaran untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat dapat terjadi secara merata, konsep masyarakat

dalam pandangan Karl Marx menunjukkan pemerataan tanpa adanya status sosial kaya ataupun miskin, sehingga untuk mewujudkan pandangan tersebut, maka pemerintah menjadi penentu atas penciptaan barang dan jasa yang akan diproduksi, bagaimana barang diproduksi, dan dipergunakan untuk siapa barang tersebut (Suroso, 1997).

Istilah sosialisme mengandung makna bahwa segala bentuk aktivitas, cita-cita, ajaran dan gerakan perekonomian dilakukan dengan cara kolektif, corak sosialisme ini diterapkan secara berbeda setiap negara, sehingga untuk mendefinisikan makna kolektif juga bervariasi, di mana konsep komunisme juga merupakan suatu bentuk dari sistem sosialisme yang sangat ekstrim, di mana perekonomian dijalankan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan dilakukan oleh pemerintah di pusat sebagai pemilik kekuasaan dan kekuatan penuh terhadap faktor produksi.

Sistem ekonomi sosialis ini memiliki karakteristik yang didasari pada konsep kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol segala aktivitas perekonomian, sehingga untuk dapat mencapai sasaran pemerintah, manusia dikontrol sesuai dengan tujuan dan kehendak penguasa yang memiliki kekuatan sesuai dengan falsafah yang dianutnya, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan tercapai melalui kekuasaan dan kekuatan pemerintah yang mengontrol semua faktor produksi dan distribusi kepada masyarakat. Karakteristik sistem ekonomi sosialis, ditunjukkan dengan perilaku perekonomian berlandaskan kebijakan pemerintah (sistem komando) seperti aktivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, sehingga kekuatan individu tidak menjadi dominan atas faktor-faktor produksi, alat produksi, distribusi dan pertukaran, semua menjadi kontrol pemerintah dengan sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata (Tho'in, 2015).

Konsep sistem ekonomi sosialis ini menitikberatkan sepenuhnya pada peranan pemerintah dalam menjalankan perekonomian, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab atas aktivitas roda perekonomian, dikatakan sistem komando atau terpimpin ini karena segala aktivitas menjadi terpusat pada satu titik pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan kebijaksanaan perekonomian. Kesejahteraan dan kemakmuran ditunjukkan dengan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, sehingga pergerakan siklus perekonomian menjadi sangat terkontrol, konsep ini menggunakan kebijakan pemerintah terhadap harga barang dan jasa melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran di pasar perekonomian (Basmar, 2018c ; Tho'in, 2015).

Dalam karakteristik ekonomi sosialis ini kebijakan dalam menjalankan perekonomian sepenuhnya menjadi kontrol pemerintah, namun dibalik konsep tersebut kebebasan individu masih dapat melakukan aktivitas perekonomian, meski dalam kegiatan tersebut pemerintah memberikan batasan dan ikut berperan serta dalam kegiatan tersebut, semua bertujuan agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Konsep ini menjadikan kreativitas individu menjadi tidak berkembang karena mendapat pengawalan ketat dari pemerintah, sistem sosialis beranggapan bahwa kesejahteraan individu akan terwujud jika kesejahteraan secara umum telah terpenuhi, sehingga sistem ini menjadikan semua faktor produksi adalah milik pemerintah untuk kepentingan sosial.(Tho'in, 2015).

Konsep sistem ekonomi sosialis ini memandang bahwa kepentingan bersama jauh lebih penting untuk didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi, sehingga pemerintah berperan dalam menyeimbangkan antara keduanya terkait dengan penguasaan faktor-faktor produksi yang dikuasai oleh negara dalam proses aktivitas perekonomian.

Karakteristik sistem sosialis ini memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengatur pergerakan tingkat inflasi, pengangguran, maupun kemiskinan dalam negara, hal ini karena proses permintaan dan penawaran perekonomian bisa dikendalikan secara keseluruhan oleh pemerintah. Karakteristik lainnya adalah pengendalian atas aktivitas pasar barang dapat berjalan baik, karena pemerintah telah mengatur melalui kebijakan yang tepat menggunakan jalur distribusi barang dan jasa kepada semua kalangan masyarakat.

Secara teori krisis ekonomi maupun keuangan pada konsep sistem sosialis jarang terjadi karena pencegahan krisis dapat dijalankan melalui kekuatan dan kekuasaan pemerintah dalam mengatur aktivitas perekonomian, hal ini menandakan bahwa peranan pemerintah dalam kebijakan perekonomian sangat besar. Sistem ekonomi sosial yang mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individu menjadikan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan cepat, kemudahan itu diperoleh karena pemerintah berhak dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan atas aktivitas perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis ini dapat menyebabkan terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat, karena konsep ini mengandung unsur kekuatan dan kekuasaan pada faktor produksi ekonomi, disamping itu pun kebebasan individu dalam memilih sumber daya sangat terbatas karena adanya kontrol

tersebut. Sistem Ekonomi Sosialis ini banyak diadopsi pada negara-negara Eropa Timur yang konsep perekonomiannya adalah sistem komunis, namun sejalan dengan perkembangan perekonomian konsep ini juga diadopsi di negara-negara seperti Rusia, Polandia, Cina dan Kuba. Namun bagi negara Uni Soviet yang mengganti konsep pemerintahannya dari sistem perekonomian sosialis menjadi sistem ekonomi kapitalis, karena adanya politik dunia dan kehancuran komunis di negara tersebut dibawah pengaruh Boris Yeltsin yang menjadi pimpinan pada saat itu.

Sistem Ekonomi Campuran merupakan kolaborasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, untuk mencapai kesejahteraan bersama maka pemerintah dan kalangan swasta bekerja sama dalam menjalankan dan mengatur aktivitas perekonomian, konsep ini sangat cocok untuk negara berkembang. Terbentuknya konsep sistem ekonomi campuran ini karena adanya kelemahan dari konsep sistem ekonomi sosialis yang mendominasi kekuasaan dan kekuatan pada pemerintah terhadap sektor perekonomian, yang mengakibatkan depresi keuangan pada tahun 1930-an, disamping itu pula perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya raya juga tidak dapat dihindarkan, sehingga beberapa negara yang menganut konsep sistem ekonomi campuran dianggap cukup memberikan keadilan bagi setiap masyarakat di suatu negara. Karakteristik sistem ekonomi campuran ini masih dapat dirasakan pada sistem perekonomian negara yang menganut konsep sistem ekonomi kapitalis maupun negara yang menganut sistem ekonomi sosialis (Suroso, 1997).

Sistem Ekonomi Campuran, dalam pandangan Hitler menyatakan bahwa konsep ini sebagai konsep nasional sosialisme dalam menjalankan aktivitas perekonomian, adapun beberapa negara yang tergolong non-komunis menganggapnya sebagai konsep sistem ekonomi sosialis yang mengalami modernisasi, sementara negara yang tergolong non-fasisme menganggap konsep ini merupakan konsep untuk negara kemakmuran, negara kesejahteraan, demokrasi ekonomi, serta masyarakat adil makmur.

Karakteristik sistem ekonomi campuran ini, mendekati konsep sosialis, namun tidak tergolong pada golongan sosialis yang radikal, di mana kaum komunisme dan kaum fasisme menganggap bahwa individu merupakan golongan yang berada di bawah subordinasi negara dan kelas, sehingga sistem ekonomi campuran ini dapat berupa golongan komunis dan golongan fasisme dalam suatu negara. Karakteristik sistem ekonomi campuran ini, tidak selamanya murni diadopsi oleh beberapa negara, konsep campuran yang

dimaksud adalah setiap negara akan cenderung memiliki porsi perbandingan antara persentase kapitalis dan sosialis, di mana negara yang mengadopsi sistem kapitalis lebih besar dari pada sistem sosialis dapat dilihat di negara Amerika Serikat, Hongkong dan Singapura, sementara negara yang mengadopsi sistem sosialis lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kapitalis dapat dilihat di negara India.

Karakteristik pengukuran suatu negara yang menganut sistem ekonomi campuran dilakukan oleh Milton Friedman dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi, di mana indeks ini mengukur tentang besaran peranan pemerintah dan swasta dalam operasi dan struktur perekonomian, ditambah lagi dengan 17 komponen pengukuran lainnya. Kelompok Economic Freedom Network yang dikembangkan oleh Milton Friedman ini menskalakan pengukuran indeks kebebasan ekonomi antara 0 dan 10, untuk mengetahui negara yang menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem ekonomi campuran melalui persentase perbandingan sistem ekonomi kapital dan sistem ekonomi sosialis, terdapat beberapa negara yang memiliki persentase arah kapitalis lebih besar dibandingkan dengan sosialis seperti Hongkong, Singapura, Selandia Baru, Amerika Serikat, Thailand, Filipina, dan Malaysia dan Indonesia.

Karakteristik Sistem ekonomi campuran ini mengembangkan konsep kesetaraan antara kebebasan, kekuasaan, dan kekuatan, di mana mereka akan bekerja sama sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Secara keseluruhan sistem ini serupa dengan sistem ekonomi kapitalis yang kecenderungan kebebasan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan, sementara konsep sosialis diwakilkan dengan peranan pemerintah yang mendominasi pada proses perekonomian. Karakteristik sistem ekonomi campuran ini memiliki 2 sektor perekonomian, satu sektor dikuasai oleh swasta (individu) seperti kepemilikan faktor-faktor produksi, sementara sektor perekonomian lainnya dikuasai oleh pemerintah atau negara (Cornelis Rintuh, 1995).

Karakteristik sistem ekonomi campuran ini telah menciptakan suatu persaingan di pasar bebas yang natural antara permintaan dan penawaran produk dan jasa perekonomian, disamping itu pemerintah menjalankan terlaksananya kebijakan perekonomian dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas sektor publik dan sektor swasta, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas serta mengatasi potensi terjadinya krisis keuangan. Karakteristik sistem ekonomi campuran ini banyak diaplikasikan pada

beberapa negara, mengingat sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosial terdapat banyak kekurangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga konsep ekonomi campuran banyak diadopsi oleh negara-negara Perancis, Malaysia dan Indonesia.

Sistem Ekonomi Komunis, merupakan sistem ekonomi yang berideologi Atheis, konsep sistem ekonomi komunis ini menganut prinsip bahwa semua aktivitas perekonomian dikuasai negara atau pemerintah. Negara yang menganut konsep ini merupakan negara komunis, dengan komando penuh melalui konsep kediktatoran partai komunis, dan tidak lagi terdapat unsur demokrasi atau kebebasan, sehingga konsep ini sulit mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran untuk semua masyarakat, Meski konsep ini mampu mengurangi kelemahan pada konsep sistem ekonomi bebas (T. Gilarso, 2014).

Komunisme mengandung makna historikal yang menjelaskan tentang konsep sistem sosial dengan karakter bahwa semua faktor-faktor produksi merupakan bagian masyarakat, dan dipergunakan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Namun terjadi pergeseran konsep dan sistem sehingga sistem komunis mengacu pada konsep kebijakan pemerintah secara penuh dalam suatu negara.

Karakteristik sistem ekonomi komunis ini, ditandai oleh kekuasaan penuh pemerintah baik terhadap perusahaan besar maupun perusahaan kecil, semua berada dalam kekuatan negara atau pemerintah, dengan anggapan bahwa penguasaan yang dilakukan pemerintah dapat menjaga tingkat kesejahteraan dan kemakmuran melalui distribusi perekonomian. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan pasar dalam proses penentuan harga, sistem ekonomi komunis ini tidak tercipta aktivitas perekonomian yang normal, artinya penentuan harga atas barang dan jasa tidak berdasarkan antara permintaan dan penawaran di pasar, semua konsep termasuk harga dan aktivitas pasar ditentukan pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa semua kebijakan menjadi totalitas milik negara atau pemerintah tanpa campur tangan pihak lain.

Karakteristik sistem ekonomi komunis ini menggunakan kebijakan pemerintah sebagai pedoman dalam mengatur dan menjalankan aktivitas masyarakat secara keseluruhan, terkait dengan lapangan pekerjaan yang disediakan, jenis pekerjaan yang harus dilakukan, besarnya pendapatan, output apa yang dihasilkan, berapa tingkat harga yang ditetapkan, dan bagaimana

menginvestasikan hasil pendapatan, hal ini menjadi sebagian dari beberapa kontrol kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh. Karakteristik sistem ekonomi komunis ini, dipandang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, namun beberapa negara masih menganut dan menjalankan konsep sistem ekonomi komunis ini, seperti yang terjadi di Rusia dan Republik Rakyat Cina.

Karakteristik sistem ekonomi komunis sangat melekat di Rusia dan Republik Rakyat Cina, di Rusia yang identik dengan negara komunis (1948) menjadikan pengaruh dari kaum Karl Marx menjadi semakin berkurang (seperenam penduduk dunia mengikuti paham Karl Marx), Lenin dan Stalin yang merupakan negara komunis telah menyimpang pada ajaran Marxisme, demikian pula dengan Negara Republik Rakyat Cina sebagai negara komunis (1979) melalui penguasa Mao Tze Tung kepada 700 milyar orang, mengakibatkan pengikut paham Karl Marx mencapai sepertiga penduduk dunia, meski pertambahan negara berkonsep komunis sudah semakin banyak, yang jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari separuh penduduk dunia, namun masih terjalin hubungan baik dengan negara yang menganut paham Karl Marx, hal ini dibuktikan oleh negara Moscow dan organisasi dunia yang berfaham Komunis, namun dalam perekonomian mereka menggunakan konsep pemikiran Marxisme (Al-Kaaf, 2012).

Karakteristik sistem ekonomi komunis identik dengan perekonomian di negara Rusia, di mana konsep totalitas kekuasaan berada di tangan negara atau pemerintah, perencanaan perekonomian dalam aktivitasnya melalui aturan yang telah ditetapkan oleh negara, mulai dari penggunaan faktor-faktor produksi hingga output produksi, konsumsi dan distribusi produk terjadi karena kebijakan pemerintah, oleh karenanya konsep ini menjadikan tenaga kerja atau masyarakat hanya dapat bekerja dengan keras agar dapat menghasilkan sistem yang terbaik, adapun untuk bisnis yang bersifat pribadi tidak mendapat tempat untuk berkembang di negara ini (Siagian et al, 2020).

Karakteristik sistem ekonomi komunis ini tidak dapat mendorong negara menjadi negara yang maju dan makmur, hal ini dikarenakan semua sumber-sumber kegiatan ekonomi menjadi milik pemerintah sepenuhnya. Dan tata laksana aktivitas perekonomian diatur oleh negara, hal ini membuat kemiskinan meningkat, masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam mencari atau meningkatkan kekayaannya secara pribadi, menjadikan tingkat kualitas kehidupan mereka sangat tergantung dengan kebijakan pemerintahnya, oleh

karena itu banyak negara yang meninggalkan konsep ini dan beralih pada konsep sistem ekonomi yang lain.

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berideologi Al-Quran dan Sunnah, karakteristik sistem ekonomi Islam ini ditandai dengan prinsip Tauhid (Keesaan Allah), yang teraplikasi pada kegiatan ekonomi berdasar pada konsep bahwa semua hasil ciptaanNYA dapat dipergunakan sebaik mungkin sebagai ibadah, karena akan terdapat pertanggungjawaban atas segala penggunaannya kelak.

Konsep Sistem Ekonomi Islam digambarkan oleh Thomas Khun yang melihat bahwa konsep ini merupakan konsep paripurna yang menjelaskan tentang prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga konsep Islam ini menjadi dasar ekonomi yang Rabbani dan Insani, meski setiap sistem ekonomi memiliki pokok pemikiran dan paradigma tersendiri. Konsep Sistem Ekonomi Islam dimata Thomas Kuhn, menerangkan konsep Rabbani karena setiap perdagangan dilakukan dengan menggunakan konsep dan syarat dengan nilai-nilai Ilahiyah, sedangkan Insani merupakan konsep perekonomian yang dijalankan dan dilakukan agar dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua manusia (Qardhawi, 2004).

Karakteristik sistem ekonomi islam ini bertujuan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik tanpa mendzalimi atau didzalimi, konsep perdagangan dan perekonomian yang baik telah dicontohkan pada kita oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dalam melakukan transaksi perdagangannya harus mengandung unsur Sidiq (komitmen menegakkan kebenaran), Amanah (dapat dipercaya karena kejujuran), Tabligh (menyampaikan kebenaran melalui suri tauladan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi), Fathanah (kecerdasan baik intelektual, emosional dan spiritual).

Karakteristik Sistem Ekonomi Islam ini juga masih tetap memerlukan pengawasan pemerintah (Khalifah) yang menjalankan kegiatannya sebagai kontrol agar proses perekonomian dapat berjalan sesuai dengan konsep syariah dan tidak menimbulkan kerugian dari semua pihak. Karakteristik sistem ekonomi islam juga menjadikan output perdagangan (Ma'ad) harus dapat menghasilkan keuntungan didunia dan di akhirat. (Zaki 2017) Karakteristik Sistem Ekonomi Islam juga memberikan kebebasan kepada pebisnis untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi yang banyak atau berganda (multitype ownership), baik kepemilikan individu, swasta maupun negara.

Karakteristik Sistem Ekonomi Islam memperbolehkan untuk melakukan perdagangan ekonomi, selama konsep perdagangan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak mengandung penipuan, riba (tambahan yang diperoleh secara zalim), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian). Karakteristik Sistem Ekonomi Islam juga memandang secara keseluruhan hubungan antara pemerintah (Khalifah) dan output perdagangan (Ma'ad) yang kemudian disebut Sosial Justice, yang dapat diterjemahkan bahwa dalam proses perdagangan ekonomi harus dilakukan dengan prinsip suka sama suka dan tidak saling menzalimi (Zaki 2017).

Karakteristik sistem ekonomi Islam memiliki pedoman yang tidak berbeda dengan konsep sistem ekonomi lainnya (bentuk, cabang, rincian dan aplikasi perekonomian yang beraneka cara), konsep sistem ekonomi Islam juga berkaitan dengan kondisi perekonomian secara global yang dapat berupa pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, dan arahan-arahan prinsip perekonomian global, namun akan terdapat perbedaan secara spesifik di bidang yang dianggap berlawanan terhadap kaidah keIslaman (Qardhawi, 2004). Konsep perbedaan sistem ekonomi Islam dengan konsep sistem ekonomi lainnya karena konsep Islam selalu memandang secara global masalah-masalah yang dihadapi setiap negara atas perubahan-perubahan dari lingkungan dan zaman. Sehingga konsep Ekonomi Islam ini dapat berlaku sampai kapanpun karena mampu menyesuaikan setiap kondisi yang mengalami perubahan.

3.3 Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa, semua sistem yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan aktivitas perekonomian, namun terkadang sistem yang dijalankan menghadapi kendala yang mengakibatkan indikator pertumbuhan ekonomi berjalan tidak stabil. Dalam kajian literatur istilah Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang mengandung makna kinerja dari total macam-macam bagian dalam suatu struktur, sehingga dengan demikian sistem ini dapat diartikan dengan kinerja dari struktur organisasi yang saling kait mengait.

Pemikiran Adam Smith (1723-1790) sebagai bapak ekonomi dunia mendefinisikan sebagai dasar untuk mengkaji upaya pencapaian kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dalam aktivitas perekonomian (Rayi Kinasih, 2011). Karakter dalam sistem ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari sistem ekonomi yang diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap manusia, sehingga dengan demikian keterkaitan antara karakter dan sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan (Dumairy, 1996).

Sistem ekonomi pada prinsipnya mengandung arti dan makna, berupa pengaktifan seluruh lembaga pemerintahan untuk bekerjasama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, ataupun sistem ekonomi dapat diartikan sebagai metode yang digunakan oleh negara agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan pengaturan hubungan antara masyarakat dan negara, di mana sistem ekonomi akan menarik jika terdapat perbedaan dengan negara lain berdasarkan aspek sumberdaya, faktor-faktor produksi, kebebasan dalam meningkatkan pendapatan serta peranan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan negara (Farida, 2011).

Secara keseluruhan, sistem ekonomi merupakan satu kesatuan yang bekerja berdasarkan tujuan bersama, dengan perpaduan dari setiap bagian-bagian yang memiliki karakteristik dan batasan tersendiri, tujuan bersama dimaksudkan adalah proses penggunaan dan pengolahan alat-alat dari faktor-faktor produksi, sumberdaya alam dan keterampilan dalam proses barang dan jasa (Bhudianto, 2012). Sistem ekonomi yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat berbeda-beda, pilihan sistem keuangan yang dijalankan bergantung pada persetujuan dan kesepakatan antara masyarakat, bangsa, dan konsep yang digunakan (Subandi, 2011; Bhudianto, 2013).

Permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara berbeda-beda sehingga untuk menyelesaikan masalah tersebut, negara dapat menentukan pilihan sistem ekonomi yang tepat agar sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya, sesuai kesepakatan Pemangku kepentingan di dalamnya, yang bertitik tolak pada undang-undang dasar, ideologi negara terhadap sistem ekonominya. Penyelesaian atas masalah yang dihadapi bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suatu negara (Subandi, 2011; Bhudianto, 2012).

Berdasarkan definisi dari para ahli terkait dengan sistem ekonomi, secara umum terkait antara faktor produksi, pemerintah dan masyarakat, namun konsep ini berbeda-beda setiap negara tergantung kondisi ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian serta sumberdaya alamnya. Prinsip dasar dari sistem ekonomi ini selalu mengalami perubahan pada roda perekonomian, ketika terjadi fluktuasi pada gelombang yang dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya perubahan ekonomi dunia sebelum sistem perekonomian Indonesia terbentuk, seperti di zaman Malaise dimulai tanggal 24 Oktober 1929 atau sering disebut dengan Selasa Kelam, di mana pada tanggal 29 Oktober 1929, kondisi bursa saham di New York mengalami depresiasi yang sangat dalam, kondisi tersebut kemudian merambat pada transaksi perdagangan internasional, pendapatan masyarakat, kerusakan di sektor pajak, turunnya harga manufaktur, margin, harga barang hasil sektor primer (pertanian, pertambangan dan hutan) yang turun sebesar 50 – 60 %, sehingga kondisi ini terakumulasi serta memukul sendi-sendi perekonomian di Amerika Serikat.

Tekanan berat yang dihadapi perekonomian Amerika Serikat ini tentunya menjadikan cikal bakal perubahan-perubahan sistem perekonomian di beberapa negara, tidak terkecuali dengan Indonesia, konsep perubahan sistem perekonomian di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, secara umum Indonesia telah melewati beberapa periode seperti periode ekonomi perang (1945 - 1952), periode pembangunan ekonomi nasional (1952-1959), periode ekonomi komando (1959 - 1966), periode demokrasi ekonomi (1966 - 1973), periode ekonomi minyak (1973 - 1980), periode ekonomi keprihatinan (1980 - 1987), periode ekonomi konglomerasi (1987 - 1994), periode ekonomi kerakyatan (1994 - 2020).

Dari perjalanan panjang sistem perekonomian Indonesia terdapat 3 siklus keuangan yang memberikan pengaruh pada perekonomian, hal ini dikarenakan adanya pergeseran ekonomi global yang ikut memengaruhi ekonomi secara nasional setiap negara termasuk negara Indonesia, terkait dengan perdagangan internasional, yang sebagian besar perekonomian mengalami resesi akibat perlambatan ekonomi Amerika Serikat, namun proses perjalanan perekonomian tersebut masih terdapat pertumbuhan ekonomi. (Basmar et al, 2018d) Sehingga struktur pergerakan atau fluktuasi sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini



Gambar 3.1: Sistem Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Siklus Perekonomian Indonesia I (1950 - 1967), pergerakan sistem perekonomian kapitalis Indonesia pada Gambar 3.1 diawali dengan proses tekanan yang cukup dalam, kondisi ini mematahkan teori kapitalisme, bahwa dengan bekerja permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan pemerintah maka laju perekonomian akan bisa mencapai titik keseimbangan.

Konsep perekonomian kapitalis ini didasari oleh pemikiran kaum New Classical dengan New Keynesian, pemikiran kedua kaum tersebut memang memiliki pandangan dan pemikiran yang berbeda, hal ini ditandai dengan pemikiran dan pandangan kaum Neo Classical yang beranggapan bahwa kebijakan perekonomian dari sektor moneter (aktivitas pasar keuangan) merupakan suatu konsep yang disebut *money neutrality* yaitu konsep permintaan dan penawaran pada pasar keuangan tidak memberikan dampak pada aktivitas perekonomian, dan konsep ini menekankan bahwa permintaan dan penawaran pada pasar keuangan akan berpengaruh ketika kondisi tersebut tidak diantisipasi oleh semua lapisan masyarakat. Pandangan lainnya datang dari New Keynesian yang memiliki pemikiran yang terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh kaum New Classical yang menyatakan bahwa kebijakan perekonomian dari sektor moneter (aktivitas pasar keuangan) merupakan suatu konsep yang disebut *money non-neutrality* yang mengandung inti bahwa konsep permintaan dan penawaran memberikan pengaruh pada pergerakan perekonomian di sektor riil.

Dari konsep pemikiran tersebut maka sistem perekonomian kapitalis menjadi pilihan dari beberapa negara di dunia, namun konsep kapitalis sudah

berkembang di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diraih. Konsep perekonomian yang dianut bangsa Indonesia setelah kemerdekaannya berawal dari sistem kapitalisme yang menganggap perekonomian dapat mencapai titik equilibrium dengan sendirinya tanpa adanya komando dari pemerintah.

Teori kapitalisme ini ternyata sangat rentan terhadap krisis, kondisi ini ditumpangi oleh negara-negara yang beraliran kapitalis seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, rusaknya sistem perekonomian negara-negara besar yang berhaluan kapitalis dikarenakan oleh beberapa variabel ekonominya mengalami kemerosotan, antara lain terjadinya depresiasi nilai tukar dan merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan yang akhirnya melumpuhkan berbagai perusahaan-perusahaan besar di kedua negara, sehingga perubahan kondisi perekonomian kedua negara raksasa tersebut memberikan efek pada perekonomian di Indonesia

Perubahan dinamika perekonomian setiap negara tentunya akan memberikan pengaruh pada perekonomian negara lainnya, sifat perubahan global ini tentunya akan terasa ketika negara-negara adidaya (Amerika Serikat) mengalami gejolak perekonomian, tentunya akan memberikan tekanan pada perekonomian negara lainnya yang memiliki hubungan historis dengan negara tersebut. Sinkronisasi sistem ekonomi Indonesia dan negara adikuasa karena adanya reaksi global, perubahan negara adidaya tersebut dengan sendirinya akan merespon pada variabel perekonomian di Indonesia, di mana ketika terjadi perubahan harga barang-barang produksi dari luar negeri akan memberikan dampak pada perubahan nilai tukar di Indonesia, sehingga dalam jangka panjang kondisi ini tentunya akan memengaruhi pelaku ekonomi dalam aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi, yang memberikan dampak pada proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Perubahan jangka panjang ini tentunya akan memberikan pengaruh pada gejala perekonomian lainnya, seperti tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi karena perubahan ekspektasi masyarakat, jumlah uang beredar, kenaikan harga produksi distribusi penggunaan kapasitas usaha dan faktor musiman. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakseimbangan laju perekonomian pada sektor yang bergerak dibidang produksi dan distribusi, sehingga akan memperdalam tekanan dan memperpanjang durasi dari laju tingkat inflasi dan nilai tukar, apalagi jika faktor ekonomi tersebut mendapat tekanan dari faktor eksternal. Globalisasi merupakan faktor eksternal yang merupakan salah satu perangkat masuknya tekanan perekonomian Indonesia, tekanan tersebut memperbesar dan mempercepat tekanan gelombang krisis dalam penyebarannya ke sektor

lainnya termasuk sektor non ekonomi. Perangkat lainnya ditemukan dari integrasi keuangan internasional (International Financial Integration) yang mengandung unsur domino effect pada perekonomian secara nasional dan internasional (Edison et al, 2002).

Sumber krisis dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, yang memberikan pengaruh pada kinerja makroekonomi dalam suatu negara, kondisi tersebut terjadi setelah kemerdekaan, di mana Indonesia menganut struktur ekonomi kolonial yang kemudian berganti menjadi ekonomi nasional, konsep ini menekankan pada jalannya perekonomian secara makro dengan pembangunan industri kecil dan pengembangan perusahaan asing yang berubah menjadi perusahaan nasional (Siswanti et al, 2020). Konsep perubahan tersebut mulai dari sistem ekonomi kapitalisme kemudian menjadi sistem ekonomi kolonial dan ekonomi nasional belum mampu menjadikan Indonesia bangkit secara utuh, faktor tekanan dari beberapa elemen memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tekanan yang dirasakan dalam sistem ekonomi ini adalah sulitnya untuk meningkatkan tingkat produksi nasional karena adanya keterbatasan kapasitas dan infrastruktur pendukung, ditambah lagi dengan adanya konflik politik yang tidak berkesudahan, bahkan cenderung memanas pada moment-moment tertentu disertai pemberontakan yang masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia, sehingga berdampak pada fluktuasi tekanan sistem ekonomi di Indonesia semakin berat dan terkesan memasuki masa resesi.

Kondisi ini merupakan suatu sinyal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, konsep yang diungkapkan oleh Minsky mengindikasikan krisis melalui 4 faktor yaitu pertama yang disebut dengan initial shock yaitu suatu keadaan di mana terjadi perubahan sistem ekonomi dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, sering terjadi pergantian susunan kabinet karena adanya konflik politik, aktivitas pemberontakan masih sering ditemukan, rendahnya produksi pertanian dan manufaktur, dan banyaknya pembangunan proyek mercusuar. kedua yang disebut positive feedback mechanism di mana kondisi ini dijelaskan dengan terbentuknya berbagai industri-industri kecil dan perubahan perusahaan asing menjadi perusahaan nasional, meski kinerja mereka belum memberikan hasil yang maksimal. ketiga yang disebut funding source merupakan upaya pencetakan uang dalam jumlah yang besar guna membangun proyek mercusuar dan penggunaan dana untuk penumpasan pemberontakan yang masih terjadi. keempat yang disebut negative shock yang menandakan adanya hyper inflation sebesar 650%, akibat terjadinya

peningkatan jumlah uang beredar yang tidak sejalan dengan kenaikan hasil produksi yang terjadi di tahun 1966.

Dari sekian banyak sinyal krisis keuangan, yang paling menjadi sorotan adalah tingginya inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan permintaan barang dan jasa, yang tidak dibarengi dengan tingkat produksi yang tinggi, sehingga dari dampak tersebut maka pada tahun 1959 dan 1965 pemerintah Indonesia melakukan beberapa devaluasi, meski upaya tersebut sering dilakukan namun kondisi ini tidak mampu menekan laju inflasi yang mencapai 650% (hyper inflation), buruknya keadaan tersebut semakin berat karena adanya program pemerintah atas proyek-proyek mercusuar, sehingga ekspansi fiskal berlebihan dianggap sebagai salah satu faktor yang memberikan tekanan pada perekonomian, disamping itu konfrontasi dengan negara Malaysia juga semakin memberikan tekanan negatif pada perekonomian di Indonesia (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009 ; Basmar, 2011).

Tekanan demi tekanan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia kala itu dirasakan begitu berat, upaya yang dilakukan untuk mengurangi tekanan itu adalah mengendalikan inflasi yang mencapai titik hyper inflation serta menyelamatkan uang negara, pemerintah mengubah konsep sistem keuangannya menjadi sistem ekonomi campuran, sehingga dengan konsep ini pemerintah hanya bertindak sedikit mungkin agar kelonggaran aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Keynes, selain itu pemerintah tetap menjaga agar kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pemerataan pembangunan terus diupayakan sehingga dengan program tersebut tekanan inflasi dapat kembali stabil.

Sejalan dengan perputaran fluktuasi sistem perekonomian Indonesia, konsep sistem perekonomian campuran telah diubah menjadi sistem perekonomian sosialis hal ini karena tekanan kaum komunis yang hidup di Indonesia terus tumbuh dan berkembang hingga membentuk suatu organisasi yang kuat dengan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengubah sistem kerja ekonomi Indonesia hingga memasuki sistem perekonomian Indonesia II.

Siklus Perekonomian Indonesia II (1967 - 1998), pergerakan sistem perekonomian sosialis Indonesia pada periode 1967 – 1998 diwarnai dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan fluktuasi dalam perekonomian Indonesia, Permasalahan yang terjadi tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan desain sistem perekonomian yang tepat,

karena kondisi ini akan menyentuh segala aspek keutuhan negara, meski konsep sistem perekonomian yang telah ada belum dapat dikatakan paripurna hingga saat ini, namun dari sekian banyak konsep sistem keuangan semua bertujuan untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara menyeluruh (Chaudry, 2012; Tho'in 2015).

Salah satu yang menjadi permasalahan pokok dan utama dalam periode ini adalah tekanan krisis yang terjadi dari waktu ke waktu, prosesnya dimulai dari beberapa atau salah satu variabel makroekonomi yang selanjutnya merambat pada variabel makro ekonomi lainnya khususnya pertumbuhan ekonomi. Gambaran tentang dinamika tekanan perekonomian yang terjadi pada periode ini (Gambar 3.1) menjadikan pilihan konsep sistem perekonomian di Indonesia harus benar dan tepat, karena tujuan dari sistem ini adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, hal ini menjadi tantangan terberat bagi negara dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Tekanan yang terjadi di beberapa tahun memiliki karakteristik tersendiri (Basmar, 2014).

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1980 mengalami tekanan karena adanya berbagai macam gejolak perekonomian, di antaranya peningkatan harga minyak dunia, peningkatan harga emas, peningkatan harga komoditas yang mendorong pergerakan tingkat inflasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kondisi ini menjelaskan bahwa dunia sedang mengalami perlambatan aktivitas perekonomian, khususnya yang terjadi di Amerika Serikat, mesko kondisi ini belum memasuki depresi ekonomi dunia namun bagi negara berkembang harus siap dalam menghadapi perubahan perekonomian tersebut.

Kondisi kecenderungan menurunnya harga minyak bumi dunia membuat Pemerintah Indonesia mengubah kebijakan perekonomian dari ketergantungan pada sektor migas menjadi sektor non migas, ketetapan ini menjadikan perubahan pada berbagai sektor khususnya sektor industri, pada bidang ini kebijakan yang diberikan berupa kelonggaran dalam proses ekspor impor, penurunan tarif bea masuk impor bahan baku dan barang modal, memangkas proses administrasi ekspor impor, memberikan fasilitas drawback system pada impor bahan baku dan barang modal untuk ekspor.

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, selain dari sektor industri sektor perbankan juga mengalami perubahan, semua kemudahan tersebut tertuang

dalam paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88), seperti kemudahan dalam membuka bank baru (modal 10 Milyar), memberikan kemudahan bank asing beroperasi di Indonesia, penghapusan batas kredit, memungkinkan investor asing memiliki saham domestik, kebijakan ini memberikan pandangan baru perbankan Indonesia karena telah membuka diri dengan perekonomian global (Basmar, 2018a).

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1985 menunjukkan tingkat fluktuasi yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan negara-negara yang tergolong sebagai negara maju, berkembang dan miskin, terlihat bahwa negara maju pendapatan perkapitanya sebesar USD 14.829 dan tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 2.9% pertahun, dan negara berkembang pendapatan perkapitanya sebesar USD 12.369 dan tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 1.8% per tahun, sedangkan untuk negara miskin pendapatan perkapitanya hanya mencapai USD 2.541, dengan tingkat pertumbuhan ekonominya cuma 1.0% pertahun. Perkembangan yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya dilakukan dengan berbagai strategi antara lain pertama membuat peraturan-peraturan agar kegiatan ekonomi tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat, kedua menjalankan kebijakan ekonomi dengan baik (kebijakan moneter dan kebijakan fiskal) dan ketiga memaksimalkan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh.

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1995 terjadi peningkatan kredit di sektor properti sebesar Rp. 41 Triliun, sementara konsep pertumbuhan perbankan mengalami kemudahan ditinjau dari jumlah modalnya yang ringan, bentuk patungan pun dapat dilakukan, serta dapat beroperasi di beberapa kota besar yang strategis di Indonesia, konsep Pakto 1988 ini tentunya menghapus sistem monopoli dana perusahaan BUMN di Indonesia, banyaknya industri perbankan membuat setiap bank bersaing dalam meningkatkan profit perusahaannya, tekanan tersebut membuat bank menjalankan operasinya tidak menggunakan standar kebijakan yang ditetapkan, akibatnya perlakuan kredit yang tidak hati-hati menjadikan bank rapuh dari segi Non Performing Loannya (Basmar at al, 2017).

Pengaruh lain kebijakan ini adalah para pemilik bank menjalankan aktivitasnya cenderung memberikan pinjaman pada anak perusahaan lainnya yang juga merupakan perusahaan miliknya, dapat dibayangkan bahwa kredit tersebut mengandung risiko yang sangat tinggi khususnya potensi kredit macet, selain hal tersebut pemilik perbankan banyak menginvestasikan

dananya pada sektor mewah seperti apartemen, perkantoran mewah, golf dan lain sebagainya, yang tingkat produktivitasnya sangat rendah (Siregar et al, 2021).

Selain hal tersebut, rupiah mengalami depresi yang cukup tinggi karena krisis Thailand yang kemudian berimbas pada sektor perbankan karena rapuhnya sistem keuangan yang dijalankan selama ini, selain itu investasi di Indonesia karena terjadi capital outflow yang semakin memberikan tekanan pada nilai tukar mencapai Rp. 16.000/USD, demikian pula sektor lainnya yang berimbas menjadi krisis politik, dan krisis kepercayaan kepada lembaga pemerintahan di Indonesia (Basmar et al, 2015).

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada tahun 1996 mendapat tekanan dari dunia perbankan yang mengalami permasalahan besar ditandai dengan meningkatnya jumlah kredit non lancar sebesar Rp 30.802 Miliar, efisiensi kinerja perbankan semakin memburuk dengan meningkatnya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional, sehingga perbankan pada masa ini berlabel "zona merah", kerentanan ini mengakibatkan gejolak nilai tukar meningkatkan, kewajiban dalam bentuk valuta asing yang berujung pada kekeringan likuiditas pada perbankan dan debitur yang juga kesulitan untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk mata uang asing, kondisi tersebut mengantarkan terjadinya krisis perbankan di Indonesia.

Konsep pengukuran krisis perbankan ditunjukkan melalui beberapa kondisi antara lain pertama rasio non performing asset terhadap total asset telah melampaui 10%, kedua biaya penyelamatan tidak melampaui 2% dari PDB, ketiga terjadinya nasionalisasi pada perbankan, keempat terjadi penarikan dana (bank rush) dan pembekuan dana nasabah (deposit freezes) (Demirguc et al, 1998)

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada Tahun 1997 diawali dengan terperosoknya perekonomian Asia Timur di mana pertumbuhannya berada dalam pertumbuhan negatif, di mana sebelumnya pertumbuhan perekonomian di Asia Timur merupakan pertumbuhan yang tercepat, penurunan pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di beberapa negara seperti Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Filipina dan Thailand. Kondisi tersebut membuat beberapa negara membutuhkan dana besar dan minta bantuan pada lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan ADB (Asian Development Bank, 1999).

Tekanan yang terjadi kemudian dirasakan Indonesia adalah proses penurunan aktivitas perekonomian (krisis moneter), hal ini karena kebijakan sistem pemerintahan kapitalis sebelumnya terkait kebijakan "Pakto 88" membuat gejala pertumbuhan ekonomi mengalami goncangan yang bermula pada bulan Agustus 1997, krisis keuangan Asia ini terjadi karena kurangnya keterbukaan dan kredibilitas pemerintah terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan distorsi dari kebijakan yang telah dijalankan, dibalik semua itu konsep ini menjadi jembatan bagi Indonesia menuju perekonomian kerakyatan, karena perubahan peta perekonomian yang kini mengusung konsep reformasi disegala bidang untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik lagi (Corsetti et al, 1999).

Rontoknya aktivitas sektor perbankan dikarenakan sistem yang terulang dari masa ke masa tanpa adanya pemeriksaan ketat dan menyeluruh mengakibatkan perbankan di Indonesia pada Tahun 1997 terlihat gemuk namun pada dasarnya memiliki pondasi yang rapuh. Kerapuhan tersebut dikarenakan adanya hutang yang semakin besar, mengakibatkan perekonomian Indonesia semakin tertekan, meski beberapa pedoman untuk keluar dari krisis telah diberikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), hanya mengakibatkan perekonomian rakyat semakin menurun, hal ini tentunya mengakibatkan Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan kapitalis (Supriyanto, 2009).

Pada tanggal 21 Juli 1997 Indonesia mengalami depresi nilai tukar, sehingga untuk meredam tekanan tersebut Bank Indonesia melakukan spread mata uang namun kondisi terus terus melemah sehingga Bank Indonesia mengambil kebijakan nilai tukar mengambang, sehingga kebijakan ini menjadikan nilai tukar mengikuti permintaan dan penawaran di pasar valuta asing dan kondisi ini semakin menguatkan perekonomian Indonesia, namun disisi lain terjadi kebangkrutan di sektor bisnis, tingkat pengangguran yang tinggi, penurunan pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat, dan meningkatnya kemiskinan.

Karakteristik sistem perekonomian Indonesia pada Tahun 1998 perekonomian Indonesia menjadi kondisi perekonomian terburuk dibandingkan dengan kondisi perekonomian 6 negara lainnya di asia yang juga mengalami krisis keuangan. Kondisi keuangan yang terjadi di Indonesia menyebabkan kontraksi keuangan sehingga krisis keuangan merambat menjadi krisis ekonomi, dikarenakan kondisi mata uang lemah, tingkat suku bunga yang kurang stabil, perusahaan dan perbankan mengalami permasalahan profitabilitas, terjadinya

liquidity crunch, kurangnya kepercayaan para investor dan konsumen, dan tingginya pengaruh pandemi covid, gambaran keadaan ini menyeret sektor sosial dan politik menjadi sebuah krisis baru bagi Indonesia (Basmar, 2018b).

Selama tahun 1998 kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang sangat berat, ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar -17.01%, laju inflasi sebesar 82,4%, di mana kondisi tersebut membebani kemampuan daya beli, meningkatkan kemiskinan dan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Bank Indonesia, 1998).

Faktor lainnya karena masih dirasakannya dampak pada kebijakan Pakto 1998 di mana menjamurnya perbankan di Indonesia, sementara tingkat pengawasannya belum berjalan dengan baik, maka terbentuklah sistem perbankan yang kurang sehat, ditandai dengan tingkat ekspansi kredit yang semakin tinggi, hal ini mengindikasikan awal terjadinya krisis keuangan dan ekonomi, kondisi ini diperkuat dengan adanya beberapa faktor antara lain pertama rasio aktiva produktif yang non-performing terhadap aset total mencapai 23.8 % pada bulan Mei 1998, kedua estimasi biaya penyelamatan bank diperkirakan mencapai kurang dari 51 % dari total PDB pada tahun 1999, ketiga beberapa bank dinasionalisasikan oleh pemerintah pada bulan Agustus 1998 dan keempat terjadinya rush dana masyarakat pada perbankan karena kebijakan penutupan 16 bank kurang sehat pada bulan November 1997 (Badan Pusat Statistik, 2009).

Tekanan yang terjadi sepanjang tahun 1967 hingga tahun 1998 sangat dirasakan bagi sektor perbankan, penguatan pada pertumbuhan ekonomi yang mencapai tingkat 7%, membuat kepercayaan negara asing terhadap indonesia semakin meningkat, yang tentunya akan menambah keyakinan pada investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak dari perkembangan tersebut meningkatkan utang jangka panjang dan jangka pendek sebesar 157% dari PDB pada tahun 1998, masalah kemudian muncul karena penggunaan dana tidak diperuntukkan pada sektor yang produktif melainkan pada sektor konsumsi, dan real estate yang kurang produktif, sementara masalah yang dihadapi dunia ekspor adalah meningkatnya nilai tukar telah memberikan dampak negatif pada proses ekspor terhadap negara-negara lainnya.

Beberapa kondisi karakteristik yang berpengaruh positif pada perkembangan perekonomian di periode ini yaitu peningkatan pada investasi asing, investasi portofolio dan utang swasta jangka pendek, sementara pengaruh negatifnya adalah terjadi capital outflow dan terdepresiasi mata uang rupiah, tingkat

kepercayaan masyarakat berkurang, banyak bank mengalami kebangkrutan, memanasnya situasi politik mengakibatkan peningkatan harga kebutuhan, tingkat ekspor menurun, pendapatan perusahaan menurun, kontraksi perekonomian terjadi hingga 13.1%.

Tekanan negatif lainnya karena adanya utang swasta di luar negeri yang besar dan berjangka pendek, kebijakan sektor perbankan yang terlalu lemah mengakibatkan pertumbuhan investasi asing yang tinggi, serta politik yang semakin tidak terarah dan memanas, adapun pengaruh positif terjadi karena meningkatnya investasi asing, perbankan berkembang dengan pesat, kinerja pasar modal meningkat karena arus modal asing bertambah, kebijakan sektor non migas, kepercayaan terhadap ekonomi di Indonesia semakin meningkat sehingga memberikan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman bagi perusahaan swasta serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus meningkat dengan pesat.

Dari kedua sisi perekonomian, baik yang berpengaruh positif dan negatif, khususnya terhadap tekanan berat pada pemerintah Indonesia pada kondisi ini telah direspon dengan berbagai kebijakan antara lain memberikan bantuan sebesar Rp.147,7 Triliun kepada 48 bank yang mengalami permasalahan likuiditas, mendapat bantuan IMF sebesar SDR 7.3 Miliar, perbankan mengikuti Program Pemulihan Permodalan Bank, pemerintah memberikan Blanket Guarantee kepada perbankan yang mengalami permasalahan likuiditas di Indonesia. Melalui konsep kebijakan Bank Sentral ini menjadikan perbankan di Indonesia sedikit dapat menarik nafas, sehingga memberikan efek pada beberapa indikator makroekonomi seperti nilai tukar kembali membaik, aktivitas ekonomi mulai lancar, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 13.1% menjadi 15%.

Secara keseluruhan fluktuasi sistem perekonomian terjadi karena adanya pergerakan variabel makroekonomi yang menyebabkan tekanan pada nilai tukar mata uang, berdampak pada tingkat suku bunga dan inflasi, membuat perbankan mengalami kesulitan dalam likuiditas, sehingga rantai ekonomi ini akan berakhir pada krisis, disamping itu tekanan pada sistem perekonomian sosial ini memberikan pengaruh terhadap terjadinya krisis keuangan dan ekonomi di Indonesia, krisis yang terjadi tersebut sebagian besar dikarenakan oleh pertama tingginya hutang swasta yang tidak di hedge, kedua adanya free capital mobility untuk periode jangka pendek, ketiga lemahnya sektor keuangan, dan keempat kurangnya kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan di Indonesia.

Siklus Perekonomian Indonesia III (1998 - 2020), pergerakan sistem perekonomian kerakyatan Indonesia pada periode 1998-2020 diwarnai oleh dua permasalahan besar yang semuanya terjadi karena sifat keglobalan perekonomian Indonesia yaitu krisis ekonomi global dan krisis pandemi Covid 19, perjalanan siklus periode ini diawali dengan sisa tekanan yang di periode sebelumnya yang belum tuntas.

Setelah masa orde baru hingga sistem perekonomian reformasi konsep sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan dari sistem sosialis menjadi sistem kerakyatan, konsep ini sejalan dengan falsafah dan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Konsep sistem perekonomian dengan karakter kekeluargaan ditunjukkan melalui asas kebersamaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila dan pemihakan pada ekonomi rakyat, dengan syarat berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya, adapun yang mendasari konsep kerakyatan ini yaitu pemberantasan ketidakadilan dan kebijakan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan peningkatan mutu pendidikan

Tujuan sistem ekonomi kerakyatan ini berupaya untuk membangun Indonesia secara mandiri, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan efisiensi perekonomian, peningkatan disiplin pengeluaran anggaran, penghapusan monopoli, peningkatan alokasi sumber penerimaan negara, dan pembaharuan undang-undang koperasi. Sistem perekonomian kerakyatan bagi Indonesia masih mengalami conjuncture yang berfluktuasi, di mana pertumbuhan ekonomi dengan sistem tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan dibawah trend garis pertumbuhan (Gambar 3.1), hal ini wajar karena hampir seluruh negara merasakan tekanan perekonomian yang terjadi di dunia.

Tekanan keuangan global dari Amerika Serikat yang terjadi akibat adanya defisit anggaran yang berpengaruh pada industri properti (subprime mortgage) akibat timbulnya permasalahan pada kredit perumahan (kesalahan dalam peruntukan kredit yang disalurkan) telah mengakibatkan kehancuran pada sektor keuangan seperti jatuhnya lembaga keuangan internasional (Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac). Runtuhnya bank maupun institusi keuangan mengakibatkan inflasi, indek bursa saham dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan peningkatan pengangguran di Amerika Serikat (Departemen Komunikasi dan Informatika, 2008).

Tekanan keuangan global dari Eropa (Krisis Euro) turut memberi warna pada krisis global, prinsip sistem perekonomian neoliberal yang dijalankan di Eropa menjadikan pasar keuangan tidak berjalan berdasarkan ketetapan yang ada, ditambah lagi dengan ketidakseimbangan keuangan global menyebabkan pengurangan di Eropa semakin meningkat (Roubini, 2016)

Secara keseluruhan proses terjadinya kehancuran ekonomi global dimulai ketika banyaknya lembaga keuangan yang mengalami permasalahan keuangan seperti New Century Financial yang bangkrut di bulan April 2007, kemudian Sachsen Landesbank di Jerman ikut bangkrut pada tanggal 3 September 2007 dan kehilangan investasi sebesar USD 1 Miliar, di Inggris Northern Rock dinasionalisasikan pada tanggal 17 Februari 2008, selanjutnya Bear Stearns dibeli oleh JP Morgan Chase dengan jaminan sebesar USD 30 Miliar pada tanggal 17 Maret 2008, pemerintah Amerika Serikat mengambil alih Fannie Mae dan Freddie Mac pada tanggal 5 September 2008, Lehman Brothers bangkrut pada tanggal 15 September 2008, kemudian Bank Sentral memberikan dana pada AIG sebesar USD 85 Miliar pada tanggal 16 September 2008, dan selanjutnya bursa saham mengalami tekanan berat dimulai pada tanggal 10 Oktober 2008. (International Monetary Fund, 1998).

Imbas tekanan ini bagi Indonesia terjadi karena adanya dampak sistemik yang ditimbulkan pada berbagai sektor ekonomi antara lain merosotnya indeks harga saham di BEI, nilai tukar terdepresiasi dan likuiditas perbankan yang tinggi, selain itu tekanan yang terjadi tidak hanya di sektor keuangan melainkan terjadi pula pada sektor riil, dan sektor sosial seperti tingkat pengangguran yang tinggi (57.000 orang) serta sejalan dengan peningkatan kemiskinan di Indonesia

Siklus perekonomian Indonesia pada masa ini banyak dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian global, seperti terjadinya krisis subprime mortgage tahun 2008 di Amerika Serikat dengan kontraksi pertumbuhan ekonominya sebesar 0.34%, sehingga pertumbuhan ekonominya sebesar minus 3.07% Gejala tersebut terasa hingga di Eropa melalui kekhawatiran adanya ketidakmampuan pembayaran utang kepada investor yang berdampak pada kinerja perbankan dalam mendapatkan profit kreditnya.

Kedua gejala perekonomian di Amerika dan Eropa tersebut memengaruhi perekonomian dunia yang ikut melambat dari 5.42% menjadi 2,8% dengan tekanan kontraksi sebesar 0.57%, sehingga dampak perekonomian Amerika

dan Eropa ini berimbas pada perekonomian Emerging Market termasuk Indonesia.

Bukti pelemahan perekonomian Indonesia ditunjukkan melalui kontraksi ekspor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebesar 4.6%. Pertumbuhan Indonesia masih tergolong baik dibandingkan dengan negara lain karena Indonesia tingkat konsumsi mencapai sekitar 57%, konsumsi pemerintah mencapai 8%, investasi 24% dan net ekspor sekitar 10%.

Disisi lain krisis global ini memberikan pengaruh positif melalui peningkatan arus modal asing dan investasi jangka pendek ke Indonesia sehingga aktivitas pasar saham dan modal cenderung lebih aktif, adapun pengaruh lainnya adalah meningkatkan cadangan devisa negara. Meski demikian negara yang mengalami perlambatan membuat kegiatan ekspor Indonesia menurun terutama ekspor di negara Asia yang mengalami kontraksi pada perekonomiannya, kondisi ini tidak seburuk dengan kondisi krisis yang terjadi di tahun 1997 sehingga banyak negara di Asia termasuk Indonesia dapat mengantisipasi tekanan krisis yang lebih dalam karena telah mempelajari dampak yang ditimbulkannya dari krisis sebelumnya

Pandemik Covid 19 yang menjadi masalah global telah mengubah wajah dunia dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi, kondisi ini terjadi di setiap negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang sejahtera, dampak yang ditimbulkannya adalah peningkatan kematian yang signifikan di seluruh dunia mencapai 200 Ribu jiwa dengan 4 Juta Kasus, sehingga polemik ini memberikan batasan aktivitas di segala bidang agar pandemik ini tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi (Marzuki et al, 2021).

Pertumbuhan ekonomi global menjadikan International Monetary Fund dan World Bank bekerja keras dalam menjaga kestabilan pertumbuhan dan ekonomi dunia (3%), selanjutnya interaksi perdagangan dan investasi global juga menurun hingga 30% dan kemudian memengaruhi volatilitas keuangan dunia mencapai 215%, depresi keuangan dunia merubah aset ke sektor yang lebih menjanjikan, dan melemahnya keyakinan para pelaku ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak seakan tidak tentu arah, namun gejala resesi melalui pertumbuhan ekonomi yang negatif di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi oleh International Monetary Fund selama pandemi Covid 19 ini hanya tumbuh 0.5%, sementara World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran -3.5% hingga

2,1%, tekanan semakin berat karena disertai dengan besaran capital outflow dari Indonesia dan Investasi yang turun sebesar 8.1 Milyar, hal ini karena investor menanamkan dananya pada bentuk investasi yang lebih aman, hal ini juga terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura.

Perjalanan krisis global yang dirasakan Indonesia membuat pemerintah Indonesia melakukan 3 jenis kebijakan yang membantu pemulihan perekonomian yaitu pertama stimulus fiskal berupa penurunan tarif pajak pendapatan, subsidi pajak, pemberian subsidi pangan dan non pangan, pemberian bantuan modal UKM, dan penambahan belanja infrastruktur, kedua kebijakan perbankan seperti pengambilalihan perbankan (Bank Century) dan bailing out distress bank, penjaminan simpanan masyarakat, dan penghentian lelang SBI 3 bulan untuk meminimalkan capital reversal, dan ketiga bantuan sosial seperti program raskin, pemberdayaan masyarakat, dan Bantuan Langsung Tunai.

Perjalan sistem perekonomian banyak mengalami perubahan sepanjang kemerdekaan hingga saat ini, disamping itu pula pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat juga mengalami fluktuasi sejalan dengan perubahan indikator ekonomi Indonesia, konsep sistem perekonomian kapitalis yang dirasakan semenjak kemerdekaan tidak memberikan perubahan ekonomi masyarakat, sementara konsep sistem perekonomian sosialis menimbulkan banyak tekanan ekonomi secara makro yang berujung pada krisis keuangan dan krisis ekonomi, dan konsep perekonomian kerakyatan masih menyisakan kisah pilu akibat krisis global disertai dengan pelemahan perekonomian karena adanya wabah Covid 19 yang juga menjadi permasalahan dunia, sehingga secara keseluruhan sistem perekonomian Indonesia dikatakan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Bab 4

Struktur dan Prospek Ekonomi Indonesia

4.1 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian adalah susunan elemen-elemen yang ada dalam suatu negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga suatu negara yang mana di dalamnya terdiri dari: sistem perekonomian, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, pasar input dan pasar output. Semua komponen-komponen tersebut mempunyai kegiatan ekonomi yang berbeda. Struktur ekonomi merupakan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian, sektor yang dominan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dalam suatu perekonomian.

Elemen- elemen dari suatu perekonomian terdiri dari pasar input (faktor produksi), pasar output (barang dan jasa), rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sistem ekonomi. Elemen-elemen tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang saling memengaruhi layaknya struktur organisasi. Struktur perekonomian juga memperlihatkan satuan-satuan perekonomian, hubungan-hubungan dan saluran-saluran wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian.

Kegiatan dari struktur ekonomi berdampak pada peningkatan sektor-sektor perekonomian lainnya yang saling berkaitan. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila ditunjang dari segi pengetahuan masyarakat yang tinggi, adanya sumber daya alam yang cukup memadai yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai potensi besar guna tercapainya kemajuan pembangunan daerah. Perkembangan ekonomi yang telah dicapai Negara-negara didunia tidak dapat ditiru begitu saja oleh Negara-negara sedang berkembang.

Meskipun demikian, bentuk perkembangan ekonomi sebagian besar tergantung pada pemecahan beberapa masalah pokok. Masalah-masalah pokok ini antara lain adalah, akumulasi kapital dan penggunaan maksimal dari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menaikkan serta memperbaiki produksi barang dan jasa.(Sjafrizal, 2008)

Ada dua macam struktur ekonomi

1. Struktur Agraris

Struktur agraris adalah struktur didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadikan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduknya. Pada umumnya Negara-negara yang berkembang disebut dengan Negara agraris dan Negara-negara yang belum berkembang di mana pertaniannya masih sangat tradisional dan alat-alat untuk bertani pun masih sangat tradisional. Maka Negara yang belum berkembang tersebut dikategorikan dengan Negara agraris tradisional. Negara yang belum berkembang biasanya mengalami laju pertumbuhan yang sangat lambat. Bisa dalam 3 tahun mengalami penurunan yang sangat banyak.

2. Struktur industry

Struktur industri adalah struktur di dominasikan oleh struktur industry. Sebagian besarnya produk domestic ini di sumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggal di sumbangkan oleh struktur industri. Negara-negara yang termasuk dengan sektor industri adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Jepang dan Kanada yang juga termasuk dengan industri maju, Negara-negara yang ada di eropa dan Negara-negara lainnya juga termasuk dengan Negara industri (Jhingan, 2010; Rawan, 2014).

Perubahan struktur ekonomi ditandai dengan adanya:

1. Menurunkannya pangsa pasar sektor primer (pertanian)
2. Meningkatnya pangsa pasar sektor sekunder (industry)
3. Pangsa sektor jasa juga memberikan kontribusi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ini juga disebabkan beberapa faktor. Hal yang paling membuat perubahan pada struktur ini adalah pada manusianya sendiri dalam melakukan kegiatan konsumsinya. Apabila pendapatan naik, elastis permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan dan rendahnya konsumsi atas bahan-bahan makanan. Sedangkan permintaan untuk barang bahan-bahan pakaian dan barang-barang konsumsi hasil industri sebaliknya. Perubahan struktur ini sangat berpengaruh pada perubahan komposisi tenaga kerja yang dari awal tenaga kerja bermata pencaharian utamanya pada sektor pertanian bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa (non pertanian) (Murni. Asfia, 2016).

Menurut teori chenery, analisis teori pattern of development memfokuskan terhadap perubahan struktural dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian Negara yang berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke tradisional sektor industri.

Perubahan struktural dapat dilihat dari:

1. Dilihat dari Permintaan Domestik

Apabila dilihat dari permintaan domestic akan terjadi penurunan permintaan terhadap konsumsi bahan makanan karena dikompensasikan oleh permintaan terhadap barang-barang non kebutuhan pangan, peningkatan investasi, dan peningkatan anggaran belanja daerah yang mengalami peningkatan dalam struktur GNP yang ada.

2. Dilihat dari Tenaga Kerja

Apabila dilihat dari segi tenaga kerja maka akan terjadi proses perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian desa menuju sektor industri perkotaan. Meski pergeseran yang dilakukan oleh tenaga

kerja masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri.

Struktur ekonomi dapat dilihat dari empat macam sudut pandang, yaitu:

1. Tinjauan makro-sektoral
Sektoral dan tinjauan keruangan merupakan tinjauan ekonomi murni. Sedangkan Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan dan Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan merupakan tinjauan politik.
2. Tinjauan keruangan
Sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur agraris, industrial, atau niaga. Berdasarkan tinjauan keruangan perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan / modern.
3. Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan
Perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa / kalangan mana yang menjadi peran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.
4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan
Dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistik dan desentralistik.

4.2 Prospek Ekonomi

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk (Wardhan, 2020).

Perekonomian di Indonesia tidak pernah lepas dari pembangunan. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah

dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, era lima puluhan, diawali masa liberal telah memberikan kesempatan yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan pengusaha Indonesia. Sehingga kebijakan ini semakin memacu munculnya rintisan-rintisan baru dalam bidang usaha. Bisa diterka, di mana-mana lahir beribu-ribu pengusaha tanpa latar belakang pengalaman dan pendidikan yang memadai. Banyak pengusaha yang timbul dan tenggelam. Banyak kelompok masyarakat yang kaya mendadak dan bangkrut seketika. Sehingga karena kondisi usaha yang kurang tertata ini banyak menghasilkan kegagalan.

Bahan Struktur Ekonomi Perubahan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Teori Pertumbuhan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku, namun agar dapat melihat pertambahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*,

Teori Pertumbuhan ekonomi daerah

Menurut Adam Smith terdapat dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total terdapat tiga unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ialah sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani dan stok barang modal yang ada. Menurut Adam Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jika suatu saat nanti semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh maka pertumbuhan output pun akan berhenti.

Sedangkan sumber daya insani memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output dan stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Selain itu, Adam Smith dalam pemikirannya membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Tujuan pembangunan ekonomi

1. Mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru.
2. Mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan memengaruhi kesempatan kerja masyarakat

Macam-macam Strategi Pembangunan Indonesia

Salah satu konsep penting yang perlu diperhatikan dalam mempelajari perekonomian suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah:

1. Strategi Pertumbuhan

Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah:

- a. Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menggunakannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
- b. Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah (trickle-down-effect) pendistribusian kembali.
- c. Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
- d. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.

3. Strategi ketergantungan

Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari strategi ketergantungan adalah:

- a. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lain.
- b. Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan Teori ketergantungan terse memang cukup relevan namun sayangnya sudah menjadi semacam dalih terhadap

kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development).

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. kurangnya mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan/pengaruh menyeter dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effect). Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang.

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran dari strategi ini dalam menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya di kembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya (Sjafrizal, 2008; Jhingan, 2010; Murni. Asfia, 2016; Wardhan, 2020).

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari pembangunan nasional dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat, dilihat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan pendapatan nasional perkapita. Meningkatkan pendapatan nasional terjadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif diukur dengan PDB (produk domestik bruto) Pertumbuhan.

PDB menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dicapai dalam pembangunan ekonomi, oleh karena itu tidak mengherankan jika di banyak negara pada awal pembangunan ekonomi lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, Dengan adanya Pembangunan ekonomi maka dapat mendorong terjadi nya

pertumbuhan ekonomi begitu juga sebaliknya, Dengan adanya Pertumbuhan ekonomi maka dapat memperlancar pembangunan ekonomi.(Candra Taufik. Amirudin, 2015)

Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan Gross Domestik Produk (GDP) dan Gross National Produk (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan terjadi perubahan struktur ekonomi atau system kelembagaan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang, perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi, pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. . Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama melainkan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.(Kuncoro. Mudrajad, 2010, 2014)

Faktor – faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi:

Tenaga kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang bekerja, mencari pekerjaan, dan sedang melakukan kegiatan lain, seperti sekolah maupun mengurus rumah tangga dan penerima pendapatan. Menurut BPS penduduk berumur 15 keatas terbagi sebagai tenaga kerja dikatakan tenaga kerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh

atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu.

Pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai faktor positif yang akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Namun pertumbuhan tenaga kerja juga dapat memberikan dampak yang negatif. Hal ini akan terjadi bila sistem perekonomian daerah tersebut tidak mampu menyerap secara produktif peningkatan tenaga kerja.

Angka ketergantungan

Kelompok penduduk umur 65 tahun ke atas termasuk dalam kelompok penduduk yang tidak lagi produktif dengan kelompok penduduk umur 15-64 tahun termasuk dalam kelompok produktif. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia.

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase. Di negara-negara maju pertumbuhan penduduk dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tenaga kerja akan meningkat dan pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat pula (Rawan, 2014; Soleh, 2017).

Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, teknologi, dan sebagainya. Sedangkan di negara-negara berkembang peningkatan jumlah penduduk merupakan bencana, karena tidak dibarengi dengan kualitas SDM yang dihasilkan sehingga dependency ratio yang harus ditanggung penduduk produktif semakin meningkat. tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. 6 Ketiganya adalah:

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi

Mengandalkan pertumbuhan ekonomi dengan harapan bahwa pendapatan nasional tersebut akan menetes ke bawah, perlu usaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan ini. Dengan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan masalah distribusi pendapatan ini semakin terasa karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat selama orde baru yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan (Tarigan, 2014).

Bab 5

Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional

5.1 Perkembangan Teori Pembangunan Ekonomi

Sebuah teori yang muncul dari pemikiran seseorang selalu akan menjadi sesuatu yang ditunggu dan perkembangannya seiring waktu juga akan terus membuat kita menganalisis dan mulai bermunculan permasalahan baru atas teori yang terus mengalami perubahan karena begitu banyak menyentuh berbagai aspek kehidupan. Teori pembangunan merupakan salah satu dari teori besar yang juga lebih dikenal dengan istilah ideologi developmentalisme. Di mana teori ini berporos pada aspek pembangunan, dan lebih khusus bagi pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Dasar dari teori pembangunan adalah bagaimana kita berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah motor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan kemajuan politik.

Perwujudan kesejahteraan sosial akan muncul dalam sistem kapitalisme. Sedangkan kemajuan politik akan terwujud dengan sistem demokrasi yang baik. Tujuan Pembangunan melalui kapitalisme akan membawa masyarakat

dari tradisional, terbelakang, dan tribal menuju masyarakat yang modern, maju, dan berkembang. Sehingga ada transformasi menjadi masyarakat yang modern, di mana aspek politik akan mengarah ke demokrasi. Dua konsep yang dimaksudkan di sini adalah kapitalisme dan demokrasi sebagai poros utama dari teori pembangunan.

J. B. Bury (1920) dan Robert Nisbet (1980) adalah dua filsuf yang menelusuri ide tentang kemajuan sejak era Yunani kuno sampai hari ini. Jika kita menganggap pembangunan memiliki arti kemajuan maka perlu untuk menemukan cara mengukur kemajuan itu dengan tujuan adanya perubahan dalam masyarakat oleh teori Pembangunan ke arah yang ternyata tidak selalu mengarah kepada kemajuan. Dalam teorinya Bury mengemukakan bahwa masyarakat yang meninggalkan gaya hidup barbar, berarti mereka sedang menuju kemajuan. Sedangkan Nisbet yang kemudian mengemukakan teorinya 60 tahun kemudian berpendapat bahwa ide tentang kemajuan merupakan suatu proses linier yang diawali dari kondisi primitif menuju pada tahap yang lebih baru. Proses tersebut haruslah konsisten linier ke arah masa depan.

Memang secara umum kita melihat begitu banyak model atau cara orang mengungkapkan bagaimana pembangunan itu terjadi. Ada pula yang mengaitkan pembangunan sebagai sebuah konsep teori ekonomi dengan teori politik. Kondisi ini dimulai pada tahun 1950 di mana konsep yang dikemukakan masih diterapkan pada institusi formal dalam suatu negara. Dengan demikian dalam aplikasinya terdapat konstitusi dan hukum yang jelas karena ada keterkaitan yang erat tujuan utamanya dalam menstabilkan politik dalam negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk negara-negara yang mengedepankan konsep ini adalah negara-negara di Eropa Barat Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun sistem politik yang dikembangkan tidak semuanya sama pasca perang dunia kedua. Hal ini akhirnya dilakukan oleh negara-negara yang secara ekonomi relatif lebih mapan.

Teori pembangunan kemudian pada perkembangannya dijadikan dasar bagi negara-negara yang telah maju dalam menjalin hubungan kerjasama dibidang politik dan ekonomi dengan negara berkembang. Namun beberapa bentuk yang ditampilkan dari hubungan ini terkadang tidak memunculkan harapan bahwa akan mengangkat kondisi ekonomi secara lebih baik dan lebih mengarah ke kondisi yang stabil secara ekonomi maupun demokrasi. Kondisi yang terjadi terkadang memberikan gambaran bahwa hubungan yang terjadi justru menimbulkan ketergantungan akan banyak hal yang dibangun bersama

negara-negara yang telah maju tersebut. Yang dikhawatirkan bahwa sesungguhnya hal ini merupakan bentuk dari kolonialisme dan imperialisme.

Muncul beberapa teori yang dikemukakan oleh ekonom yang terus berkembang seiring waktu dan menjadi landasan atau pijakan dalam memberi pandangan secara umum bagi teori pembangunan ekonomi maupun yang lebih khusus bagi kita tentang teori pembangunan ekonomi nasional.

Adam Smith

Sebagai ekonom berkebangsaan Skotlandia yang banyak memberi kontribusi pemikiran dalam ekonomi dunia yang hidup di tahun 1723 sampai tahun 1790 telah memberikan banyak sekali fondasi bagi pembangunan ekonomi sampai dengan hari ini. Dalam bukunya yang begitu dikenal *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nation* di tahun 1776 yang merupakan buku teori ekonomi modern pertama yang banyak mendapat sambutan di Inggris Raya pada masa itu. Dalam buku inilah kita mengenal teori *Invisible Hand* (Tangan Tak Tampak) yang memberikan banyak pelajaran penting dalam ekonomi pasar. Adam Smith memberikan gambaran penting bagaimana kita melihat pembangunan ekonomi sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar.

W. W. Rostow

Mendengar nama Rostow tentu teori yang dibangunnya sedemikian fenomenal sehingga banyak diadopsi dalam menentukan atau mengklasifikasikan berada di kondisi manakah negara kita dan apa saja yang perlu dilakukan dalam menapaki level yang ada untuk terus maju. Sebagai ekonom yang memiliki reputasi penting dalam pemerintahan Amerika Serikat dan posisi penting dalam beberapa Universitas ternama Amerika hingga saat ini. Rostow memiliki pengaruh yang sangat besar dalam bidang akademik di mana hampir semua buku ekonomi pembangunan yang ada merujuk pada teori yang dibangunnya. Rostow juga merupakan aktor intelektual yang mendesain lembaga bantuan Internasional Amerika yang kini dikenal dengan nama USAID (U.S. Agency for International Development).

Pada bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* di tahun 1960 Rostow memaparkan pembangunan negara dari tradisional menuju modern melalui lima tahap.

Tabel 5.1: Lima Tahap Pembangunan Menurut W. W. Rostow (Raharja dan Manurung, 2004)

No	Tahapan	Kondisi
1.	Perekonomian tradisional	- Karakteristik utama masyarakat tradisional adalah ekonomi subsisten, - ikatan kekeluargaan masih kuat dan teknologi yang berkembang belum menyentuh mesin.
2.	Pra Lepas Landas	- Masyarakatnya siap untuk lepas landas. - Berkembangnya sistem agrikultur dan penggunaan teknologi mesin untuk bekerja. - Sistem perbankan dan investasi. - Nilai-nilai tradisional masih Ada hanya mulai terlihat perubahan yang mengarah pada nilai-nilai modern.
3.	Lepas Landas	- Masyarakatnya lepas landas. - Nilai-nilai tradisional tenggelam oleh modernisasi. - Adanya Urbanisasi di kota-kota besar - Sektor pertanian mengalami komersialisasi, dan industrialisasi berkembang dengan pesat. - Grafik pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4.	Kedewasaan	- Masyarakatnya menuju kedewasaan. - Pertumbuhan ekonomi yang secara umum konsisten meskipun ada fluktuasi. - Pertumbuhan ekonomi telah memasuki pasar internasional, terlihat dari nilai investasi yang dapat bersaing secara global. - Aplikasi teknologi meningkat dan terus mengalami kemajuan seiring teknologi baru ditemukan. - Produksi ekonomi tidak terbatas pada produk industri sebagaimana pada tahap lepas landas.
5.	Konsumsi Massa Tingkat Tinggi	- Masyarakatnya menuju masyarakat konsumsi (the age of high mass consumption). - Berada pada peralihan dari produksi barang ke produksi jasa.

		• Masyarakat telah mencukupi kebutuhan dasarnya dan menghabiskan konsumsi untuk jaminan dan kesejahteraan sosial. • Komposisi pekerjaan didominasi oleh pekerja perkotaan, sektor jasa menjadi sektor dengan keterampilan tinggi, dan pendapatan per kapita tiap orang diatas rata-rata.
--	--	--

Seymour Martin Lipset

Lipset berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor sosial dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai negara yang demokratis. Beberapa faktor tersebut antara lain: industrialisasi, urbanisasi, pendidikan tinggi, dan angka kekayaan yang tinggi. Untuk mencapai tahap kedewasaan demokrasi, Lipset kemudian menambahkan pertumbuhan ekonomi dan legitimasi sebagai dua faktor utamanya. Kemudian dalam teorinya diperlihatkan bagaimana sekelompok mayoritas orang elit yang mengendalikan mayoritas masyarakat yang miskin. Disini dapat terurai secara jelas bagaimana pembangunan ekonomi itu mampu memberikan sebuah perubahan terhadap struktur sosial. Sehingga dengan teori diamond yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi akan mengurangi potensi konflik sosial dan memfasilitasi transisi menuju sistem politik demokrasi.

Arthur Lewis

Arthur Lewis mengemukakan tentang teori perubahan struktural yang mana pada saat pembangunan terjadi akan diikuti dengan terjadinya arus urbanisasi antara daerah kota dan desa. Teori ini juga membahas tentang sistem investasi dan sistem penetapan tanah yang berlaku di sektor modern, kedua hal ini pada akhirnya akan ikut memengaruhi besarnya arus urbanisasi. Di awal teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian di suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perekonomian Tradisional
2. Perekonomian Industri

Adapun teori Lewis tentang penawaran tenaga kerja yang tak terbatas banyak mendapatkan kritik karena sejumlah asumsi-asumsi yang mendasari teorinya banyak yang tidak relevan bagi negara sedang berkembang.

Pertama, Lewis mengasumsikan bahwa tingkat perpindahan dan pembukaan lapangan kerja di sektor modern adalah proporsional di mana terdapat tingkat akumulasi modal di sektor modern. Kedua, asumsi bahwa di pedesaan mengalami surplus tenaga kerja sedangkan di perkotaan mengalami kekurangan tenaga kerja tampaknya merupakan hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang kita temui di negara sedang berkembang. Ketiga, asumsi dasar lain dari teori Lewis yang tidak realistis adalah bahwa di sektor modern, jaminan tingkat upah berada di tingkat yang tetap pada pasar tenaga kerja sampai penawaran tenaga kerja mengalami penurunan tidaklah terbukti.

Teori Pola Pembangunan Chenery

Dalam teorinya Chenery mengelompokkan negara sesuai dengan proses perubahan struktural yang dialami berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduknya.

1. Untuk negara dengan tingkat pendapatan per kapita kurang dari \$600 dikelompokkan ke dalam negara yang baru melakukan pembangunan atau sering disebut negara sedang berkembang.
2. Negara dengan nilai pendapatan per kapita antara \$600 hingga \$3000 digolongkan sebagai negara dalam fase transisi pembangunan.

Pengelompokan ini didasarkan pada harga-harga yang terjadi pada tahun 1976, Perubahan waktu tentunya juga akan berdampak pada perubahan interval dan nilai batas dari pendapatan per kapita yang menjadi standar pengelompokan tersebut. Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para ekonom terdapat berbagai kritik yang didasarkan pada relevansi penggunaan teori tersebut pada negara di dunia ketiga. Teori ini sulit diadaptasikan dengan negara-negara Non-Western karena banyaknya hal yang membuktikan bahwa teori pembangunan gagal diterapkan di negara berkembang. Di antaranya dengan adanya pertumbuhan ekonomi maupun mobilitas sosial akan menciptakan hal-hal yang sifatnya instabilitas.

Hal lainnya juga ada pergeseran nilai sekalipun untuk beberapa hal tertentu di negara berkembang justru aspek ini tidak begitu saja hilang bahkan selalu mampu bertahan bahkan dalam tekanan perubahan. Tidak semua tahapan dalam teori yang dikemukakan oleh Rostow mampu diaplikasikan di negara berkembang. Banyak pula kebijakan yang dianggap membantu justru menjadikan masalah di negara berkembang malah bertambah. Misalkan

bantuan suntikan dana yang malahan berakhir dengan menimbulkan berbagai konflik yang multidimensional.

5.2 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional

Fenomena pembangunan ekonomi, telah sejak awalnya menjadi perhatian para ahli ekonomi. Misalnya, rancangan kebijakan protektif yang diusulkan oleh para penganut merkantilisme pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kejayaan ekonomi bangsa atau negara. Sampai saat ini, fenomena pembangunan masih tetap menjadi tema bahasa utama dalam ilmu ekonomi. Yang berbeda dari waktu ke waktu adalah tekanan pembahasan dan peralatan analisis yang dipakai. Dalam era modern saat ini, pembahasan fenomena pembangunan ekonomi makin banyak didukung oleh studi-studi empiris. Dalam memahami teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional perlu diberikan suatu kesamaan persepsi dalam mengartikan pembangunan baik itu teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan melihat keterkaitannya dengan Teori Pembangunan Ekonomi Nasional.

Saat ini banyak teori yang menjelaskan dengan sudut pandang masing-masing ahli yang nyatanya memberikan banyak definisi tentang pembangunan. Secara umum apabila masyarakat luas ditanya tentang apa arti pembangunan menurut mereka, maka yang akan sering muncul adalah definisi yang mengaitkan pembangunan itu dengan hal-hal yang dapat dikatakan hanya mendeskripsikan apa yang dilihat oleh mereka secara fisik. Namun jika ditelaah oleh para ahli hal ini tidak sepenuhnya salah karena ada perubahan secara fisik yang membuat masyarakat memberikan pernyataan atas apa yang dilihat.

Tentunya dalam melihat definisi Pembangunan adalah tidak saja menyangkut satu aspek seperti misalnya PNB sebagai salah satu indikator yang selama ini melihat pengukuran pembangunan namun juga melihat dari perspektif bagaimana terciptanya suatu kesejahteraan sebagai salah satu indikator juga yang digunakan untuk melihat aspek yang ada dalam pembangunan selain tentunya menurunnya angka pengangguran sebagai salah satu indikator yang juga perlu diketahui. Karena banyak hal yang timbul kembali bila hanya digunakan ukuran-ukuran di atas. Karena walaupun secara fisik kuantitas

bertambah namun secara kualitas hidup belum tentu menunjukkan kondisi sesungguhnya. Hal ini diakibatkan banyak hal dan satu di antaranya adalah kesenjangan atau Gap. Untuk lebih memberikan Gambaran yang jelas kepada kita tentang Teori Pembangunan Ekonomi Nasional ada berbagai definisi dari Pembangunan ekonomi itu sendiri menurut para ahli sebagai berikut:

1. Ginanjar Kartasasmita “1994”

Sebagai salah seorang mantan menteri Ekonomi di era orde Baru lebih khusus di kala krisis ekonomi melanda di tahun 1998 Memberikan pengertian tentang pembangunan secara lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

2. Prof. Emil Salim

Sebagai seorang ekonom dan politisi yang juga mantan menteri memiliki catatan tersendiri tentang pembangunan yaitu Pembangunan berkesinambungan (sustainable development) adalah “suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

3. Mohammad Ali

Menurut Mohammad Ali, pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.

4. Sadono Sukirno

Dalam buku ekonomi yang dihasilkan oleh Dosen senior Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengemukakan bahwa ekonomi pembangunan merupakan proses usaha dalam meningkatkan pemasukan atau pendapatan perkapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk riil.

5. Bintoro Tjokroamidjojo

Pembangunan ekonomi menurut Bintoro merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena di dalamnya meliputi berbagai

dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.

6. Deddy T. Tikson (2005)

Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan. Ia menambahkan penjelasan tentang transformasi dalam struktur ekonomi. Peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa mempunyai kontribusi terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, ia mengkritisi kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi.

7. Menurut Effendi

Menurutnya pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. (2002:2)

Berdasarkan definisi di atas lebih lanjut dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Choirullah, 2007).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru,

jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.

Adapun inti mengenai pembangunan menurut Prof. Denis Goulet minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan. Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Ketiga, sasaran pembangunan. Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan Ekonomi Nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dan begitu banyak teori yang terus akan datang dan bermunculan namun tentunya secara nasional bangsa kita yang sangat terbuka terhadap perubahan tetap dapat melihat dengan jeli setumpuk konsekuensi akibat keputusan akan kebijakan ekonomi dalam pembangunan ekonomi bangsa yang dibuat.

Bab 6

Masalah Pembentukan Modal Di Negara Berkembang

6.1 Pendahuluan

Setiap negara yang melakukan kegiatan pembangunan ekonomi pastinya dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami permasalahan ketika melakukan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permasalahan pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara maju dan negara berkembang pastinya berbeda.

Pada negara maju, masalah pembangunan ekonomi yang umum dihadapi adalah kurangnya permintaan sehingga menghambat pertumbuhan output. Sedangkan di negara berkembang, masalah pembangunan ekonomi yang paling umum dihadapi adalah kurangnya elastisitas penawaran sehingga menghalangi laju pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya kurangnya elastisitas penawaran, negara berkembang juga dihadapkan pada permasalahan pembangunan ekonomi yang lain yang salah satunya adalah permasalahan modal. Di satu sisi, semakin lama negara berkembang semakin menyadari bahwa tersedianya modal belumlah syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Pada mulanya banyak yang berpendapat bahwa modal

memegang peranan sangat penting dan paling menentukan dalam menciptakan pembangunan ekonomi, ternyata berbagai kalangan telah menyadari bahwa ada faktor lain seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, entrepreneur yang cukup, sistem pemerintah yang efisien, kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi yang lebih modern, dan sikap masyarakat memegang peranan tidak kalah penting dalam menciptakan pembangunan (Sukirno, 2007).

Studi-studi tentang kontribusi relatif dari modal terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas di Negara Sedang Berkembang dan kesimpulan dari hasil estimasinya pun kurang begitu meyakinkan, karena keterbatasan data yang tersedia (Arsyad, 2016). Namun demikian, walau diakui peranan modal dalam pembangunan tidaklah sepenting seperti anggapan semula, ahli-ahli ekonomi tetap yakin dana modal mempunyai kedudukan istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan.

6.2 Arti Pembentukan Modal

Dalam teori klasik, pembentukan modal dipandang sebagai kunci ke arah kemajuan. Karena itu para ekonomi klasik menekankan betapa pentingnya arti tabungan dalam jumlah besar, dan hanya pemilik modal dan tanah merupakan orang yang dianggap mampu untuk menabung, sedangkan kelas pekerja tidak mampu menabung karena mereka hanya menerima upah yang besarnya sama dengan kebutuhan hidup minimal (subsistence).

Arti Pembentukan Modal ialah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal: perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya (Jhingan, 2018). Menurut (Singer, 1949), pembentukan modal terdiri dari barang yang tampak seperti pabrik, alat-alat dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah dan penelitian.

6.2.1 Pentingnya Pembentukan Modal

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor utama di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala cukup untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Singkatnya, hakikat dari pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Pembentukan modal menciptakan perluasan pasar. Dialah yang membantu menyingkirkan ketidaksempurnaan pasar melalui penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi, jadi memotong lingkaran setan kemiskinan baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan.

Negara terbelakang biasanya dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, sebab kebanyakan mereka mengekspor barang primer seperti bahan mentah dan hasil pertanian, dan mengimpor hampir semua jenis barang manufaktur atau setengah manufaktur dan barang modal. Pembentukan modal domestik merupakan salah satu cara pemecahan pokok kesulitan neraca pembayaran ini.

Pembentukan modal juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Ia membantu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh penduduk yang semakin meningkat. Jika pembentukan modal menyebabkan penggunaan sumber alam secara tepat dan pendirian berbagai jenis industri, maka tingkat pendapatan bertambah dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Mereka menikmati berbagai macam komoditi, standar hidup meningkat, juga kesejahteraan ekonomi. Akhirnya, kenaikan laju pembentukan modal menaikkan tingkat pendapatan nasional. Proses pembentukan modal tersebut membantu menaikkan output yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pendapatan nasional. Jadi kenaikan laju dan tingkat pendapatan.

Menurut Sentosa (1991), ada beberapa peranan istimewa dari modal dalam pembangunan di Negara Sedang Berkembang yaitu sebagai berikut:

1. Modal dapat menciptakan perluasan pasar. Ketidaksempurnaan pasar dapat diatasi melalui pembentukan investasi sosial (social overhead capital) dan ekonomi. Dengan demikian pembentukan modal akan memotong lingkaran perangkap kemiskinan (the vicious circle), baik dari segi penawaran maupun dari segi permintaan.
2. Pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin dilaksanakan. Di negara-negara sedang berkembang yang berpenduduk banyak, kenaikan output perkapita adalah berkaitan dengan rasio modal buruh. Oleh sebab itu dengan adanya pembentukan modal pembangunan menjadi mungkin dilaksanakan, kendati dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.
3. Pembentukan modal yang berasal dari dalam negeri merupakan salah satu cara pemecahan pokok kesulitan dalam neraca pembayaran. Negara-negara sedang berkembang biasanya dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, sebab kebanyakan mereka mengeksport barang-barang primer seperti bahan mentah dan hasil pertanian dan mengimpor hampir semua jenis barang manufaktur atau setengah manufaktur dan barang modal lainnya. Sehubungan dengan itu, pembentukan modal yang besar akan membantu memecahkan masalah neraca pembayaran.
4. Pembentukan modal dapat mempercepat proses pembangunan nasional.

6.2.2 Sebab-sebab Rendahnya Laju Pembentukan Modal

Menurut Jhingan (2018), ada beberapa sebab-sebab rendahnya tingkat pembentukan modal di negara terbelakang, yaitu:

1. Pendapatan Rendah. Tabungan yang besar penting bagi pembentukan modal, dan tabungan tergantung pada besarnya pendapatan. Karena pertanian, industri dan sektor lain di negara terbelakang masih terbelakang, output nasional menjadi rendah dan begitu juga dengan pendapatan nasional. Sebagai akibatnya, pendapatan per kapita

rendah. Pada pihak lain, kecenderungan berkonsumsi sangat tinggi, yang mendekati angka satu. Dengan demikian hampir keseluruhan pendapatan dihabiskan untuk konsumsi sehingga menabung menjadi tidak mungkin dan tingkat pembentukan modal tetap rendah.

2. Produktivitas Rendah. Karena tingkat produktivitas sangat rendah, laju pertumbuhan pendapatan nasional, tabungan dan pembentukan modal juga sangat rendah. Sumber alam belum digunakan secara optimal dan dipergunakan dengan salah mengakibatkan pendapatan pemilik sumber alam tidak dapat maksimal ditingkatkan yang akhirnya tidak mampu untuk menabung dan berinvestasi berlanjut ke permasalahan tidak meningkatnya pembentukan modal.
3. Alasan Kependudukan. Tingkat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi masalah yang sering terjadi di negara terbelakang sehingga membuat laju pertumbuhan pembentukan modal tetap rendah. Pertambahan jumlah penduduk memperberat kelangkaan modal karena diperlukan investasi besar untuk membekali tenaga buruh yang membengkak tersebut meski hanya dengan alat perlengkapan yang sudah usang. Jumlah anak yang terlampau banyak dalam keseluruhan penduduk merupakan beban berat bagi orang tua untuk membesarkannya dan karena itu mustahil menabung bagi pembentukan modal. Masalah kependudukan akhirnya menghambat laju pembentukan modal.
4. Kekurangan Wiraswasta. Dalam kenyataan, kewiraswastaan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Tetapi kecilnya pasar, kurangnya modal, langkanya milik pribadi dan perjanjian, dan sebagainya memperlambat usaha dan inisiatif. Dengan demikian laju pembentukan modal menjadi rendah.
5. Kekurangan Overhead Ekonomi. Adanya overhead ekonomi adalah penting untuk menciptakan iklim usaha dan membuat investasi berbuah karena dalam batas tertentu pembentukan modal tergantung padanya. Akan tetapi overhead ekonomi seperti sumber tenaga, angkutan, perhubungan, air dan sebagainya jarang tersedia di negara

terbelakang. Kekurangan ini memperlambat usaha, kegiatan investasi dan tentu saja laju pembentukan modal.

6. Kekurangan Peralatan Modal. Peralatan modal yang kurang menyebabkan laju pembentukan modal rendah. Tidak hanya persediaan modal, tetapi bahkan modalnya juga kurang. Keseluruhan investasi modal hanya sebesar 5 sampai 6 persen dari pendapatan nasional, sedang di negara maju sampai 15-20 persen. Karena langka modal menjadi tidak mungkin untuk mengganti peralatan modal yang ada dan bahkan menutup penyusutan negara seperti itu tidak mampu. Sebagai akibatnya, laju pembentukan modal tetap rendah.
7. Ketimpangan Dalam Distribusi Pendapatan. Ada ketimpangan yang tajam di dalam distribusi pendapatan yang membuat laju pembentukan modal tetap rendah. Tetapi ketimpangan pendapatan tidak mengandung arti bahwa tabungan lebih besar. Dalam kenyataan, menabung hanya dapat dilakukan oleh 3-5 persen penduduk yang berada pada puncak piramida, sisanya menginvestasikan pada saluran yang tidak produktif seperti emas, perhiasan, batu permata, perumahan, uang asing, dan sebagainya. Inilah yang memperkecil investasi nyata dan laju pertumbuhan modal menjadi rendah.
8. Pasar Sempit. Pasar sempit merupakan penghalang bagi tumbuhnya usaha dan inisiatif rakyat miskin. Permintaan akan barang terbatas karena pendapatan mereka rendah. Dengan demikian pasar yang sempit menghalangi investasi karena pasar domestik mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menyerap penawaran suatu produk baru. Inilah yang membuat pembentukan modal tetap berada dalam laju yang rendah.
9. Kekurangan Lembaga Keuangan. Kurang berkembangnya pasar uang, pasar modal, lembaga kredit, dan bank sehingga penyerapan dana untuk investasi masih belum maksimal dilakukan oleh lembaga keuangan. Sebagai akibatnya, tidak dapat dilakukan pengalangan dana tabungan dalam jumlah yang cukup untuk tujuan investasi dan dengan begitu laju pembentukan modal tetap rendah.

10. Keterbelakangan Ekonomi. Efisiensi buruh yang rendah, faktor yang tidak mobil, spesialisasi dan aktivitas berusaha yang terbatas, ekonomi yang terbengkalai, nilai dan struktur sosial yang tradisional, ke semuanya mengendala tabungan dan investasi, serta mencegah naiknya laju pembentukan modal.
11. Keterbelakangan Teknologi. Keterbelakangan teknologi juga menghalangi laju pembentukan modal. Sebagai akibat teknik produksi yang kuno, produktivitas per unit buruh dan produktivitas per unit modal tetap rendah. Situasi ini menyebabkan output dan pendapatan nasional tetap rendah, dan laju pembentukan modal tidak dapat meningkat.
12. Anggaran Defisit. Defisit yang melampaui batas keselamatan dari anggaran defisit kemungkinan cenderung menurunkan laju pembentukan modal. Hal ini terjadi apabila anggaran defisit menjurus ke situasi inflasioner. Apabila harga naik, barang-barang menjadi lebih mahal. Sebagai akibatnya konsumen dipaksa membelanjakan bagian pendapatannya yang lebih besar, dan dengan demikian mempersulit dirinya untuk menabung. Ini menghalang pembentukan modal.
13. Kenaikan Pajak. Pajak juga menghalangi dan mengurangi pembentukan modal. Jika pemerintah menaikkan pajak, dalam jumlah ataupun tingkatnya sebagai upaya tabungan paksa, maka pendapatan konsumen berkurang. Hal ini terjadi baik pada pajak langsung maupun tidak langsung. Pajak langsung mengurangi pendapatan secara langsung dengan pajak tidak langsung mengurangi pendapatan karena naiknya harga. Jadi tabungan dan pembentukan modal terhalang.
14. Demonstration Effect. Setiap orang terdorong untuk meniru gaya hidup tetangga yang makmur. Begitu juga, ada kecenderungan pada sebagian penduduk untuk menyamai standar konsumsi yang lebih tinggi di negara maju. Demonstration effect biasanya disebabkan oleh film asing, majalah asing atau kunjungan ke luar negeri. Sebagai akibatnya, kenaikan pendapatan dibelanjakan lebih besar pada

konsumsi barang-barang mewah dan dengan demikian tabungan hampir menjadi statis atau tidak seberapa. Laju pembentukan modal gagal meningkat.

6.3 Sumber-Sumber Pembentukan Modal

Pada umumnya pembentukan modal menyangkut bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah tabungan nyata, mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan dan pada masalah bagaimana caranya menginvestasikan tabungan tersebut. Di negara-negara sedang berkembang, masalah pembentukan modal akan menyangkut bagaimana caranya untuk meningkatkan kecenderungan penduduk kelompok pendapatan rendah serta bagaimana mempergunakan tabungan uang bagi pembentukan modal.

Menurut Jhingan (2018), proses pembentukan modal menyangkut 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Meningkatkan volume tabungan nyata
2. Mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan
3. Menginvestasikan tabungan

Jadi masalah pembentukan modal di negara berkembang menjadi dua kali lipat, yaitu: satu, bagaimana meningkatkan kecenderungan menabung penduduk kelompok berpendapatan rendah, dan dua, bagaimana mempergunakan tabungan uang bagi pembentukan modal. Selanjutnya, berdasarkan kepada sumber modal yang dapat digunakan untuk pembangunan, usaha pembentukan modal untuk maksud tersebut dapat dibedakan kepada sumber pembentukan modal domestik dan eksternal.

6.3.1 Sumber Pembentukan Modal Domestik

Menurut Jhingan (2018) sumber pembentukan modal dari domestik yaitu antara lain:

1. Kenaikan Pendapatan Nasional. Menaikan keluaran atau pendapatan nasional yang akan menaikkan pendapatan penduduk. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknik yang ada dan memakai sumber secara lebih efisien, memanfaatkan sumber yang belum terpakai, dan meningkatkan pembagian kerja.
2. Penggalakan Tabungan. Penggalakan tabungan juga akan memecahkan masalah peningkatan tabungan. Penggalakan tabungan memerlukan upaya bersama dalam bentuk penerangan dan pendidikan sosial. Menabung merupakan masalah kebiasaan yang ditanamkan melalui penerangan. Penduduk dapat dibujuk untuk menabung demi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan keluarga mereka, pendidikan anak-anak, pernikahan, untuk membangun rumah atau sebagai jaminan hari tua, sakit atau keadaan darurat. Menerbitkan sertifikat tabungan dalam bentuk surat obligasi pemerintah dan tunjangan pemerintah yang memberikan suku bunga tinggi mungkin juga membantu di dalam menggalakan tabungan. Rangsang lebih jauh untuk menabung dapat berbentuk hadiah bisnis, hadiah lotre, dan pembebasan pajak bagi pembelian obligasi pemerintah.
3. Pendirian Lembaga Keuangan. Secara umum pendapatan yang tak terpakai oleh penduduk di negara terbelakang disimpan dalam bentuk uang kontan, permata, emas, dan lain-lain. Oleh karena itu yang diperlukan ialah mendirikan lembaga-lembaga keuangan tempat masyarakat dapat mendepositokan uangnya dengan aman.
4. Tabungan Desa. Tindakan penting lain adalah mendorong tabungan pedesaan untuk keperluan-keperluan lokal yang disetujui dan dipahami oleh para penabung. Saham pemerintah dapat diterbitkan untuk proyek-proyek pembangunan tertentu di daerah pedesaan. Arah dari kebijaksanaan pemerintah harus mengaitkan tabungan desa dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Dengan cara ini

pengerahan tabungan desa dapat memacu pembangunan. Tabungan sukarela seperti itu bahkan dapat membawa ke “batas tabungan minimum” tinggal landas.

5. Simpanan Emas. Cara ini bermanfaat kendati sering cara ini dilupakan. Pemerintah harus mengeluarkan sertifikat emas yang memberikan suku bunga tinggi sebagai ganti penyerahan emas oleh masyarakat. Akan tetapi orang tidak bersedia melepaskan emas dan permata, dan dengan demikian enggan menanamkannya secara sukarela dalam bentuk sertifikat emas. Oleh karena itu, penting sekali adanya peraturan yang melarang penyimpanan emas melampaui jumlah tertentu; mengatur perdagangan emas oleh swasta, melarang penggunaan emas murni untuk pembuatan ornamen-ornamen. Bersamaan dengan tindakan ini, penyelundupan emas ke dalam negeri harus dihentikan. Tindakan ini tidak mungkin berhasil kecuali jika emas di dalam negeri dijual dengan harga internasional.
6. Mempertahankan Kepincangan Pendapatan. Hal ini juga dianggap sebagai salah satu tindakan untuk mencapai laju tinggi tabungan dan investasi. Karena, bagian terbesar masyarakat di negara terbelakang mempunyai kecenderungan marginal menabung yang rendah. Hanya kelompok berpendapatan lebih tinggi, dengan kecenderungan marginal menabung yang tinggi yang dapat menabung dan berinvestasi bagi pembentukan modal.
7. Peningkatan Keuntungan. Rasio tabungan terhadap pendapatan nasional bukan saja merupakan fungsi dari pincangnya rasio distribusi pendapatan tetapi lebih tepat merupakan fungsi rasio keuntungan terhadap pendapatan nasional. Keuntungan dapat dinaikkan dengan memberikan subsidi, potongan pajak, penyediaan secara cukup bahan-bahan mentah dan peralatan modal, dengan pembatasan impor barang-barang kompetitif, dengan pengendalian upah dan serikat buruh dan dengan pembelian barang-barang industri oleh pemerintah.
8. Tindakan Fiskal. Tindakan ini mungkin berupa anggaran surplus melalui peningkatan pajak, pengurangan pengeluaran pemerintah,

perluasan sektor ekspor, meningkatkan uang dengan pinjaman masyarakat atau bahkan dengan pembelanjaan defisit. Disamping itu, pemerintah dapat menaikkan tabungan dengan menyelenggarakan badan usaha milik negara dengan lebih efisien sehingga badan usaha ini memperoleh keuntungan lebih besar.

9. Inflasi. Apabila dana yang perlu untuk pembentukan modal tidak terkumpul, inflasi merupakan kebijaksanaan yang paling potensial. Inflasi dianggap sebagai pajak tersembunyi atau tidak kelihatan. Ketika harga naik, kenaikan ini akan mengurangi konsumsi dan dengan demikian mengalihkan sumber-sumber dari konsumsi uang ke investasi. Pemerintah menciptakan inflasi dengan jalan menerbitkan uang kertas lebih banyak ke peredaran untuk memenuhi keperluannya. Inflasi memang meningkatkan tabungan tetapi dengan mengorbankan standar kehidupan masyarakat.
10. Keuntungan Badan Usaha Negara. Pemerintah dapat juga memobilisasi tabungan domestik bagi pembentukan modal dengan mendirikan badan usaha publik. Badan usaha ini menerima dana dari pasar bebas dalam bentuk modal bersih dan utang obligasi. Badan usaha tersebut juga mendapat pinjaman dari luar negeri atau berkolaborasi dengan perusahaan asing. Badan usaha ini merupakan pengganti perusahaan swasta di negara terbelakang. Mereka pada umumnya mempergunakan sumber sendiri sebagai modal kerja. Tetapi di negara sedang berkembang tertentu di mana badan-badan usaha publik didirikan sebagai perusahaan negara, keuntungan mereka ini dipergunakan untuk pembentukan modal. Pendirian berbagai macam badan usaha publik seperti itu membantu mengorganisasi pasar uang dan pasar modal dalam mengerahkan tabungan domestik bagi pembentukan modal.
11. Pemanfaatan Pengangguran Tersembunyi. Menurut Nurkse, salah satu sumber penting pembentukan modal adalah tabungan yang secara potensial tersembunyi di dalam pengangguran di pedesaan di negara terbelakang padat penduduk. Para penganggur tersembunyi ini praktis sedikit sekali atau tidak sama sekali memberikan sumbangan

terhadap output. Pandangan Nurkse ini menghalangi pembayaran upah kepada buruh. Padahal jika upah dibayarkan kepada para pekerja, mereka akan membelanjakannya untuk bahan makanan dan dengan demikian meningkatkan pendapatan petani yang bekerja di bidang pertanian. Pendapatan yang meningkat ini dapat dikenai pajak untuk membiayai berbagai proyek investasi.

Menurut Sukirno (2007), modal yang berasal dari dalam negeri berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu: tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Hampir semua negara berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah kurang cukup untuk membiayai program pembangunan dan untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi.

6.3.2 Sumber Pembentukan Modal dari Eksternal

Bagi negara – negara yang belum atau tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya, maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri (negara-negara lain).

Menurut Jhingan (2018) sumber pembentukan modal dari sumber eksternal yaitu antara lain:

1. Bantuan Luar Negeri. Dalam hal sumber domestik pembentukan modal tidak cukup, perlu diimpor modal asing dalam bentuk pinjaman dan hibah dari negara-negara maju tanpa “ikatan” apa pun. Akan tetapi jalan yang terbaik ialah memulai usaha patungan (joint venture). Dengan cara ini para investor asing membawa serta technical know-how bersama modal, dan mereka akan melatih buruh dan perusahaan setempat. Modal juga dapat diimpor secara tidak langsung dengan pembayaran melalui ekspor. Inilah kebijaksanaan yang paling baik karena ekspor membiayai impor. Akan tetapi suatu negara terbelakang tidak mungkin menaikkan ekspornya sampai ke tingkat impor modal yang dilakukan pada tahap pembangunan sebelumnya.

2. Pembatasan Impor. Semua impor barang mewah harus dibatasi dan devisa yang terhemat harus dipergunakan untuk mengimpor barang modal. Langkah ini hanya dapat berhasil apabila pendapatan nasional yang terhemat dari pembatasan impor barang konsumsi itu tidak dipergunakan untuk konsumsi barang mewah dan setengah mewah yang dibuat di dalam negeri. Oleh karena itu, jika pembatasan impor barang mewah diharapkan dapat menghasilkan kenaikan dalam pembentukan modal neto, maka diperlukan adanya kenaikan dalam tabungan domestik.
3. Term of Trade yang menguntungkan. Hal yang perlu dilakukan adalah perlu untuk menabung dan menanamkan secara produktif kenaikan dalam pendapatan domestik yang diperoleh dari pendapatan ekspor. Nurkse menganjurkan agar tabungan-tabungan ini diserap melalui perpajakan sehingga negara memiliki suatu komando atau impor tambahan barang-barang investasi.

Namun demikian menurut Sukirno (2008), modal yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, dan penanaman modal asing. Bantuan dan pinjaman luar negeri dapat bersumber dari pemerintah negara asing, badan-badan internasional atau dari pihak swasta. Pembentukan modal dengan demikian merupakan faktor penentu penting dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi terlalu naif jika menganggap pembangunan ekonomi semata-mata sebagai masalah pembentukan modal, tanpa mengindahkan faktor politik, sosial, budaya, teknologi, dan wiraswasta.

Bab 7

Masalah Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Indonesia

7.1 Pendahuluan

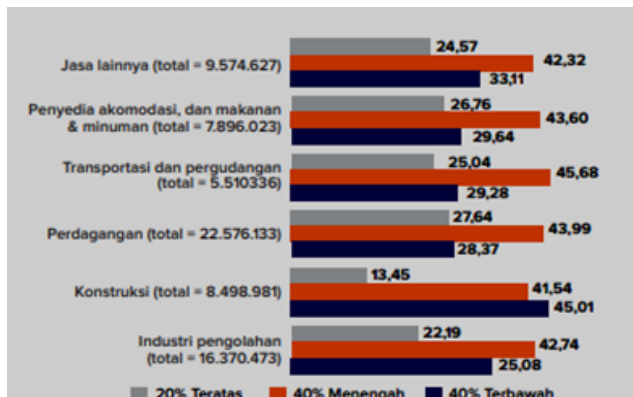
Terdeteksinya pandemi covid-19 dimulai maret 2020 menimbulkan keadaan ketenagakerjaan Indonesia terguncang luar biasa yang berakibat pada zona ekonomi serta aktivitas sosial lainnya di seluruh kawasan. Banyak pekerja di zona informal putus pekerjaan, ini disebabkan pengurangan jumlah pekerja yang berlanjut pada perekonomian negara yang juga terus melambat turun. Untuk itu perlu adanya serangkaian kebijakan yang efisien dalam kurang terbentuknya kenaikan jumlah pengangguran, sebagai upaya mendukung perumusan ketenagakerjaan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pekerja yang terkena dampak krisis yang terjadi.

Pembangunan saat ini tidak hanya dihadapkan pada kendala tenaga kerja yang terampil, tetapi dengan banyak masalah lainnya. Situasi tersebut dapat dilihat dari banyaknya masalah ketenagakerjaan. Ketidaksetaraan dalam standar hidup semakin lebar, dan orang miskin dilewati oleh pertumbuhan. Demokrasi ekonomi mengandaikan redistribusi locus dan penggunaan kekuasaan, meninjau kembali hierarki untuk membuatnya lebih adil. Ini dapat diberlakukan dalam situasi tempat kerja melalui seperangkat aturan dan praktik

termasuk kepemilikan kolektif, hierarki datar dan partisipasi semua pekerja dalam pengambilan keputusan (Malleison, 2014).

Tabel 7.1: Tingkat Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Serta Keseimbangan Tenaga Kerja Persektor

Bidang	Perkembangan PDB Kuartal IV 2019–Q1 2020	Proporsi Tenaga Kerja (%)
Pertanian, kehutanan, dan penangkapan ikan	9,46	27,46
Pertambangan	-0,75	1,11
Manufaktur	-1,17	14,88
Listrik dan Gas	-5,66	0,28
Pasokan Air	-0,89	0,28
Konstruksi	-6,92	6,65
Perdagangan	-1,38	19,00
Transportasi dan Penyimpanan	-6,38	4,36
Aktivitas Akomodasi dan Layanan Makanan	-3,54	6,69
Informasi dan Komunikasi	2,97	0,74
Kegiatan Keuangan dan Asuransi	5,39	1,37
Aktivitas Real Estat	0,52	0,33
Layanan Bisnis	-2,28	1,51
Administrasi Publik	-8,54	3,80
Pendidikan	-10,39	4,93
Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,53
Kegiatan Layanan Lainnya	-1,19	4,09



Gambar 7.1: Data Tenaga Kerja Pada 6 Sektor

Mayoritas pekerja di sektor usaha yang berdampak krisis ekonomi pandemi COVID-19 termasuk golongan menengah, kecuali sektor konstruksi (Gambar 7.1). Ketika guncangan terjadi, kelas menengah harus memiliki keterampilan bertahan hidup yang lebih baik daripada yang termiskin (setidaknya 40%) karena mereka masih memiliki tabungan atau asset sosial. Namun, pada awal karinya, tabungannya masih kecil, lebih dari setengah kelas menengah ini. Jika krisis berlanjut, tabungan mereka kemungkinan akan habis. Masalah ini tentunya dirancang untuk meningkatkan kerentanan tenaga kerja kelas menengah. Selanjutnya, kelompok menengah ini memiliki bentuk kerentanan tersendiri karena tidak termasuk dalam database informasi program perlindungan sosial pemerintah dan kemungkinan besar tidak menerima dukungan sosial.

Pemerintah hanya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk membantu. Akibatnya, kebijakan pemerintah menargetkan kelas menengah ini dengan cara lain sudah bergerak ke arah yang benar. Untuk menyelesaikan masalah di atas, banyak hal yang masih perlu ditangani. Isu-isu yang disebutkan di atas dapat mencakup pengembangan sumber daya manusia, pengembangan industri kreatif dan program dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Salah satu konsep penting ketenagakerjaan melalui penggunaan tenaga kerja yang optimal dan efisien.

7.2 Dinamika Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja

Efek dominan dari masalah ketenagakerjaan bahwa pengangguran akan berdampak negatif pada ketenagakerjaan (S, 2017). Selain pengembangan sektor ketenagakerjaan, kebangkitan dunia usaha untuk menyelesaikan krisis pasca ekonomi dan moneter serta terbangun dari mimpi buruk ekonomi global tampaknya telah mencapai Asia Tenggara, di mana Indonesia tidak dapat melarikan diri dari gelombang tersebut (Hoessin, 2001). Dalam rangka menyelesaikan krisis ekonomi global dengan warga, khususnya pelaku usaha, pemerintah menjadi salah satu alasan utama menstabilkan ekonomi, mempertahankan keseimbangan moneter dan mencegah sebagian besar industri. Berakibat pada nasib sebagian besar pekerja manufaktur serta pemutusan ikatan kerja.

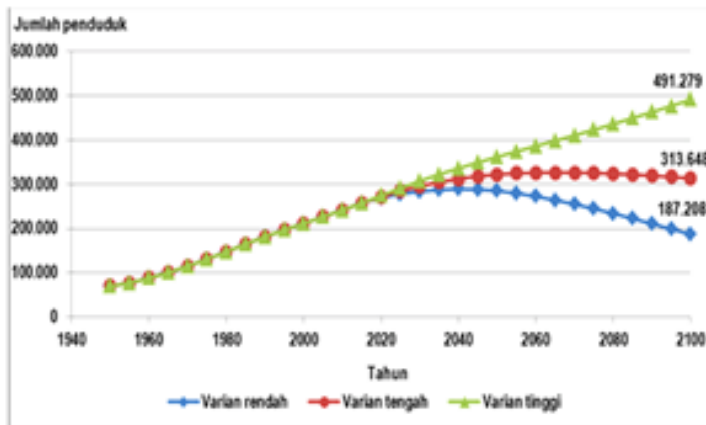
Tidak seluruh penduduk Indonesia mempunyai pekerjaan, sementara itu jumlah penduduk umur kerja hadapi penambah. Keadaan itu membuat terus menjadi banyak penduduk yang masuk jenis kelompok tenaga kerja. Sehingga mereka memerlukan lapangan pekerjaan. Kala lapangan pekerjaan tidak ada hingga hendak mencuat permasalahan dengan banyaknya pengangguran. Tantangan terbesar dalam situasi ketenagakerjaan saat ini bahwa sebagian besar dari 56% tenaga kerja memiliki pendidikan sekolah rendah. Sewaktu 57% pembelajaran masih baik sampai turun menjadi 56%. Situasi ketenagakerjaan kembali menghadapi momen tren positif sebelum wabah yang didambakan. Karena tingkat pengangguran akan menurun dari 7,50 juta menjadi 6,88 juta pada 2020.

Zona pertanian, perikanan dan kehutanan yang disertai dengan zona perdagangan dan industri pengolahan terlihat dari persentase daerah dengan tingkat pekerjaan yang sangat tinggi. 61, 7% karyawan aktif di tiga industri, termasuk pertanian, perikanan dan kehutanan. Menyusul merebaknya pejabat covid atau pekerja informal yang terlibat, 1,7 juta orang mencapai 1,3 juta orang yang pekerja informal covid-nya mencapai lebih dari 318 ribu orang (Al Machmudi, 2020). Problematik ketenagakerjaan dibagi menjadi 4 permasalahan yaitu:

Melonjaknya Jumlah Penduduk

Dinamika demografis termasuk pada perubahan demografis yang menjadi hasil dari perubahan dalam proses demografis, kelahiran (kesuburan), kematian dan perpindahan (migrasi) populasi dan itu termasuk pertumbuhan populasi, struktur usia populasi, struktur gender populasi dan distribusi populasi. Dengan demikian, situasi demografis ke depan ditentukan oleh upaya perkembangan saat ini, melalui upaya penyesuaian tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

Dinamika demografis akan menentukan proses pembangunan dan tingkat penghematan, investasi, penggunaan lahan dan tenaga kerja, produktivitas, konsumsi barang dan jasa, belanja pemerintah dan tingkat perdagangan dan keuangan internasional. Tekanan lahan dan pertumbuhan tenaga kerja yang pesat dapat menyebabkan rendahnya produktivitas lahan dan tenaga kerja. Situasi ini kemudian akan menentukan keunggulan komparatif negara untuk barang padat karya untuk ekspor dan kebutuhan negara untuk mengimpor barang dan peralatan modal yang signifikan.



Gambar 7.2: Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1950-2100 (ribu Jiwa)
(BPS, 2020)

Goncangnya Perekonomian Menambah Pengangguran

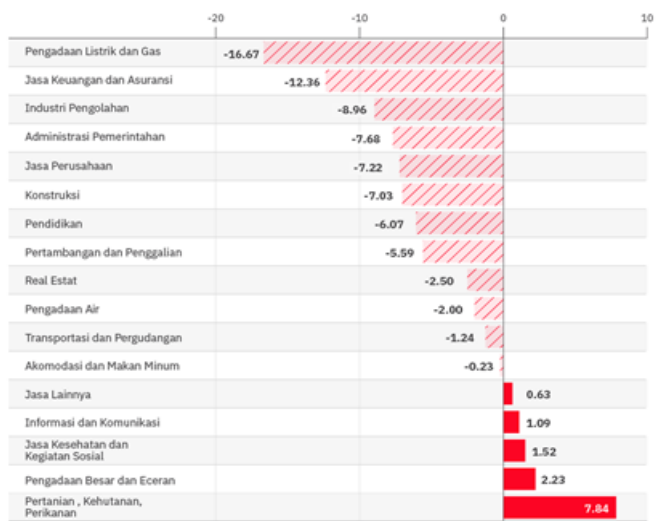
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat, sehingga terjadi peningkatan jumlah lapangan kerja baru yang tersedia dan lapangan kerja baru. Hal ini diperlukan karena pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang tidak dapat memberikan pengangguran dengan pekerjaan baru. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengurangi proyeksi pertumbuhan tahun depan menjadi 4,2% dari 5% pada September (Lestari, 2020). Peningkatan pandemi virus corona telah secara dramatis melemahkan pemulihan global. OECD memperingatkan bahwa jika pemerintah menarik dukungan terlalu cepat atau tidak dapat memberikan vaksin yang efektif, dampaknya bisa jauh lebih buruk. Dampak ekonominya bisa parah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko gejolak keuangan global dari negara dan perusahaan yang rapuh.

Peningkatan jumlah pengangguran secara dinamis meningkatkan alokasi gerakan buruh. Misalnya, sektor yang semula ditinggalkan oleh pekerja kini kembali diminati. Masalahnya adalah bahwa sektor ini dapat menjadi sumber mata pencaharian yang layakkah? Dua kali dalam setahun, Badan Pusat Statistik (BPS) rutin mengumumkan pengangguran. BPS mencatat, jumlah pengangguran Agustus sebesar 9,77 juta, naik 2,67 juta, dibandingkan Agustus 2019. Jumlah karyawan baru adalah 2,36 juta.



Gambar 7.3: Pekerja Terdampak Covid-19 (Gunawan, 2020)

Berkenaan dengan data BPS, penyebaran virus korona tidak hanya menyebabkan orang tidak bekerja tetapi juga mengurangi jumlah jam kerja. Secara keseluruhan, 29,12 juta pekerja terpapar virus corona, 70% di antaranya tinggal di daerah perkotaan. Dari mereka yang terkena dampak pandemi, 2,56 juta telah langsung menjadi pengangguran, 24,03 juta telah memiliki jam kerja berkurang.



Gambar 7.4: Perubahan Jumlah Tenaga Kerja Periode Agustus 2019 Sampai Agustus 2020 Berdasarkan Sektor (%) (Gunawan, 2020)

Kesempatan Kerja

Menurut sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa dari total penduduk di Indonesia tinggal di Pulau Jawa pada September 2020 dengan 151,59 juta atau 56,10 persen. Transisinya sangat lambat, dengan 59,1 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa pada 2000 dengan 57,5 persen pada 2010 dan hanya sedikit turun menjadi 56,10 persen pada 2020 (Herman, 2021). Kesempatan kerja akan diciptakan seluas-luasnya sehingga sebanyak mungkin pekerja dapat memiliki akses ke pekerjaan yang sejahtera. Kondisi ketenagakerjaan sehubungan dengan permintaan dan persediaan tenaga kerja jauh dari seimbang.

Situasi ini memengaruhi tingginya tingkat pengangguran, serta masalah upah dan kesejahteraan pekerja. Ini harus dipahami sebagai mekanisme terpadu untuk menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara pasokan tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Kebijakan pada UU Cipta Kerja semakin mendesak jika Indonesia memiliki bonus kependudukan apa adanya, namun pada saat yang sama, puluhan juta orang kehilangan pekerjaan dan sumber daya karena efek wabah Covid-19. Diyakini bahwa Undang-Undang Hak Cipta menciptakan antara 2,7 dan 3 juta pekerjaan per tahun. Investasi juga diperkirakan akan meningkat sebesar 6,6 hingga 7,0 persen dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 hingga 6,0 persen per tahun (Elena, 2020).



Gambar 7.5: Realisasi Investasi dan Serapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2013-2019 (Nastiti, 2020)

Ketenagakerjaan berkelanjutan di setiap wilayah akan ditargetkan untuk memperluas pekerjaan dan mengurangi perundungan dan pengembangan sumber daya manusia untuk melatih karyawan professional khusus untuk pekerja muda mandiri, produktif, ramah bisnis, kualitas, terampil, efisien dan efisien untuk mengisi, menciptakan dan memperluas pekerjaan dan mencoba kesempatan. Kesempatan kerja dapat ditunjukkan dengan ketersediaan formulir kerja yang dapat dilaksanakan. Hal ini memungkinkan peluang kerja Didefinisikan sebagai permintaan energi adalah langkah yang tepat, mengingat bahwa pasokan tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya.

Pemerintah mengklaim bahwa investasi sangat penting untuk pertumbuhan lapangan kerja. Data investasi, sayangnya, menunjukkan bahwa akar masalah pengangguran di Indonesia bukan karena kekurangan suntikan modal. Ekonom Faisal Basri juga mengatakan, kinerja investasi di Indonesia cukup baik. Jelas, investasi terus meningkat, tetapi konsumsi tenaga kerja justru menurun (Basri, 2020).

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia karena, dibandingkan dengan negara tetangga, relatif rendah. Rendahnya produktivitas pekerja juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lambat. Produktivitas pasar tenaga kerja menunjukkan hubungan antara produksi dan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan produk dari tenaga kerja. Produktivitas diukur dengan pendekatan bernilai tambah, tingkat produktivitas ditunjukkan dalam perbandingan antara nilai tambah dan sumber daya yang digunakan. Nilai tambah menjadi kelebihan nilai timbal balik yang diterima dengan nilai semua pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengukuran produktivitas tenaga kerja bernilai tambah ini harus menentukan berapa banyak produktivitas tenaga kerja meningkat dari tahun ke tahun di sebuah perusahaan.

Selain jumlah penduduk yang besar, tenaga kerja Indonesia memiliki rata-rata pendidikan rendah. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar keterampilan dan produktivitas karyawan Indonesia berada pada kategori pekerja berketerampilan rendah (Suyono & HernawaN, 2013). Tingkat pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya. Orang-orang berkualitas sering dikaitkan dengan memiliki pengetahuan dan wawasan yang meningkat, dapat berpikir lebih terarah, sehingga produktivitas cenderung lebih tinggi. Ini

dikarenakan pendidikan dapat menciptakan mentalitas energi, serta mampu bersaing di dunia kerja.

Ketika mempertimbangkan masalah, pekerja harus meningkatkan kompetensi diri mereka sebelum menuduh mereka kehadiran tenaga kerja asing. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko dengan merekrut pekerja yang tidak memahami operasi peralatan yang ada. Jika kompetensi tenaga kerja Indonesia meningkat dan dapat menduduki jabatan penting, perusahaan tidak perlu khawatir untuk mendatangkan tenaga kerja asing, tentunya. Pekerja juga harus memiliki keterampilan yang tepat di bidang untuk mendukung kinerja kerja mereka, selain menguasai bahasa asing. Semangat pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja sebagai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kedelapan No 3 mendorong masyarakatnya untuk bekerja untuk apapun sehingga banyak orang bekerja setengah dari pengangguran.

Bab 8

Aspek Perdagangan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi

8.1 Pendahuluan

Salah satu perkembangan ekonomi yang paling signifikan adalah meningkatnya internasionalisasi bisnis. Meskipun banyak perusahaan telah dijalankan melintasi batas-batas negara selama berabad-abad, perusahaan yang terkemuka di seluruh dunia kian mengalihkan perhatiannya pada bisnis internasional untuk mempertahankan daya saingnya dalam periode perekonomian yang dinamis dewasa ini (Jain, 2001). Peranan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi cukup berpengaruh. Beberapa ahli ekonomi klasik dan neo-klasik melihat bahwa perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun suatu negara yang digunakan sebagai mesin pertumbuhan. Pendapat ahli lain sebaliknya, mereka menganggap bahwa kegiatan perdagangan internasional memberikan dampak bahwa negara yang kaya menjadi kaya dan negara miskin akan dirugikan dengan kegiatan tersebut.

Tantangan perdagangan internasional adalah untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang kompetitif dalam pemasaran global yang semakin intensif. Bagi banyak perusahaan, menjadi internasional bukan lagi suatu kemewahan tetapi keharusan untuk bertahan hidup secara ekonomis. Hal tersebut yang akan memengaruhi ekonomi nasional, dunia, perdagangan, pasar, dan persaingan (Cateora and Graham, 2007).

Oleh sebab itu, bagi negara yang berkembang secara terpaksa akan mengorbankan apa yang menjadi manfaat akibat timbulnya spesialisasi internasional. Tetapi, dengan mengambil dan memberlakukan kebijakan substitusi impor dan industrialisasi yang terukur dan terencana serta memperluas hasil barang maupun jasa untuk dikonsumsi dalam negeri, akan dapat dicapai satu tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang lebih tinggi. Pertama, kita akan membahas bagaimana perdagangan internasional menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta pandangan yang berlawanan mengenai seberapa jauh perdagangan internasional menghambat pembangunan ekonomi suatu negara

8.2 Manfaat Perdagangan Internasional

Dari perdagangan internasional, pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keuntungan, begitu juga negara memperoleh keuntungan sehingga pendapatan nasional akan membaik. Dilihat dari meningkatnya jumlah barang/jasa dan laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan mengalami perubahan yang positif seperti pembangunan ekonomi sehingga tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Kondisi pasar nasional kecenderungannya kecil. Dengan kondisi ini akan mengakibatkan penyerapan untuk output di pasar domestik tidak dilakukan dengan maksimal, sehingga dorongan untuk berinvestasi juga akan mengalami penurunan. Bukan hanya investasi saja yang akan memengaruhi pendapatan per kapita dan daya beli juga berkontribusi memberikan pengaruh terjadinya pasar yang semakin kecil. Untuk itu diperlukan perdagangan internasional agar memperluas pasar untuk barang/jasa yang dihasilkan suatu negara dan merangsang adanya kegiatan investasi, pendapatan dan tabungan melalui alokasi sumber daya dengan lebih efisien.

Perdagangan internasional memberikan manfaat dan arti yang penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan tersebut memberikan arti dalam melakukan pembangunan di beberapa sektor seperti: mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman yang memungkinkan pembangunan serta memberikan sarana untuk melaksanakannya. Menurut Haberler dalam (Jhingan, 2018) menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan kepada suatu negara jika perdagangan internasional dilakukan yaitu pembangunan ekonomi akan mengalami peningkatan dan dapat diharapkan sumbangan tersebut akan sama di masa datang dan bahwa perdagangan bebas dengan sedikit perbaikan atau penyimpangan tidak mendasar atau marginal adalah kebijaksanaan yang terbaik dilihat dari sudut pembangunan ekonomi.

Ketergantungan suatu negara terhadap perdagangan internasional yaitu sebagai mesin penggerak perekonomian suatu negara memberikan pengaruh yang cukup besar. Menurut Salvatore dalam (Safitriani, 2014), perdagangan internasional merupakan salah satu aktivitas perekonomian di mana aktivitas tersebut meliputi aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional

Pengalokasian sumber daya produksi secara efektif dan efisien maka produktivitas akan semakin baik. Hal ini menjadi alasan mengapa kegiatan perdagangan internasional akan memberikan keuntungan yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hicks dalam (Jhingan, 2018), memperluas pasar menghasilkan sejumlah keuntungan baik secara internal dan eksternal karenanya akan mengurangi biaya produksi. Dengan adanya perdagangan internasional dapat mengalihkan dari sektor pangan ke sektor uang. Dengan adanya perdagangan internasional akan memberikan manfaat lebih banyak bagi kedua negara pelaku dan bagi dunia secara umum, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar, selain itu juga akan meningkatkan efisiensi perekonomian, menurut Susantoro dalam (Fakhrudin, 2008). Kegiatan perdagangan internasional juga akan memberikan manfaat secara tidak langsung bagi perekonomian suatu negara sebagai berikut:

Tabel 8.1: Manfaat tidak Langsung Perdagangan Internasional, (Jhingan, 2018)

No.	Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Internasional
1	Membantu proses mempertukarkan barang-barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai pertumbuhan tinggi. Komoditi bahan makanan negara-negara berkembang ditukar dengan mesin, barang modal, bahan mentah dan produk setengah jadi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Karena kekurangan bahan modal dan bahan, maka untuk mempercepat langkah pertumbuhan, mereka dapat mengimpor dari negara maju, dan membangun <i>overhead</i> sosial dan <i>overhead</i> ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang langsung produktif. Jadi ekspor yang lebih besar memperluas volume impor alat-alat perlengkapan yang dapat dibiayai tanpa membahayakan neraca pembayaran dan tingkat kebebasan yang lebih tinggi membuatnya lebih mudah untuk merencanakan investasi domestik bagi pembangunan.
2	Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik. Negara terbelakang kekurangan keterampilan penting tertentu. Kekurangan ini merupakan rintangan yang lebih besar bagi pembangunan daripada kekurangan akan barang-barang modal. Perdagangan luar negeri dapat mengatasi kelemahan ini, karena perdagangan luar negeri, menurut Haberler, adalah sarana dan wahana untuk menyebarkan pengetahuan teknis, pemasukan gagasan, ketrampilan, bakat manajer dan kewiraswastaan. Pemasukan gagasan, kemampuan dan ketrampilan merupakan perangsang kuat bagi kemajuan teknologi. Ia memberikan kesempatan untuk belajar baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan negara maju. Perdagangan luar negeri membantu memacu pembangunan negara miskin karena perdagangan luar negeri memungkinkan peminjaman gagasan, keterampilan dan kemampuan tertentu dari negara maju dan menerapkannya sesuai dengan kekayaan faktor setempat. Bahkan kecepatan pembangunan AS, Jepang dan negara maju lainnya efek mendidik perdagangan luar negeri tersebut. J.S.Mill dalam (Jhingan, 2018) menekankan arti penting tersebut sebagai berikut: Di tengah keadaan tanpa perbaikan manusia seperti saat ini, hampir tidak ada ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapa penting arti menempatkan orang-orang untuk berhubungan dengan orang-orang lain yang berbeda dengan mereka, dengan cara pikir dan cara tindak yang berbeda dengan yang mereka kenal sebelumnya komunikasi seperti ini selalu terjadi dan khususnya pada abad ini merupakan salah satu dari sumber-sumber utama kemajuan.
3	Perdagangan luar negeri memberi dasar bagi pemasukan modal luar negeri ke negara-negara terbelakang. Jika tidak ada perdagangan luar negeri, modal luar negeri tidak akan mengalir dari negara kaya ke negara miskin. Volume modal luar negeri tergantung di antara faktor-faktor lain-pada volume perdagangan. Semakin

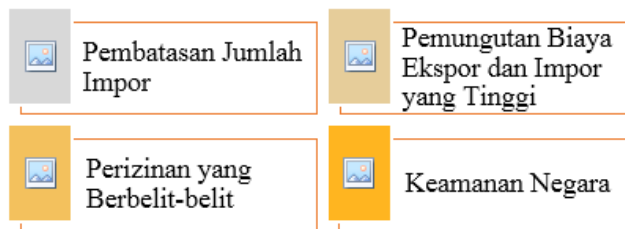
	besar volume perdagangan, semakin besar pula kemungkinan suatu negara dapat membayar kembali suku bunga dan pokok pinjamannya. Bagaimanapun sangat lebih mudah mendapatkan modal luar negeri untuk industri peningkatan ekspor dari pada untuk substitusi impor dan keperluan umum. Tetapi dari sudut pandang negara pengimpor, penggunaan modal asing untuk substitusi import, industri keperluan umum dan industri manufaktur lebih bermanfaat untuk mempercepat pembangunan daripada hanya untuk peningkatan ekspor. Modal luar negeri tidak hanya membantu menambah lapangan kerja, output dan pendapatan tetapi juga mempermulus neraca pembayaran dan tekanan inflasi. Selanjutnya, ia menghasilkan mesin, perlengkapan, pengetahuan, keterampilan, gagasan dan latihan bagi tenaga kerja setempat. Menekankan arti penting modal luar negeri melalui perdagangan, J. S. Mill dalam (Jhingan, 2018), mengatakan “modal luar negeri yang menciptakan peningkatan produksi itu tidak lagi tergantung secara eksklusif pada sifat hemat atau penduduk itu sendiri. Sambil memberikan teladan, dan dengan membangkitkan gagasan baru dan mematahkan rantai kebiasaan, jika tidak dengan memperbaiki keadaan nyata penduduk, perdagangan luar negeri menawarkan kepada masyarakat keinginan-keinginan baru, ambisi dan pemikiran tingkat tinggi bagi masa depan bangsa tersebut
4	Perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang secara tidak langsung karena meningkatkan persaingan sehat, dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien. Persaingan sehat perlu bagi pengembangan sektor ekspor ekonomi dan perlu untuk mengendalikan monopoli yang tidak efisien. Persaingan sehat perlu bagi pengembangan sektor ekspor ekonomi dan perlu untuk mengendalikan monopoli eksploitatif yang tidak efisien yang lazimnya dilakukan dengan alasan proteksi industri baru. Jadi, di samping manfaat statis yang disebabkan oleh alokasi sumber secara efisien berdasarkan fungsi-fungsi produksi tertentu, perdagangan luar negeri memberikan empat macam keuntungan sebagaimana di sebutkan di atas dengan menubah fungsi-fungsi produksi yang ada dan mendorongnya ke atas dan ke luar.

8.3 Hambatan dalam Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan internasional, perusahaan sering mengalami hambatan baik dari negara asal maupun negara tujuan pasar. Agar proses perdagangan internasional dapat berjalan sesuai dengan rencana dibutuhkan kerjasama baik dari negara asal maupun negara tujuan. Bentuk kerjasama tersebut yaitu adanya pembebasan perdagangan seperti ekspor dan impor, kondisi politik

yang aman. Tetapi sering terjadi bahwa kepentingan dalam suatu negara akan menimbulkan hambatan dalam proses perdagangan internasional.

Dalam pengertian luas, hambatan diartikan sebagai suatu bentuk tindakan (measures) yang memengaruhi dan membatasi aliran bebas barang dan jasa dalam perdagangan internasional. Dalam pengertian yang lebih sempit, hambatan perdagangan merupakan suatu bentuk tindakan (measures) yang diterapkan oleh suatu negara yang tidak sesuai dengan aturan internasional. Dalam praktek perdagangan internasional, hambatan perdagangan dibagi menjadi hambatan tarif dan hambatan non tarif, (Sari, Hakim and Anggraeni, 2014). Adapun contoh bentuk hambatan dalam melakukan perdagangan internasional meliputi:



Gambar 8.1: Hambatan Perdagangan Internasional, (Todaro and Smith, 2011)

Kurs sebagai salah satu ukuran nilai perdagangan antara negara menjadi pemicu aliran perdagangan. Kurs mata uang asing yang tidak menentu (tidak stabil) membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual dan beli barang. Kesulitan ini akan memberikan dampak pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Kondisi ini memberikan pengaruh kepada pedagang internasional menjadi enggan untuk melakukan aktivitas ekspor dan impor. (Ekananda, 2014)

8.3.1 Beberapa Isu Penting Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional sering kali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya yang mempelopori strategi ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya

yang jauh lebih besar, Cina. Pengalaman negara-negara ini menjadi jalur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan.

Pada saat bersamaan, di seantero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau produk lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, dan tembaga. Pada situasi khusus seperti di negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah dan olahan ke berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih 70 persen dari pendapatan nasional mereka.

Namun, tidak seperti negara-negara produsen minyak dan segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan sekarang Cina. Banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non mineral yang meliputi sebagian besar dari pendapatan valuta asing mereka. Hal ini merupakan persoalan serius khususnya di Afrika Sub-Sahara. Karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor semacam itu sering kali tidak stabil, maka ketergantungan ekspor pada produk-produk primer turut menghadirkan sejumlah risiko dan ketidakpastian yang tidak diinginkan banyak negara (Todaro and Smith, 2011).

Selain masalah ketergantungan ekspor tersebut, banyak negara-negara berkembang yang juga tergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar, pada impor bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produsen intermediate, serta produk-produk konsumen guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumen masyarakat yang semakin meningkat di sana. Bagi mayoritas negara berkembang, permintaan impor tersebut melampaui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor selama pasca perang dunia II.

Hal ini telah mengakibatkan defisit kronis pada posisi neraca pembayaran mereka dibandingkan dengan negara lain. Di sejumlah negara berkembang, defisit pada pos transaksi berjalan (porsi dari neraca pembayaran suatu negara yang mencerminkan nilai pasar dari ekspor berwujud, misalnya perdagangan komoditas dan tak berwujud misalnya jasa pengiriman), dikompensasikan pada neraca pembayaran dengan surplus pada pos transaksi modal, beban utang dari pelunasan investasi dan pinjaman internasional terdahulu sering kali menjadi semakin besar. Di sejumlah negara sedang berkembang, defisit parah

pada pos transaksi berjalan dan modal telah mengakibatkan merosotnya cadangan moneter internasional, mata uang yang stabil, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Banyak negara yang berhutang akhirnya mencapai surplus ketika melunasi sebagian utang mereka. Pada abad yang baru ini, pola surplus perdagangan telah memperkuat banyak negara berkembang meski tidak berlaku untuk semua. Negara-negara berkembang telah berupaya untuk menghindari terulangnya kembali kondisi di Amerika Latin pada tahun 1980-an, Afrika sub-Sahara pada tahun 1980-an dan 1990-an, dan Asia Timur pada tahun 1997-1998. Penurunan drastis pendapatan ekspor selama krisis keuangan 2008 sekilas telah memperlihatkan bahaya tersebut, meski perekonomian global segera pulih dari ketidakseimbangannya. Pola ini juga membawa risiko; contohnya, hal ini berarti bahwa negara-negara berkembang secara efektif mengeksport modal dan membuat perekonomiannya rentan terhadap koreksi tajam ketika defisit neraca pembayaran AS yang sangat besar dan kronis mulai pulih kembali, (Todaro and Smith, 2011).

Namun perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang luas, jauh lebih luas dari sekadar arus sumber daya keuangan dan komoditi antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi ke luar, ke bangsa-bangsa lainnya di dunia, negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya keuangan internasional, tetapi juga pengaruh pembangunan atau anti pembangunan yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi; pola konsumsi; tatanan kelembagaan dan organisasional; sistem kesehatan dan sosial; serta tatanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum dari negara-negara maju. Dampak dari transfer teknologi produksi, ekonomi, sosial. Dan budaya terhadap karakter proses pembangunan bisa sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Berbagai dampak ini tergantung pada sifat struktur politik, sosial, dan kelembagaan dari negara penerima transfer dan prioritas pembangunannya.

8.4 Lima Pertanyaan Dasar Mengenai Perdagangan dan Pembangunan

Menurut (Todaro and Smith, 2011), pembahasan terhadap teori-teori tradisional dan kontemporer mengenai perdagangan internasional dalam konteks lima tema atau pertanyaan mendasar tentang beberapa nilai penting tertentu bagi negara-negara berkembang sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perdagangan internasional memengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari “perdagangan sebagai mesin pertumbuhan”, dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer.
2. Bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan, dan siapa yang memetik manfaatnya?
3. Dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya?
4. Dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya?
5. Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar (perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas, dan sebagainya) atau yang berorientasi ke dalam (proteksi demi mencapai kemandirian), atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis? Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi-strategi perdagangan bagi pembangunan ini?

Jelas, jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan dasar tersebut tidak akan seragam dalam berbagai perekonomian di dunia negara berkembang.

Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, preferensi dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut juga berlaku bagi negara sedang berkembang.

8.5 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut

Hampir tidak mungkin seseorang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun, mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antarnegara. Terdapat beberapa pertanyaan tentang faktor apa yang menentukan jenis produk yang akan diperjualbelikan, apa yang menyebabkan suatu negara memproduksi barang tertentu, sedangkan negara lain memproduksi produk yang berbeda.

Di zaman Adam Smith memfokuskan perhatiannya kepada perbedaan internasional dari segi biaya produksi dan harga yang ditawarkan pada berbagai produk. Terdapat beberapa negara melakukan spesialisasi dalam hal kegiatan penciptaan suatu produk yang unik dan bernilai karena mereka menginginkan mempunyai keunggulan untuk melakukannya. Mereka berspesialisasi, yaitu mengkonsentrasikan sumber daya pada produksi sejumlah kecil komoditas dalam kegiatan di mana mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari spesialisasi (Todaro and Smith, 2011).

Disamping keunggulan komparatif dan spesialisasi, konsep lain dalam perdagangan internasional adalah keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya riil yang sama seperti produsen lain tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Contoh, Jerman mungkin mampu memproduksi kamera, mobil, sepeda motor dan produk pertanian dengan biaya unit absolut yang lebih rendah dari Kenya. Tetapi karena perbedaan biaya komoditas antara kedua negara ini lebih besar untuk barang manufaktur ketimbang produk pertanian, maka akan lebih

menguntungkan bagi Jerman untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang manufaktur dan memperdagangkannya dan membeli produk pertanian dari Kenya.

Jadi, walaupun Jerman memiliki keunggulan absolut (*absolut advantage*) dalam biaya kedua komoditas tersebut, tetapi keunggulan biaya komparatifnya terletak pada barang-barang manufaktur. Sebaliknya, Kenya mungkin tidak memiliki keunggulan secara absolut dibandingkan dengan Jerman dalam produk manufaktur dan pertanian dalam arti bahwa biaya produksi unit absolutnya lebih tinggi bagi kedua jenis produk tersebut. Tetapi Kenya dapat terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan karena memiliki keunggulan komparatif dalam spesialisasi produk pertanian. Fenomena perbedaan keunggulan komparatif inilah yang memicu perdagangan yang saling bermanfaat bahkan bagi mitra dagang yang paling timpang.

8.6 Teori Perdagangan dan Pembangunan: Argumen-Argumen Tradisional

Menurut Todaro and Smith (2011), jawaban teoritis atas kelima pertanyaan dasar mengenai perdagangan internasional dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan neo-klasik

1. Perdagangan dilakukan di suatu negara untuk merangsang ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas perdagangan memberikan kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan konsumsi suatu negara dan output di dunia, serta mempermudah untuk mendapatkan akses akan sumber daya yang langka di pasar dunia. Maka dari itu, jika perdagangan tidak dilakukan akan memberikan dampak yang negatif terhadap negara miskin, di mana tidak akan mengalami pertumbuhan.
2. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan

- pendapatan riil negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugrah sumber daya dunia dan setiap negara efisien
3. Perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif, baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Perdagangan juga memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis
 4. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijaksanaan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor.
 5. Terakhir, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan, diperlukan kebijaksanaan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas

8.7 Pandangan Yang Berlawanan

Analisa di atas didasarkan pada doktrin biaya komparatif, telah dikritik oleh para ekonom seperti Prebisch, Singer, dan Myrdal. Mereka berpendapat bahwa secara historis perdagangan luar negeri justru memperlambat pembangunan di negara terbelakang. Sebagaimana dikatakan Myrdal dalam (Jhingan, 2018). “Akibat wajar perdagangan bebas antara dua negara di mana yang satu negara industri dan yang lainnya negara berkembang adalah awal terjadinya suatu proses kumulatif pemiskinan dan stagnasi negara yang disebut terbelakang”. Tiga argumen dalam mendukung pandangan bahwa perdagangan internasional menghambat pembangunan. Satu, dampak negatif pergerakan modal internasional; Dua, demonstration effect internasional yang merugikan; dan

tiga, kemerosotan sekuler imbalan pandangan barang (“commodity term of trade”), (Jhingan, 2018). Marilah kita amati dengan cermat faktor-faktor tersebut secara rinci.

Satu, dikatakan bahwa aktivitas penyaluran modal investasi dari negara yang memiliki modal ke ke negara miskin merujuk pada model pembangunan yang tidak berimbang. Dengan adanya investasi yang dari luar negeri memberikan hasil produksi barang primer yang akibatnya produk domestik akan mengalami kerugian. Di sisi lain, negara yang melakukan proses pengiriman barang ke pasar luar negeri masih bersifat produk yang memerlukan banyak modal untuk menghasilkan produk tersebut tetapi tidak mampu memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja.

Pada sisi lain, sektor domestik yang menghasilkan produk yang padat karya di mana investasi pada sektor ini rendah, sehingga kegiatan bisnis tidak dapat diperluas dan rendah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap pengangguran. Investasi luar negeri mengarah pada penggunaan sumber daya yang ada di suatu negara dalam bentuk profit dan bunga yang masuk negara yang memiliki modal atas investasi yang dilakukan.

Kedua, dituduh bahwa berlangsungnya demonstration effect internasional, disebabkan adanya perdagangan internasional, yang memberikan pengaruh negatif kepada pembentukan modal ke negara berkembang. Tetapi pandangan ini juga tidak benar. Di mana demonstration effect tidak memiliki pengaruh dikarenakan terdapat beberapa kota kecil di negara berkembang, mereka mengimpor bahan makan dan produk primer ke negara yang membutuhkan.

Ketiga, menurut Prebisch negara yang berkembang mengalami suatu kemerosotan sekuler dalam “term of trade”. Di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami gangguan serius karena kapasitas impor yang terus merosot. Kemerosotan ini memperlemah kemampuan industri produk primer yang ada untuk menopang pertumbuhan penduduk juga menggagalkan alih kemajuan teknik.

8.8 Kritik Terhadap Pandangan Yang Berlawanan

Semua kritik tersebut tidak memiliki fakta yang ada, maupun bukti yang mendukung bahwa kegiatan pembangunan di sektor ekspor telah merugikan suatu negara. Kenyataan yang kita lihat bahwa kegiatan investasi dari luar negeri sering tidak sejalan dengan investasi di dalam negeri. Maka dari itu pasar domestik dan kerja sama yang kurang memadai pada negara berkembanglah mendorong untuk melakukan investasi ke luar negeri pada sektor ekspor.

Tetapi Nurkse dalam (Jhingan, 2018) berpendapat bahwa dengan perdagangan internasional pertumbuhan mengalami peningkatan dan kejelasan serta dengan adanya modal dari luar negeri akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah yang melakukan pembelian, memberikan peningkatan pemasukan bagi negara dilihat dari pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan perdagangan internasional akan memberikan keuntungan yaitu meningkatkan perluasan ekonomi domestik.

Pengaruh faktor demonstration memberikan persepsi yang kurang baik bagi pihak terkait. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk mengimbangi standar hidup ke level yang lebih tinggi dan produk konsumen yang kategori mewah dapat difungsikan sebagai pendorong meningkatkan produktivitas negara miskin. Kondisi ini akan mendorong usaha jasa seperti penyediaan produk mewah. Dampaknya akan mendatangkan pengaruh yang baik untuk merangsang kreativitas dan inovasi usaha di lingkungan setempat.

Pendapat Prebisch tentang adanya kemerosotan sekuler dalam Term of trade di negara berkembang hanyalah rekaan belaka. Mula-mula bagi negara berkembang akan bergantung pada ekspor segelintir produk kebutuhan dasar. Selain itu, produksi negara hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan ekspor dunia yang berupa produk-produk pertanian dan pertambangan. Cairncross dalam (Jhingan, 2018), memperlihatkan bahwa pada tahun 1937, volume produk primer dari negara-negara industri agak sedikit lebih rendah dari tahun 1913, sementara ekspor dari negara-negara non industri lebih tinggi di atas 50 persen lebih.

Pada tahun 1950 terjadi perubahan mencolok ketika ekspor dari negara-negara lain menurun secara tajam. Pada tahun 1957 ekspor produk primer dari kedua kelompok tadi mengalami kenaikan 50 persen dalam volume ekspornya. Yang terakhir, pandangan ini lalai mempertimbangkan perubahan pola ekspor dan impor negara berkembang. Negara berkembang tidak lagi sebagai eksportir produk primer dan importir produk manufaktur.

Bab 9

Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

9.1 Pendahuluan

Manusia hidup dalam berbagai kelompok, akan tetapi menurut sosialisasi manusia, manusia juga perlu hubungan dengan orang lain. Kebutuhan semacam ini menyebabkan hubungan tidak hanya terbatas pada orang dan individu yang hidup berdampingan dalam satu kelompok, melainkan juga berusaha untuk berhubungan dengan individu lain dan dengan orang yang hidup dalam kelompok lain. Kelompok manusia ini di masa lampau merupakan komunitas yang sangat kecil seperti suku. Hubungan mereka muncul sebagai hubungan antar suku. Tetapi di zaman modern, kelompok manusia disesuaikan sebagai unit nasional. Selama periode ini, hubungan antar unit nasional menyebabkan munculnya hubungan internasional (Ghasemi, 2010).

Hubungan internasional merupakan studi tentang urusan luar negeri dan isu-isu global antar negara dalam sistem internasional, termasuk peran negara, organisasi antar pemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah (LSM) dan perusahaan multinasional (MNC) (Kaplan, 1962). Hubungan internasional adalah rangkaian masalah dan hubungan global yang terjadi antar bangsa, negara dan organisasi dalam kerangka sistem internasional (Ghasemi, 2010).

9.2 Pentingnya Hubungan Internasional

Manfaat hubungan internasional secara umum jika dilihat dari berbagai bidang adalah (Kemlu, 2015):

1. Manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
2. Manfaat politik, adalah untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang
3. Manfaat ekonomi, untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional
4. Manfaat sosial-budaya, yaitu untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan kejahatan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
5. Manfaat perdamaian dan keamanan internasional untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional
6. Manfaat kemanusiaan, adalah untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya
7. Manfaat lainnya, yaitu untuk meningkatkan peranan dan citra negara itu sendiri di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional.

9.3 Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

9.3.1 Wilayah Perbatasan

Sebagai konsekuensi hidup berdampingan dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sedikit banyak akan menimbulkan konflik-konflik perbatasan akibat belum tuntasnya penetapan secara pasti tapal batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Masih lemahnya pengawasan dan perhatian dari Pemerintah Pusat mengakibatkan berbagai konflik yang tak kunjung usai terkait dengan pelintas batas, pembalakan ikan, pembalakan kayu dan pembalakan bahan mineral. Jika dibiarkan berlarut-larut tentu akan mengancam perekonomian dan pembangunan Indonesia mengingat pembalakan yang dilakukan merupakan hasil alam Indonesia (Septarina, 2014).

Menurut Muradi (2015), setidaknya ada lima permasalahan yang menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan, yakni:

1. Semangat otonomi daerah yang pada kondisi penguatan demokrasi lokal relatif baik, namun pada pengembangan wilayah kedaulatan, pemerintah setempat melihat bahwa masalah pengamanan perbatasan adalah kewenangan pemerintah pusat.
2. Strategi dan postur pertahanan Indonesia masih pada visi teritorial, sehingga masalah perbatasan non-teritorial tidak terintegrasi dengan baik, karena minimnya Alutsista pendukung.
3. Infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim.
4. Minimnya dukungan anggaran bagi pengamanan perbatasan secara efektif menyebabkan kinerja dan profesionalitas petugas di lapangan menjadi rendah.
5. Visi pengamanan yang berorientasi pada pendekatan militer semata menjadi permasalahan tersendiri mengingat ancaman keamanan dan kedaulatan tidak lagi semata-mata berbentuk ancaman agresi militer, tapi lebih banyak pada ancaman nontradisional yang justru merupakan bagian dari domain penegakan hukum.

9.3.2 Globalisasi

Berbicara mengenai hubungan internasional, tidak akan terlepas dari globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan (Winarno, 2006). Beberapa ahli menyebutkan bahwa globalisasi akan memberikan manfaat positif bagi suatu negara. Kendati demikian, hingga saat ini Indonesia masih belum sepenuhnya merasakan manfaat globalisasi. Sejalan dengan keadaan tersebut, Suprijanto (2011) memaparkan empat (4) wilayah yang terpengaruh oleh globalisasi, yakni:

1. Ekspor

Globalisasi akan meningkatkan ekspor atau pangsa pasar dunia suatu negara. Disatu sisi, suatu negara juga dapat kehilangan pangsa pasar dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini, peringkat Indonesia di pasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang selama ini menjadi produk unggulan terus mengalami penurunan dibandingkan negara Cina dan Vietnam. Keadaan ini merupakan suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan pemerintah Indonesia.

2. Impor

Globalisasi juga akan memengaruhi kegiatan impor suatu negara. Dalam beberapa tahun belakangan ini, ekspansi dari produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia semakin besar. Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-pertokoan modern tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat di pinggir jalan. Jika peningkatan impor tidak dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri.

3. Investasi

Selain arus modal yang lebih bebas untuk masuk ke dalam suatu negara, globalisasi juga sangat memengaruhi arus investasi neto suatu negara. Indonesia hingga saat ini masih memiliki daya saing investasi yang rendah, sehingga arus modal ke dalam negeri semakin berkurang dan modal investasi domestik lari dari Indonesia yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia negatif. Kurangnya investasi juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam negeri.

4. Tenaga kerja

Melalui globalisasi, tenaga ahli dari luar negeri akan bebas masuk ke dalam negeri. Jika kualitas SDM Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing.

9.3.3 Aksi Terorisme

Hingga saat ini, Indonesia tidak pernah lepas dari masalah terorisme. Terorisme di Indonesia telah terjadi sejak dulu, tercatat pada tahun 1981 beberapa teroris membajak maskapai Garuda Indonesia yang menewaskan beberapa orang. Kejadian terorisme di Indonesia yang paling menyedot perhatian dunia yaitu insiden Bom Bali 1 pada Oktober 2002 dan Bom Bali 2 pada Oktober 2005 yang setidaknya menewaskan lebih dari 200 orang (Fransiskus dan Heliati, 2019).

Menurut Gupta dkk (2004), aksi terorisme yang berkepanjangan di suatu negara dapat sangat memengaruhi pendapatan dan pengeluaran yang pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Salah satunya adalah terorisme dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). Coe dan Helpman (1995) mengidentifikasi bahwa FDI memiliki peranan penting dalam transfer teknologi yang akan meningkatkan produktivitas dan akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi terorisme akan berdampak pada pengurangan posisi FDI di suatu negara karena adanya risiko terorisme tersebut. Selain itu, dampak terorisme terhadap ekonomi juga menyebabkan penurunan perdagangan

bilateral karena adanya kontrol perbatasan yang diperketat, dengan begitu akan memengaruhi keterbukaan perdagangan suatu negara (Nitsch dan Schumacher, 2004).

Isu terorisme dalam realitasnya telah menimbulkan citra negatif tentang Indonesia di mancanegara, yaitu antara lain Indonesia dipandang sebagai negara tidak aman dan dicap sebagai negara “sarang teroris”. Implikasi-implikasi meluasnya pandangan tersebut tercermin melalui kebijakan beberapa negara, seperti antara lain Amerika Serikat, Australia dan Jepang, yang mengeluarkan travel warning dan travel advisory yang ditujukan kepada warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia (Wuryandari, 2014).

9.4 Upaya Mengatasi Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

9.4.1 Wilayah Perbatasan

Sejauh ini, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian setiap sengketa internasional, termasuk sengketa perbatasan adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan dan mengedepankan penyelesaian secara damai sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 dan ketentuan hukum internasional lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan proses penetapan batas wilayah, pemerintah berupaya mengedepankan jalur perundingan sebagai pilihan dalam menciptakan kesepakatan bersama. Hal ini dipegang erat mengingat dalam perundingan, usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasional dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, menurut Muradi (2015), upaya lain yang dapat ditempuh oleh Indonesia untuk mengamankan wilayah perbatasan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian Sumber Daya Alam (SDA), seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal. Dalam banyak kasus, pencurian dilakukan dengan modus bekerja sama dengan masyarakat

lokal setempat, yang tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menggeser patok perbatasan serta merugikan negara miliaran rupiah. Selain itu, perlu juga dilakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap SDA, jalur kejahatan transnasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integrated data base pengamanan perbatasan negara.

2. Meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas. Dalam konteks ini sesungguhnya upaya untuk meningkatkan kualitas pos-pos lintas batas juga harus dibarengi oleh peningkatan kualitas kesejahteraan petugas jaga dan masyarakat di sekitar perbatasan.
4. Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan amunisi serta narkoba, dan penyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis. Keberadaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda), dan kemudian struktur BIN yang berada hingga di daerah harus menjadi penguat bagi kinerja intelijen secara umum guna mengkondisikan pengamanan perbatasan lebih baik lagi. Pada konteks ini sesungguhnya mengedepankan deteksi dini dan pendekatan militer sangat mungkin dilakukan, sebab menata pengamanan perbatasan juga selain dalam konteks penegakan hukum juga utamanya adalah dengan memperkuat deteksi dini guna meminimalisir ancaman kedaulatan di perbatasan.
5. Mengupayakan dan meningkatkan pembinaan wilayah, pembinaan teritorial serta pembinaan masyarakat di wilayah perbatasan. Langkah

ini dilakukan agar terjadi harmonisasi dan koordinasi yang efektif antar-instansi dan mengintegrasikannya bagi pengamanan perbatasan secara integral. Penguatan potensi pertahanan dan militer dapat dilakukan khusus di wilayah perbatasan. Hal ini salah satunya direspon oleh pimpinan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dengan meningkatkan status Komando Resor Militer dari sebelumnya dipimpin oleh perwira menengah berpangkat kolonel menjadi dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu.

6. Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekuensi patroli perbatasan di darat maupun laut. Intensitas dan dukungan infrastruktur yang baik adalah bagian dari bagaimana menjaga komitmen atas setiap jengkal wilayah kedaulatan Indonesia.
7. Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, jarkom, kendaraan patrol, dan alutsista. Medan yang sulit dan peralatan yang minim menjadi bagian permasalahan tidak efektifnya pengelolaan pengamanan perbatasan. Sehingga untuk mengefektifkan dan meminimalkan hal tersebut harus ditopang oleh kuantitas dan kualitas peralatan yang baik.
8. Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu. Belum maksimalnya pengelolaan pengamanan perbatasan disinyalir karena penganggaran terkait dengan hal tersebut masih bersifat sektoral. Dalam konteks ini sesungguhnya keberadaan sejumlah personil dari berbeda instansi akan lebih efektif apabila penganggarannya disatukan pada satu pos yang mana mencakup instansi-instansi tersebut dalam keterpaduan irama yang sama dalam pengamanan perbatasan. Konsekuensi dari itu adalah merealisasikan terbentuknya suatu badan atau lembaga pengamanan daerah perbatasan secara terpadu dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian segala bentuk kejahatan dan konflik yang mungkin terjadi di daerah perbatasan.

9. Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi dan telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang ada bukan hanya memberikan kemudahan bagi petugas dalam pengamanan perbatasan, tapi juga menstimulasi peran serta masyarakat dalam pengamanan wilayah negaranya. Dalam konteks ini peran Pemda menjadi sangat signifikan dan penting.
10. Mengintegrasikan dan/ atau merevisi peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan, dan penyusupan serta kejahatan transnasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan maupun yang bersifat perjanjian antar kedua negara.

9.4.2 Globalisasi

Menurut Nurhayati (2015), beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi adalah:

1. Meningkatkan daya saing ekonomi

Untuk meningkatkan daya saing, industrialisasi harus dilakukan dalam segala bidang karena hanya dengan industrialisasi penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan. Teknologi produksi adalah syarat utama untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Umumnya industrialisasi dilakukan oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan kemampuan entrepreneurship yang mumpuni. Namun, menarik para pemodal besar untuk berinvestasi di Indonesia jelas tidak mudah. Banyak faktor eksternal dan internal yang harus dibenahi. Stabilitas politik, pungutan liar, penegakan hukum, infrastruktur, dan lain-lain.

Penguatan ekonomi kerakyatan juga wajib dilakukan. Meskipun tidak bisa membawa perubahan secara drastis, tapi penguatan perekonomian bawah bisa meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi Indonesia.

2. Meningkatkan ekspor

Perlu adanya langkah cerdas dari kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku industri, seperti beban pajak yang tidak memberatkan, proses pengurusan usaha yang tidak membutuhkan banyak “meja” (aturan berbelit), meniadakan aroma korupsi birokrasi dalam pengurusan usaha. Kontribusi Pemerintah untuk mewujudkan produk dalam negeri yang berkualitas sangatlah menentukan.

Dalam dunia perindustrian, masalah tentang ketersediaan modal yang cukup, teknologi informasi yang memadai, dan tenaga kerja yang terampil di bidangnya serta diimbangi dengan keahlian pengusaha, organisasi dan manajemen perusahaan, pemakaian teknologi maju dan input lainnya akan memberikan andil yang besar dalam mencetak produk dalam negeri bermutu tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan ekspor.

3. Memberdayakan UMKM

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

4. Memperbaiki infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Kemampuan daya saing produk Indonesia menuntut ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Infrastruktur yang kurang maksimal akan memperlambat gerak laju ekspor berbagai produk.

Akibatnya kepercayaan permintaan luar negeri terhadap produk kita mengalami penurunan. Perlu disadari, bahwa infrastruktur di negeri kita masih jauh dari apa yang diharapkan. Masalah infrastruktur merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan sesegera mungkin.

9.4.3 Aksi Terorisme

Dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah merespon dengan beberapa kebijakan, di antaranya pemerintah membuat UU anti terorisme pada tahun 2003 yang kemudian diamandemen pada tahun 2018, kemudian pemerintah juga membentuk BNPT sebagai badan nasional yang khusus menangani masalah terorisme. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk pasukan khusus yang terjun langsung di lapangan guna menangani masalah terorisme tersebut. Pemerintah melalui POLRI, membentuk pasukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) (Kusuma dkk., 2019).

Kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah selama ini berada pada pilihan yang rasional dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan. Pendekatan kemanusiaan, dialogis dan preventif perlu dikedepankan mengingat hakikat ancaman keamanan terorisme bukanlah berasal dari ancaman asing berskala besar seperti yang diciptakan, tetapi bentuk dan aksi terorisme Indonesia dengan khas budaya Indonesia, yakni terorisme kampung.

Karena UU anti teror di Indonesia meniru UU anti teror berskala besar seperti milik Amerika Serikat dengan menggunakan cara dan pendekatan hard power yang represif dan menggunakan aktor militer, maka terorisme yang semula kecil dan bersifat “kampung” berubah menjadi sebuah kekuatan besar yang solid dan sulit untuk dikendalikan. Salah satu pilihan yang lebih meyakinkan adalah perlunya penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan terorisme (Mukhtar, 2016).

Peran masyarakat dalam berbagai bidang dalam pencegahan terorisme (Sidratahta, 2013):

1. Bidang Agama, Pendidikan dan Dakwah
 - a. Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kebangsaan remaja masjid, rohis dan aktivis dakwah kampus dengan membentuk secara khusus kader gerakan anti-terorisme dan penguatan sosialisasi bahaya terorisme ke para jamaahnya.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan kebangsaan untuk guru-guru pendidikan agama Islam terhadap ancaman terorisme agar disosialisasikan ke siswa-siswinya.
2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum
 - a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk kalangan pemuda agar memiliki kemandirian ekonomi, dengan harapan agar menutup peluang mereka terlibat dalam aksi terorisme.
 - b. Menyelenggarakan pentas budaya dan festival keraton nusantara dengan mengusung tema anti terorisme dan kecintaan terhadap realitas multikulturalisme.
 - c. Mengintensifkan kajian empat pilar kebangsaan dan Bhinneka Tunggal Ika untuk pemuda agar dijauhi dari sikap sektarianisme yang menyebabkan terjadinya aksi terorisme.
3. Bidang Pemberdayaan Media Massa, Humas dan Sosialisasi
 - a. Melakukan konsolidasi digital dengan membuat blogger cinta damai untuk kampanye pencegahan terorisme.
 - b. Membangun aliansi jurnalis yang aktif mempropagandakan semangat anti terorisme dengan pembentukan konsorsium tolak terorisme.
 - c. Membuat grup facebook, twitter dan website anti terorisme.
4. Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan
 - a. Mengadakan Porseni antar-remaja masjid dan aktivis dakwah kampus melalui olahraga dan seni.
 - b. Mensosialisasikan bahaya terorisme di kalangan ibu pekerja dan komunitas arisan.

- c. Membangun basis anti terorisme di institusi keluarga dengan membentuk korps keluarga anti terorisme.
- 5. Bidang Kajian dan Penelitian
 - a. Melakukan riset partisipatoris terhadap ideologi radikal.
 - b. Menerbitkan buletin, buku dan laporan penelitian mengenai sumber pendanaan terorisme.
 - c. Menyebarkan jejaring peneliti pemuda dengan menyusupkan ke jantung-jantung kelompok radikal sekaligus menyadap data, info dan dinamika ideologi aksi terorisme.

Bab 10

Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan pembangunan Nasional

10.1 Pendahuluan

Analisis ekonomi sangat berperan penting dalam merumuskan suatu kebijakan ekonomi yang sebenarnya harus diwujudkan terlebih dahulu untuk mengangkat nilai perekonomian. Dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pemerataan pendapatan antar daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal tersebut disebabkan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki yang pada umumnya berbeda antara satu dengan daerah lainnya. Oleh karenanya, informasi daerah yang lengkap, akurat dan terkini sangat diperlukan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut.

Mempertimbangkan penyebaran alokasi kegiatan-kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk penyebaran pusat pelayanan, juga mempertimbangkan perbedaan penyebaran potensi dan sumberdaya alam

yang dimiliki suatu daerah. Dari penyebaran tersebut dapat diketahui ketimpangan spasial yang terjadi merupakan Penentuan arah pembangunan suatu daerah daerah

10.2 Pengertian Kebijakan

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan (Steiner and Miner 1977).

Kebijakan sebagai: “a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan- tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik) (Knoepfel et al. 2007).

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam buku Solichin Abdul Wahab, agaknya lebih luas dan cukup rinci ketimbang pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, maka sapat disimpulkan bahwa arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan

untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kebijakan sangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

10.3 Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Adapun inti mengenai pembangunan minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan.

Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni, pertama yang berkaitan dengan nafkah hidup. Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, harga diri menjadi orang. Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya. Ketiga, sasaran pembangunan (Goulet 2006).

Setelah uraian pengertian dari kebijakan dan pembangunan yang dikemukakan tersebut maka menurut hemat penulis bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas/ taraf hidup masyarakat.

Penetapan kebijakan pembangunan berpedoman kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 angka 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 76, merupakan satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

10.4 Kebijakan Pembangunan Nasional

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan- akan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (levels of living) warga negaranya. Oleh sebab itu pembahasan-pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar pada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar atau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang.

Oleh karena itu, melalui pembangunan yang mengandung makna, terjadinya gerakan pertumbuhan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan pertumbuhan terencana dalam memaksimumkan tingkat kemakmuran masyarakat di masa kini maupun masa yang akan datang, diyakini dapat mewujudkan kehidupan yang serba lebih baik.

Kehidupan yang serba lebih baik dimaksud, mengandung tiga tujuan inti yakni:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup, tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap

kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Atas dasar pemikiran yang semacam inilah antara lain telah menimbulkan keyakinan, bahwa melalui „pembangunan“ dapat diwujudkan „kehidupan yang serba lebih baik“ sekaligus peningkatan „peningkatan kemakmuran masyarakat“

10.5 Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Konsep dasar pembangunan berawal dari pengembangan konsep pembangunan ekonomi yang sangat terkait dengan pendapatan (income), pertumbuhan (growth), dan investasi (investment). Konsep pembangunan tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih luas cakupan dan dimensinya. Motivasi yang mendasari pemikiran perlunya perluasan cakupan konsep pembangunan adalah adanya pemikiran akan terbatasnya peran dan fungsi pertumbuhan ekonomi yang semula dijadikan tujuan pembangunan.

Studi atau telaah pembangunan pada prinsipnya menggarap sungguh- sungguh terhadap masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Masalahnya terletak pada hasil pembangunan masa lampau, di mana strategi pembangunan ekonomi yang menitikberatkan secara pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat, ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Jurang si kaya dengan si miskin semakin melebar, penganggur, dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat. Problema dasar dari masalah kemiskinan, serta keadaan perumahan yang tidak memadai.

Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagian peningkatan interdependensi (saling ketergantungan) yang sangat timpang dalam sistem ekonomi dunia. Oleh karenanya dalam permulaan tahun 1970-an telah terjadi perubahan yang

luar biasa dalam persepsi pemerintah dalam strategi pembangunan yang penting. Di negara maju titik berat strategi pembangunan nampaknya ditekankan untuk mengalihkan pertumbuhan menuju kepada usaha-usaha yang menyangkut kualitas hidup.

Fokus perhatian pembangunan kemudian diperluas sehingga mencakup distribusi pendapatan (*income distribution*), kemiskinan (*poverty*), dan pemenuhan kepentingan umum (*public service*). Perhatian terhadap pemerataan pembangunan (*equity*) kemudian berkembang sejalan dengan berbagai perdebatan terkait hubungan antara ketimpangan pendapatan (*inequality*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan juga tidak luput dari perdebatan.

Sementara itu, teori pertumbuhan endogen yang berkembang di era 1980-an memfokuskan perhatian pada pentingnya kemajuan teknologi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Penelitian dan pengembangan teknologi diyakini mampu memfasilitasi investasi dan mengurangi biaya produksi. Sementara itu, di era 1990-an kemudian berkembang pembangunan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, di mana peningkatan pendapatan meski harus dicapai tetapi bukan satu-satunya tujuan pembangunan.

Paradigma pembangunan yang baru ini lebih menekankan pada sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa diukur dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dilengkapi dengan keterampilan dan sikap mental terhadap pekerjaan, serta kemampuan untuk berusaha sendiri merupakan modal utama bagi terciptanya pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dilakukan dengan:

1. Pendidikan Formal, jalur pendidikan ini terdiri dari pendidikan umum yang dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Pendidikan formal membekali seseorang dasar-dasar pengetahuan, teori dan logika, pengetahuan umum, kemampuan menganalisis serta pengembangan watak dan kepribadian. Selain pendidikan formal dengan memberi materi umum, juga ada pendidikan formal kejuruan.
2. Pendidikan informal, pendidikan yang berupa pelatihan ini semakin berarti dalam kegiatan ekonomi secara menyeluruh.

10.6 Hakikat Pembangunan

Nilai dan konsep pembangunan secara diakronis selalu mengalami perubahan dan pembaharuan (redefinisi) menuju pengertian yang dinilai lebih baik. Pada awal perkembangannya, pembangunan dipandang sebagai fenomena ekonomis semata, sehingga indikator-indikator pembangunan pun bersifat ekonomis. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak menjamin adanya perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan terbawah, maka lahirlah konsep baru pembangunan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa nafkah hidup yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) yang apabila tanpa itu maka hidup ini tidak mungkin berlangsung secara normal, misalnya: sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan. Apabila salah satu tidak ada maka akan terjadi keterbelakangan absolut. Dalam hal ini diperlukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi peningkatan pendapatan perkapita, penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengurangan ketidakmerataan pendapatan merupakan keharusan tetapi bukan syarat kecukupan bagi pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi hanya merupakan salah satu dimensi dari pembangunan. Oleh karena itu apabila pembangunan ekonomi ini yang dijadikan tujuan, maka akan mengaburkan wawasan holistik dan multidimensional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian perlu pembedaan konsep pembangunan dengan konsep pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan transformasi kuantitatif dalam kerangka sistem atau struktur yang ada, sehingga menyangkut pengertian kuantitas. Sedangkan pembangunan merupakan transformasi kualitatif, yang sering terkait dengan perubahan struktur atau sistem yang ada.

10.6.1 Dimensi-Dimensi Pembangunan

Pembangunan bersifat multidimensional, artinya pembangunan tidak semestinya hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dan mengabaikan dimensi yang lain. Oleh karena itu pendekatan pembangunan harus komprehensif dan multidisipliner. Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya

percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Jadi intinya adalah upaya perubahan dari suatu kondisi yang tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual (Todaro] 1990).

Apabila dikelompokkan, dimensi pembangunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dimensi sektoral dan spasial, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut.

Dimensi sektoral dalam pembangunan.

Dimensi ini meliputi: Dimensi pembangunan ekonomi Dimensi ini sangat luas cakupannya. Suatu masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan apabila pertumbuhan ekonomi- nya tinggi, yang diukur dari 1) kekayaan rata-rata, tercermin dalam GNP dan GDP per kapitanya, 2) pemerataan. Bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan disamping tinggi GNP dan GDP per kapitanya, juga ada pemerataan agar tak terjadi ketimpangan, 3) kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin pada rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf. Jadi pengentasan kemiskinan dan masalah kesempatan kerja termasuk dalam dimensi ini.

Dimensi sosial politik.

Dimensi ini menyangkut demokrasi dan persamaan. Di negara dimana rakyatnya lebih bebas berpendapat dan berkumpul, ada kebebasan pers, keterbukaan pemerintah, dan lembaga-lembaga negaranya dapat dipercaya maka negara tersebut cenderung memiliki penduduk yang lebih berkualitas. Pembangunan menghendaki situasi demokrasi. Masalah persamaan juga perlu dipertimbangkan dalam pembangunan. Persamaan tidak datang sendiri, tetapi harus diperjuangkan karena negara sebagai suatu kesatuan akan berjalan secara efisien dan lebih baik apabila aset produktif yang didistribusikan secara merata. Persamaan ini juga dalam arti gender.

Dimensi kependudukan dan lingkungan hidup.

Laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dapat menimbulkan persoalan. Menurut Todaro (1989) sasaran dalam persoelén Robert J. Chaskin melihat bahwa proses pengambilan keputusan dan sifat otoritas dalam perencanaan dihadapkan dengan ambiguitas mengenai faktor lingkungan setempat, representasi, peran dan harapan pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif lebih jauh dilakukan dan disisipkan untuk mewadahi keterlibatan

aktor yang sangat heterogen dalam proses perencanaan. Dinamika dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan sangat kompleks dipengaruhi konsensus, ideologi kolektif dan kebutuhan untuk menyelesaikan tahapan pembangunan (Chaskin, 2005).

Pada saat yang sama, pengambil kebijakan dihadapkan pada kekhawatiran tentang representasi dan interpretasi dari peran yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari adanya tekanan untuk melibatkan lebih banyak anggota penduduk, ingin berfokus pada tujuan jangka pendek atau jangka panjang, dan banyak pilihan lain. Untuk menengahi hal ini diperlukan negosiasi melalui mediasi untuk menerima kepentingan para pemangku kepentingan, sehingga dalam perencanaan pembangunan sudah selayaknya melihat kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan (Chaskin 2000).

10.7 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi

Analisa ekonomi dapat dibedakan atas tiga yaitu Ekonomi Deskriptif, Teori Ekonomi dan Ekonomi Terapan.

1. Ekonomi Deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya nyata dalam perekonomian. Yaitu suatu analisis ekonomi yang menggambarkan tentang kondisi yang sebenarnya terjadi dalam suatu perekonomian. Dengan cara inilah fakta-fakta yang terjadi dalam perekonomian yang sudah berjalan akan dianalisa. Memang terkadang hal ini masih cukup sulit untuk dilakukan karena terkadang sifat yang sebenarnya dari suatu keadaan dengan fakta yang terwujud dari situasi itu sendiri.

Penyebab lainnya adalah dikarenakan terwujudnya situasi atau kondisi dalam perekonomian itu berhubungan dengan individu-individu dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh apabila kita ingin menganalisis mengenai seberapa besar pengaruh kenaikan harga pangan. Hal ini cukup sulit diketahui karena produksi pangan juga dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain adalah faktor harga

barang lain, faktor keadaan ekonomi, faktor iklim, dan faktor-faktor lainnya.

2. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat-sifat hubungan yang nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang memengaruhinya mengalami perubahan. Yaitu suatu pandangan yang menggambarkan tentang hubungan prediksi dari kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, serta pengaruh-pengaruh yang memengaruhi perubahan tersebut.

Sekaligus teori ekonomi ini juga memberikan informasi tentang sifat utama dari sistem ekonomi dan apa yang menjadikan berfungsinya ekonomi itu. Dengan mendapatkan data berupa fakta-fakta ekonomi saja itu belum cukup untuk mempelajari ilmu ekonomi. Tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu membuat susunan secara sistematis dari fakta-fakta tersebut, sehingga gambaran umum tentang perekonomian yang sedang terjadi serta berbagai komponen pendukungnya dapat diketahui. Inilah tugas dari model analisis teori ekonomi.

3. Ekonomi Terapan (ilmu ekonomi kebijakan) adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Model analisis ekonomi berupa ekonomi terapan ini jika di masyarakat biasanya disebut dengan ilmu kebijakan ekonomi. Yaitu suatu sistem analisis yang digunakan untuk mencari pemecah masalah dan cara penerapannya untuk mengatasi berbagai macam masalah ekonomi yang terjadi.

Bab 11

Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

11.1 Pendahuluan

Semua negara yang ada di dunia ini tentunya ingin membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintahan negara tersebut. Agar apa yang dicita-citakan oleh suatu negara bisa terwujud, tentunya kebijakan pembangunan yang dilaksanakan harus terencana, terstruktur dan menyeluruh serta menerapkan strategi-strategi yang dapat mendukung dan mendorong terlaksananya kebijakan pembangunan tersebut secara optimal. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yaitu melalui kegiatan pembangunan ekonomi.

Menurut Todaro & Smith (2003) sebagaimana dikutip oleh (Arsyad, 2014), pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan berhasil dilihat dari 3 (tiga) nilai utama yang meliputi: 1) masyarakat mempunyai kemampuan yang berkembang dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, 2) rasa harga diri yang meningkat, dan 3) adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Dalam mewujudkan tiga nilai utama tersebut di atas tentunya tidaklah mudah, karena diperlukan strategi-strategi yang efektif, efisien dan optimal. Perancangan dan penerapan strategi pembangunan memiliki fungsi dalam memilih faktor atau unsur yang dapat dijadikan faktor atau unsur utama dalam menjalankan proses pembangunan.

Bila negara ini dapat disamakan dengan sebuah organisasi, maka strategi organisasi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang apa yang ingin dituju dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan keinginan organisasi tersebut (Arifudin, Opan., dkk, 2020). Dengan demikian, istilah strategi pembangunan ekonomi nasional merupakan langkah-langkah yang akan dituju oleh suatu negara dan bagaimana tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, yang meliputi kebijakan, program maupun kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan dalam pembangunan.

Indonesia, Negara tercinta kita ini merupakan contoh negara berkembang yang fokus terhadap penataan dan pembangunan ekonominya. (Sukirno, 2007), menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi adalah upaya merubah suatu kondisi dari terbelakang menjadi lebih maju, sehingga dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan ekonomi nasional dapat terlaksana mengacu pada apa yang diidam-idamkan oleh pemimpin bangsa kita, maka diperlukan perumusan strategi pembangunan ekonomi nasional yang matang dan dapat mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional berdasarkan pada penetapan visi & misi negara ini.

11.2 Tantangan Pembangunan Ekonomi Nasional

Bila diibaratkan negara ini adalah sebuah kapal besar, Pemerintah adalah nahkoda yang menjalankan kapal tersebut yang tentunya ingin mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan jangka pendeknya adalah agar bisa menjaga keadaan kapalnya agar selama perjalanan dapat terhindar dari berbagai ancaman. Kemudian, tujuan jangka panjangnya adalah agar nahkoda berupaya agar kapalnya bisa meraih tujuan yang diinginkannya. Dalam perjalanannya, tentu saja kapal tersebut akan menghadapi rintangan dan tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan suatu rencana dan strategi untuk

menghadapinya. Mengacu pada perumpamaan tersebut, mencapai kemakmuran, kesejahteraan lahir & batin bagi rakyatnya merupakan tujuan jangka panjang Pemerintah Indonesia, tetapi harus siap dalam menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi yang akan muncul yang merupakan masalah jangka panjang. Terciptanya iklim usaha yang bisa mendukung seluruh pihak atau kondusif yang harus diciptakan oleh Pemerintah merupakan tujuan jangka pendek (Kennedy, 2020).

Dalam perkembangannya, cukup banyak tantangan-tantangan yang harus diantisipasi dan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh kantor Staf Presiden RI (Pandjaitan, 2008) di antaranya adalah:

11.2.1 Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat pada tahun 2012 (6,03%) menjadi 5,02% pada tahun 2014, bahkan pada kuartal I 2015 menjadi 4,71%. Walaupun berdasarkan data BPS sebagaimana diwartakan laman ekonomi.bisnis.com, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5,17% pada tahun 2018 (Wildan, 2019).

11.2.2 Rendahnya Daya Saing

Bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, daya saing Indonesia masih di bawah mereka. Misalnya saja, berdasarkan data TEDI 2014-The Conference Board bahwa masalah produktivitas tenaga kerja tahun 2013 masih tertinggal di bawah Thailand dan Malaysia. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2013 dengan poin 28, ada di bawah Negara ASEAN lainnya, misalnya saja: Singapura (92), Malaysia (45) dan Thailand (34). Selanjutnya menurut Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat terendah di ASEAN pada tahun 2013 dari sisi kemudahan bisnis, yaitu pada urutan 120, masih berada di bawah Filipina di urutan 108, Vietnam di urutan 99, Thailand di urutan 18, Malaysia di urutan 6 dan Singapura di urutan 1 (Pandjaitan, 2008).

11.2.3 Kualitas Infrastruktur yang Kurang Baik

Berdasarkan data dari Bank Dunia, CLSA, Kementerian Transportasi Republik Indonesia, kualitas infrastruktur Indonesia kurang baik, dilihat dari: biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari total GDP, salah satu yang

tertinggi di regional dan biaya transportasi di Indonesia mencapai 14.1% dari seluruh biaya produksi, hampir 3x lebih tinggi dibandingkan Jepang (Pandjaitan, 2008).

11.2.4 Pelemahan Ekonomi Global

Berdasarkan data dari Bank Dunia, CLSA, Kementerian Transportasi Republik Indonesia, kualitas infrastruktur Indonesia kurang baik, dilihat dari: biaya logistik di Indonesia mencapai 27% dari total GDP, salah satu yang tertinggi di regional dan biaya transportasi di Indonesia mencapai 14.1% dari seluruh biaya produksi, hampir 3x lebih tinggi dibandingkan Jepang (Pandjaitan, 2008). Selain ke empat tantangan yang disampaikan oleh Kantor Staf Presiden RI tersebut di atas, tantangan pembangunan ekonomi yang ada saat ini adalah terkait pembangunan ekonomi di masa new normal (adaptasi Covid-19) dan hadirnya revolusi industri 4.0 beserta menuju masyarakat 5.0, di mana dibutuhkan kesiapan seluruh elemen, mulai dari Pemerintah, Swasta sampai dengan masyarakat.

11.3 Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

Saat masuk pada masa akhir 1960-an dan masa awal 1970-an mulai adanya suatu pemikiran dari para ahli ekonomi terkait tujuan inti dari aktivitas-aktivitas pembangunan ekonomi yang tidak lagi menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai yang terdepan, melainkan bagaimana caranya menurunkan angka kemiskinan & ketimpangan. Sebagian ahli ekonomi menyatakan bahwa kenaikan nilai GNP setiap tahunnya yang didasari oleh pertumbuhan belum dapat dijadikan solusi dalam mengatasi kemiskinan & ketimpangan, yang mengakibatkan dipertanyakannya kembali “arti” pembangunan (Arsyad, 2014).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, berikut adalah beberapa teori yang dapat diterapkan dalam strategi pembangunan ekonomi nasional.

11.3.1 Strategi Perencanaan Pembangunan (Pembentukan Modal dan Tabungan)

Bagi Indonesia, cukup banyak kendala yang ada dalam meningkatkan laju pembentukan modal, salah satunya adalah masalah kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat tabungan yang dikarenakan rendahnya pendapatan. Sehingga mengakibatkan rendahnya laju investasi yang berpengaruh terhadap modal dan produktivitas yang rendah. Kondisi tersebut sering diistilahkan sebagai “lingkaran setan kemiskinan”.

Menurut (Wibowo, 2008), cara untuk memangkas lingkaran setan tersebut salah satunya adalah melalui suatu pembangunan yang terencana, yaitu:

1. Melaksanakan “Industrialisasi yang diproteksi”, yaitu memperoleh modal dari luar negeri melalui pembangunan yang terencana.
2. Melaksanakan “Industrialisasi dengan kemampuan sendiri”, adalah melalui tabungan wajib yang dihimpun. Di mana pemikiran tersebut didasarkan pada: untuk perbaikan dan penguatan mekanisme pasar serta pengurangan pengangguran.

Maka, secara singkat bahwa diperlukannya perencanaan pembangunan adalah jalan terbaik dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam menghadapi kesenjangan distribusi pendapatan & kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita dibutuhkan suatu rencana yang baik yang berdampak pada peningkatan kesempatan kerja pembangunan secara keseluruhan.

11.3.2 Strategi Upaya Minimum kritis

Tesis terkait lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang diajukan oleh Arvey Leibenstein (dalam Arsyad, 1999) telah mencekam sebagian besar Negara Sedang Berkembang, sehingga menjadikan mereka tetap ada di tingkat keseimbangan pendapatan per kapita yang rendah. Solusi untuk masalah ini yaitu melalui pelaksanaan suatu upaya minimum kritis (*critical minimum effort*) tertentu yang dapat mengoptimalkan pendapatan per kapita di tingkat pada pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*) akan terjadi.

Selanjutnya, Leibenstein menyebutkan bahwa ketika kita mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang baik (steady economic growth) saat tahap transisi pada keadaan keterbelakangan menuju keadaan yang lebih maju dibutuhkan ketika suatu perekonomian perlu memperoleh rangsangan yang lebih besar atas pertumbuhan di atas batas minimum kritis tertentu. Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada hambatan dan rangsangan. Hambatan memengaruhi turunnya pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya, sedangkan rangsangan memberikan kecenderungan terhadap peningkatan pendapatan per kapita.

Menurut (Arsyad, 1999), telaahan yang dilakukan oleh Leibenstein ada di bukti empiris bahwa fungsi dari laju pendapatan per kapita adalah laju pertumbuhan penduduk. Bila naiknya pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan, maka akan menurunkan tingkat kematian, namun tidak bersama dengan turunnya tingkat kesuburan. Sehingga mengakibatkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Maka, terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan perkapita yang dapat mengoptimalkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi kecenderungan tersebut hanya pada poin tertentu saja. Apabila melewati poin dimaksud, peningkatan pendapatan perkapita dapat membuat tingkat kesuburan menurun dan ketika tahap maju telah dicapai oleh pembangunan, maka akan ada penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Pendapat Leibenstein itu berdasarkan atas telaahan Dumont tentang kapilaritas sosial, yang menyebutkan hasrat untuk mendapatkan banyak anak yang bisa akan berkurang bila adanya kenaikan pendapatan per kapita. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai kekuatan pendorong pendapatan adalah tingkat pendapatan perkapita, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penghambat pendapatan. Menurut Liebenstein tidak seluruh upaya minimum kritis tersebut harus dilaksanakan bersamaan. Usaha dimaksud dapat lebih efektif bila dibagi-bagi menjadi serangkaian upaya yang lebih kecil yang implementasinya pada perekonomian diatur secara optimal.

11.3.3 Strategi Pembangunan Seimbang

Strategi ini dapat didefinisikan sebagai pembangunan beragam jenis industri secara bersamaan (simultaneous) sehingga industri dimaksud dapat saling menghadirkan pasar bagi yang lain. Di samping itu, strategi tersebut bisa juga didefinisikan sebagai keseimbangan pembangunan pada berbagai sektor. Strategi ini meminta terciptanya pembangunan serentak serta harmonis pada

berbagai sektor ekonomi sehingga seluruh sektor berkembang bersama. Maka dari itu perlu adanya keseimbangan antara sektor penawaran dan permintaan.

Menurut Arsyad, (1999), pembangunan seimbang bisa diartikan sebagai upaya pembangunan yang bermaksud untuk merancang program investasi sedemikian rupa sehingga selama proses pembangunan tidak akan muncul halangan-halangan yang berawal dari penawaran maupun permintaan. Bila kita akan melaksanakan pembangunan seimbang, maka tahap investasi yang harus diupayakan besarnya jauh melebihi tahap investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pembangunan dilakukan.

Maka, strategi pembangunan seimbang dimaksud, disebut sebagai teori dorongan besar-besaran (*big push theory*) oleh sebagian ekonom.

1. Menurut Rosenstein-Rodan (Arsyad, 1999)

Pertama kali teori ini dicetuskan oleh Paul Rosenstein-Rodan (1953) dan diberi nama *the big push theory*, yang bergagasan untuk menghadirkan program pembangunan di Eropa Timur dan Tenggara melalui industrialisasi secara besar-besaran. Dalam hal itu, beragam industri perlu dibangun secara bersamaan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi seperti itu. Scitovsky mengartikan eksternalitas ekonomi sebagai jasa-jasa yang diperoleh dengan cuma-cuma oleh suatu industri dari satu atau beberapa industri lainnya. Menurut Rosenstein-Rodan (Arsyad, 1999), eksternalitas ekonomi dapat tercipta melalui pembangunan industri secara besar-besaran, yaitu:

- a. Disebabkan oleh perluasan pasar;
- b. Disebabkan industri yang serupa yang lokasinya berdekatan;
- c. Disebabkan adanya industri lain dalam perekonomian tersebut.

2. Menurut Scitovsky (Arsyad, 1999)

Pada teori keseimbangan atau disebut juga teori ekonomi konvensional, Scitovsky menyatakan bahwa eksternalitas ekonomi adalah perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain. Eksternalitas

ekonomi seperti itu disebut eksternalitas ekonomis teknologis (technological external economies).

Di samping itu hubungan saling terkait antara berbagai industri dapat menghadirkan eksternalitas ekonomis yang berhubungan dengan keuangan (pecuniary external economies) yaitu naiknya keuntungan yang didapatkan suatu perusahaan yang dikarenakan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan lain.

Disimpulkan oleh Scitovsky, bahwa berbagai industri yang terintegrasi secara menyeluruh dibutuhkan dalam menghapuskan perbedaan antara keuntungan perorangan (private profit) dan keuntungan masyarakat (public benefit). Scitovsky juga berpendapat jika mekanisme pasar tidak bisa menyatukan antar beragam industri yang sifatnya demikian. Maka dari itu, dia sependapat dengan Rosenstein-Rodan yang menyebutkan program pembangunan industri secara besar-besaran dan menciptakan suatu pusat perencanaan penanaman modal untuk melengkapi fungsi mekanisme pasar dalam mengatur alokasi sumberdaya-sumberdaya sangat diperlukan.

11.3.4 Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Menurut Arsyad (1999) Strategi pembangunan tak seimbang dikemukakan oleh Albert O. Hirschman dan Paul Streeten. Menurut mereka, pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di NSB.

Pola pembangunan tak seimbang ini, menurut Hirschman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Corak yang tak seimbang atas pembangunan yang terjadi secara historis;
2. Untuk meningkatkan efisiensi pemakaian ketersediaan sumberdaya-sumberdaya,
3. Pembangunan tak seimbang dapat menciptakan kemacetan (bottlenecks) atau gangguan-gangguan pada proses pembangunan tetapi dapat memberikan dorongan terhadap pembangunan selanjutnya.

Menurut Hirschman yang dikutip oleh (Arsyad, 1999), bila kita memperhatikan proses pembangunan yang berlangsung antara dua periode waktu tertentu akan terlihat bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang artinya juga bahwa jalannya pembangunan baik tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) bisa merangsang sektor lainnya. Demikian juga perkembangan dalam suatu industri tertentu bisa mendorong berkembangnya industri-industri lain yang kuat hubungannya dengan industri yang sedang berkembang tersebut.

Pembangunan yang tidak seimbang tersebut juga dianggap lebih cocok untuk dijalankan pada NSB, dikarenakan negara-negara itu dihadapkan pada masalah kurangnya sumberdaya. Melalui pelaksanaan program pembangunan tidak seimbang, maka upaya pembangunan di suatu waktu tertentu difokuskan pada beberapa sektor yang bisa menunjang penanaman modal yang berpengaruh pada berbagai sektor di periode selanjutnya.

11.3.5 Strategi Pembangunan Negara Industri Baru

William Overvolt (dalam Borthwick, 1992) memaparkan beberapa strategi yang secara umum didapatkan oleh negara industri baru terutama di Asia-Pasifik, yaitu:

1. Adanya rangsangan terhadap kebangsaan, jika dibutuhkan dapat membandingkannya dengan kekuatan negara maju;
2. Membersihkan lembaga-lembaga pemerintah;
3. Memberantas kejahatan, kekacauan dan kemandekan politik;
4. Memberantas kelompok penekan yang mengakibatkan patronase, korupsi & inflasi;
5. Menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan negara-negara industri maju dalam rangka mencari modal, pasar dan teknologi;
6. Membenahi supaya anggaran militer turun sedangkan anggaran pembangunan naik;
7. Mengalihkan diri pada pertumbuhan yang disebabkan ekspor;
8. Pembaruan pemerataan pendapatan: Langkah yang diambil antara lain melalui: reformasi pembagian tanah (landreform), industri padat karya (buruh murah, tekstil, pertanian dan barang elektronik) dan investasi pendidikan secara besar-besaran.

9. Menghadapi kelompok kiri dengan reformasi merakyat;
10. Menjamin terpenuhinya target perdagangan melalui pendirian perusahaan yang besar dan modern;
11. Memperoleh teknologi, modal dan perdagangan dari perusahaan multinasional dan bank internasional;
12. Menapaki tahapan-tahapan yang diawali pada sektor padat karya, misalnya pertanian dan bahan mentah, industri tekstil dan sepatu, industri ringan dan industri teknologi tinggi;
13. Penggunaan alat-alat authoritarian, bila dibutuhkan, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

11.3.6 Strategi Interaksi Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia atau human capital. Kinerja ekonomi akan lebih baik apabila didukung dengan modal manusia yang berkualitas tinggi. Kualitas modal manusia tersebut dapat dilihat melalui tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun hal-hal lainnya. Penelitian Ramirez, dkk (1998) sebagaimana dikutip oleh Brata (2002) tentang hubungan modal manusia & pertumbuhan ekonomi berawal dari latar belakang yang menyatakan masih terbatas serta kurangnya telaah dan penggalan masalah secara sistematis tentang *two-way relationship* antara modal manusia & pertumbuhan ekonomi terhadap unsur-unsur spesifik yang menghubungkan kedua aspek tersebut.

1. Pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi, khususnya melalui kegiatan rumah tangga & pemerintah, selain adanya peran masyarakat sipil, misalnya melalui organisasi masyarakat & lembaga swadaya masyarakat. Alokasi antar dan dalam lembaga-lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat kinerja ekonominya setara.
2. Pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dapat dipengaruhi oleh tingkat pembangunan manusia yang tinggi

melalui kapabilitas penduduk yang meningkat dan dampaknya adalah terhadap

3. Produktivitas & kreativitas mereka. Penyerapan dan pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan penduduk, baik kaitannya dengan teknologi hingga pentingnya kelembagaan bagi pertumbuhan ekonomi. Melalui pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi maupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Demikian juga, tingginya pendidikan akan menyebabkan modal sosial yang meningkat.

11.3.7 Strategi Baru Pembangunan Ekonomi

Hasan dan Azis (2018) menyebutkan ada 5 (lima) strategi baru dalam pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Strategi Pertumbuhan dan Distribusi. Adalah strategi pembangunan yang muncul akibat kegagalan pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi saja tanpa dibarengi dengan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat tidak akan memberikan arti pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan dan distribusi adalah strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi melainkan pula fokus terhadap distribusi pendapatan masyarakat.
2. Strategi Kebutuhan Pokok, adalah suatu strategi pembangunan yang mengacu pada kebutuhan pokok masyarakat yang terpenuhi. Kebutuhan pokok dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mencakup pangan, papan, dan sandang, tetapi, konsep tersebut untuk masing-masing negara adalah berbeda, sehingga makin maju dan kayanya suatu negara akan menyebabkan kebutuhan pokok yang semakin tinggi juga.
3. Strategi pembangunan mandiri, yang muncul sebagai antithesis dari strategi dependensi yang merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok modal melalui

utang luar negeri. Sebagai pencetus adanya strategi pembangunan mandiri adalah India pada masa pemerintahan Mahatma Gandhi, Tanzania pada masa pemerintahan Julius Nyerere, Cina pada masa pemerintahan Mao Zedong dan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Istilah mandiri di sini tidak hanya mandiri secara ekonomi melainkan mandiri dalam berbagai hal, sehingga inti dari strategi pembangunan mandiri adalah strategi pembangunan yang tidak tergantung pada negara lain.

4. Strategi Pembangunan Berkelanjutan atau *sustainable development*, yang muncul pada 1970 bersamaan dengan masalah lingkungan yang merebak. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup, mendorong beberapa negara untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang kerusakan lingkungan yang terjadi. Strategi tersebut adalah strategi pembangunan yang mengacu pada kepentingan dalam menjaga lingkungan. Nilai ekonomis bukan satu-satunya yang dikejar dari adanya pembangunan, tapi di lain sisi juga memperhatikan ekologi maupun sosial pada masa berikutnya.
5. Strategi Berdimensi Etnik atau *ethnodevelopment*, yang kemunculannya di latar belakang adanya perselisihan antar etnis. Perselisihan antar etnis berlangsung di negara yang terdiri dari bermacam macam etnis seperti ras, suku dan agama yang beragam (heterogen). Negara multi-etnis tersebut sangat sensitif pada konflik yang terjadi. Di negara-negara seperti pada wilayah Afrika dan Asia Selatan secara umum sering terjadi pertentangan dalam bentuk konflik kepemilikan atas tanah, konflik penguasaan sumber daya alam, konflik ketimpangan pembangunan, dan konflik penguasaan politik dan ekonomi.

11.3.8 Strategi Pembangunan Ekonomi dalam RPJMN 2020-2024

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, telah ditargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi 5,4-6,0 persen per tahun, tingkat

kemiskinan menurun menjadi 6,5-7 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 4,0-4,6 persen, dan Gini ratio mencapai 0,370-0,374. Untuk mewujudkan hal tersebut, direncanakan melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi pertumbuhan berkualitas yang menitikberatkan pada penambahan daya dukung & kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
2. Menumbuh kembangkan wilayah dalam rangka menurunkan kesenjangan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dasar dan optimalisasi ekonomi wilayah;
3. Menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing yang difokuskan pada penyediaan layanan dasar seperti layanan pendidikan berkualitas yang merata dan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang meningkat mengarah pada lingkup kesehatan semesta, memperkuat terlaksananya perlindungan sosial, mengoptimalkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengurangi kemiskinan, mengoptimalkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengontrol pertumbuhan penduduk;
4. Revolusi mental serta pembangunan kebudayaan melalui peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. Memperkuat infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membentuk lingkungan hidup, mengoptimalkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Bab 12

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

12.1 Pendahuluan

Gambaran umum kemajuan suatu bangsa dapat tercermin dari pertumbuhan ekonominya. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin maju pula negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah sistem ekonominya. Begitu pula yang dialami oleh negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam memulai sistem ekonominya.

Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara akan menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada prinsipnya, sistem perekonomian adalah sistem yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan dan mendistribusikan seluruh sumber sistem ekonomi suatu negara berbeda dengan sistem ekonomi negara lainnya adalah kemampuan negara tersebut dalam melakukan manajemen terhadap segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Di negara Indonesia, sistem perekonomian yang diterapkan adalah sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung makna bahwa sistem perekonomian di Indonesia harus berpedoman pada

Pancasila sebagai landasan utamanya. Dengan demikian, secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan ideal sistem ekonomi di Indonesia.



Gambar 12.1: Indonesia Menuju Negara Maju (Kementerian PPN/Bappenas 2020)

12.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah fase terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Hal ini merupakan hal yang sangat penting karena RPJMN 2020-2024 merupakan faktor yang berpengaruh dalam pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*). Negara MIC sendiri memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sesuai dengan RPJPN 2005-2025

Dalam RPJMN 2020-2024, terdapat empat pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN tahun 2020 – 2024 selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan



Gambar 12.2: Sasaran Pembangunan 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas 2020)

12.3 Ketidakpastian Perkembangan Ekonomi Global

Perkembangan ekonomi dunia cenderung masih akan dibayangi dengan risiko ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6 dan 3,8 persen per tahun, sepanjang tahun 2020-2024. Penurunan ekspor utama Indonesia juga diprediksi masih akan cenderung menurun, di

antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan perubahan permintaan dunia ke produk yang lain. Antisipasi seperti perang dagang, perlambatan ekonomi, dan tekanan kebijakan moneter yang beralih dari Kawasan Amerika ke Kawasan Eropa sangat penting untuk diantisipasi karena hal ini termasuk dalam risiko ketidakpastian di masa mendatang. (PPN/Bappenas, 2020a).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas yang dibarengi dengan tidak berjalannya transformasi struktural. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat, sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai, kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi, rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja, intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal, sistem inovasi yang tidak efektif, dan keterkaitan hulu-hilir yang lemah.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Kinerja perdagangan internasional Indonesia dipengaruhi oleh industri pengolahan yang tidak berkembang. Sampai dengan saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas dengan jasa transportasi asing, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen pada tahun 2000 menjadi 21 persen pada tahun 2018. Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mencapai 3 persen PDB, sementara beberapa negara sudah mencatatkan surplus. Di tengah kondisi keuangan global yang ketat, peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (Dowling, J. Malcolm; Chin-Fang, 2008).

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Selain itu, pertumbuhan aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum diiringi dengan upaya optimalisasi penerimaan negara serta pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi-transaksi tersebut. Hal ini penting mengingat transaksi digital bersifat *cross-country*.

Sasaran Makro Pembangunan

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan, perbaikan transformasi struktural menjadi salah satu kunci utama. Perbaikan transformasi tersebut didorong oleh revitalisasi industri pengolahan, dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.



Gambar 12.3: Sasaran Makro Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas 2020)

Menjaga Kesenambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan dorongan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,7 – 14,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7 – 12,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang bersifat berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan. (Rock, 2002) Dari sisi administrasi, akan terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan.

Dari sisi kebijakan, pemerintah akan terus melakukan penggalan potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Dorongan stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara (PPN/Bappenas, 2020b).



Gambar 12.4: Proyeksi Postur APBN 2020-2024

12.4 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Dokumen RKP 2021 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Adapun tujuh PN RKP 2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana Kerja Pemerintah 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi pemerintah pusat, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2021. Sedangkan bagi pemerintah daerah, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2021. (PPN/Bappenas, 2020b)

Sejak triwulan pertama tahun 2020 sampai dengan saat ini, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi ini telah menimbulkan distorsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia, ekonomi Indonesia juga terkena dampak negatif COVID-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi diperkirakan berdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan (Krueger, 1997). Pascapandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru, yang proses transformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area. (PPN/Bappenas, 2020a).

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan (Budiarta, Ginting dan Janner Simarmata, 2020). Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. Telemedicine dan e-commerce merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi COVID-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pascapandemi COVID-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, mall-online, konsultasi dokter online, dan pertemuan/pembelajaran online (Florida, 2014(Rumondang *et al.*, 2019; Ginantra *et al.*, 2020).

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital, sehingga konsumen, produsen dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital.

Tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait.

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 yaitu ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian pandemi COVID-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020

diperkirakan akan turun lebih rendah dari 1,0 persen, bahkan dapat menuju negatif (Dahliah; Kurniawan, Agus; Putra, 2020).

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Dari sisi PDB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,0-7,1 persen pada tahun 2021. Kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi pada tahun 2021 antara lain (1) penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan; (2) pemberian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan; (3) pemberian fasilitasi investasi (seperti percepatan perizinan berusaha di K/L/D melalui Online Single Submission/OSS yang sudah terintegrasi dengan K/L/D, (4) pemberian kemudahan untuk investasi berorientasi ekspor, serta (5) memberikan kemudahan dalam pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor (PPN/Bappenas, 2020a).

Kebijakan investasi juga akan diperkuat dengan pengawalan realisasi proyek-proyek besar di infrastruktur industri dan pariwisata, yang didukung upaya debottlenecking permasalahan operasional dan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain. Selain dari pihak swasta, peningkatan investasi juga harus dilakukan pemerintah termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur.

Selain investasi, ekspor barang dan jasa diharapkan kembali meningkat, tumbuh 3,5-5,1 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya aktivitas ekonomi dunia yang akan meningkatkan permintaan ekspor Indonesia. Selain itu upaya pembangunan pariwisata diharapkan dapat menarik kembali wisatawan mancanegara, meski belum sepenuhnya normal karena kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan penyebaran kembali COVID-19 dapat menyebabkan sektor ini pulih lebih lambat dibandingkan sektor yang lain.

12.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Ekonomi

Di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 disebutkan tema dan prioritas pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro- fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

12.6 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi

Kebutuhan Strategi Pembangunan Ekonomi

Salah satu di antara tujuan penting perencanaan ekonomi di Negara Sedang Berkembang (NSB) termasuk di Indonesia adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan peningkatan laju pembentukan modal dengan meningkatkan pendapatan, tabungan dan investasi. Indonesia menghadapi berbagai kendala sehubungan dengan peningkatan laju pembentukan modal ini, di mana salah satunya adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingkat tabungan yang rendah, karena tingkat pendapatan juga rendah. Konsekuensinya, laju investasi juga rendah dan berpengaruh pada modal dan produktivitas yang rendah. Keadaan ini sering disebut dengan “lingkaran setan kemiskinan” (Wibowo, 2008).

Pembangunan yang terencana dengan baik merupakan salah satu cara untuk memutus lingkaran setan ini. Pada prinsipnya terdapat dua cara untuk memotong lingkaran setan tersebut. Pertama, melakukan pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut “Industrialisasi yang diproteksi”. Kedua, menghimpun tabungan wajib yang disebut “Industrialisasi dengan kemampuan sendiri”. Dasar pemikiran timbulnya perencanaan tersebut untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar dan untuk mengurangi tingkat pengangguran.(Peters, Alan; Fisher, 2004).

Dengan demikian perencanaan pembangunan sangat diperlukan karena merupakan jalan terbaik untuk mengatasi kemiskinan di NSB dan Negara Indonesia pada khusus. Perencanaan yang baik sangat krusial untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, meningkatkan kesempatan kerja dan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan ekonomi merupakan usaha dari suatu pemerintahan untuk memengaruhi, mengarahkan serta mengendalikan perubahan variable-variabel ekonomi yang utama (misalnya PDB, konsumsi, investasi, tabungan dan lain-lain). Suatu rencana ekonomi dapat dianggap serangkaian sasaran (target) ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa mencakup secara keseluruhan maupun secara parsial (Kurniawan, Robii; Managi, 2018).

Proses Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Proses perencanaan ekonomi dilakukan melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahapan telah ditentukan target yang dicapai. Tahapan pertama adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, di antaranya untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Tahapan berikutnya yaitu mengukur ketersediaan sumberdaya yang langka selama periode tersebut, misalnya: tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih dan lain-lain.

Tahapan selanjutnya adalah memilih berbagai metode yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Dalam tahapan ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti: jalan raya, jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi dan lain-lain. Tahapan terakhir adalah mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional (Wibowo, 2008).

Perencanaan dan Implementasi Pembangunan Ekonomi

Untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita mencermati beberapa dokumen yang selama ini dijadikan landasan/rujukan strategi dan kebijakannya. Dalam GBHN termuat tentang Pola Umum dan Pola Dasar Jangka Panjang, yang sasaran utamanya adalah “terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sedangkan titik berat dalam rencana pembangunan jangka panjang tersebut adalah “pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat”.

Dalam pemerintahan sekarang, sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dilakukan, dokumen pembangunan pun berubah. Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun. RPJP ini merupakan penjabaran dari tujuan negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia

akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, jumlah penduduk yang semakin meningkat dan dinamika masyarakat yang semakin beraneka ragam (Resosudarmo, Budy P.; Kuncoro, 2006).

Pada bagian lain dikemukakan dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Sedangkan arah pembangunan jangka panjang (2005-2025) Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005 –2025. Visinya adalah “Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Sedangkan misinya adalah mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri dan mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.

Visi dan Misi tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka disusun sasaran pokok pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Struktur perekonomian yang kokoh di mana pertanian (dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.
2. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitar US \$ 6.000, dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 5 persen.
3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan ketahanan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Permasalahan yang dihadapi sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance). Sepanjang prakondisi tersebut belum disiapkan, akan sangat sulit bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita luhur

pembangunan tersebut. Masalah pemerintahan yang bersih yang menjadi salah satu tema Gerakan reformasi, ternyata masih dalam angan-angan. Berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas dalam birokrasi, legislatif, maupun dalam kekuasaan yudikatif. Saat ini telah terdapat kesan yang cukup kuat bahwa puncak pemerintahan mempunyai “political will”, untuk memberantas korupsi.

Namun demikian langkah tersebut tidaklah mudah. Jejaring korupsi yang sudah merasuk di setiap lini birokrasi, legislatif dan yudikatif dan juga BUMN-BUMN membuat upaya itu berhadapan dengan resistensi yang menumpulkan kebijakan-kebijakan anti korupsi tersebut. Simpul korupsi yang melibatkan antara oknum berbagai institusi juga akan menyulitkan pemberantasnya, karena adanya keinginan melindungi korps atau dapat mengancam stabilitas pemerintahan.

Sasaran pokok dalam arah pembangunan jangka panjang, yang menjadi catatan pokok yang harus diperhatikan adalah masih konservatifnya pemerintah dalam menetapkan target jumlah penduduk miskin di tanah air dan menyatakan “jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen” merupakan target yang menyiratkan masih belum adanya kesungguhan dan keberanian untuk menghapuskan atau paling tidak meminimalkan kemiskinan absolut di tanah air (Szirmai, 2005).

Berkaitan dengan struktur perekonomian yang kokoh, seharusnya lebih ditekankan lagi tentang sasaran untuk mengembangkan ekonomi rakyat yaitu melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional. Ekonomi dari sebagian besar rakyat Indonesia sejauh ini masih memberikan kontribusi relatif kecil dalam output nasional, demikian pula pangsa pasar yang dikuasainya. Namun demikian dari sisi jumlah pelakunya atau unit usaha serta penyerapan tenaga kerjanya, ternyata sangat dominan dibanding ekonomi usaha besar dan konglomerat. Peranan penting lainnya dari ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan modal investasi yang dihadapi Indonesia dapat diatasi dengan investasi padat tenaga kerja yang dapat menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja, sehingga dapat membantu mengatasi masalah pengangguran (Reese, 2012).

Daftar Pustaka

- [Kemlu] Kementerian Luar Negeri RI. (2015). Organisasi Internasional.
- Agustiati. (2015) "Sistem Ekonomi Kapitalis" Jurnal Ekonomi.
- Al Machmudi, M. I., (2020.) MEDIA INDONESIA. [Online]
- Al-Kaaf, Abdullah Z., (2012) "Ekonomi dalam Prespektif Islam", CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Arifin, B. (2013) Ekonomi pembangunan pertanian. PT Penerbit IPB Press.
- Arsyad, L. (1999) Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2014) Konsep dan pengukuran pembangunan ekonomi, Lincolin Arsyad. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Arsyad, Lincolin. (2016) "Ekonomi Pembangunan Edisi 5," Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Asian Development Bank, (1999) "Asian Development Outlook 1999", Asian Development Bank, Manila
- Available at: <https://mediaindonesia.com/humaniora/326479/menaker-masalah-ketenagakerjaan-saat-ini-adalah-pendidikan> [Accessed Februari 2021].
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2020a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010 – 2020. Available at: <https://www.bps.go.id/website/images/Indeks-Pembangunan-Manusia-2020-ind.jpg%0D%0D>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2020b) 'Indikator ekonomi', Buletin statistik bulanan. Available at:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2020c) Infografis Perkembangan Gini Ratio. Available at: <https://www.bps.go.id/website/images/Ketimpangan-Maret-2020-ind.jpg>.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2020d) Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Tahun 2020. Available at: <https://www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Rilis-Januari-2019-ind.jpg>.

Badan Pusat Statistik Indonesia (2020e) Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012 – 2019. Available at: <https://www.bps.go.id/website/images/Kemiskinan-Rilis-Januari-2019-ind.jpg>.

Badan Pusat Statistik, (2009) "Data Statistik Perekonomian Indonesia" Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Ball, L. and Mankiw, N. G. (1992) Relative-Price Changes As Aggregate Supply Shocks. 4168.

Bank Indonesia, (1998) "Statistik Perbankan Edisi September 1998" Bank Indonesia, Jakarta.

Basmar, E., (2011) "Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter di Indonesia" Jurnal Manajemen Progresif Vol 5, 1 Agustus 2011.

Basmar, E., (2014) "Analysis of The Monetary Policy on The Stability of Economic Growth in Indonesia" Northern Illinois University Amerika Serikat.

Basmar, E., (2018a) "Analisis Pengaruh Capital Adequatio Ratio Terhadap Kinerja Perbankan Pada Masa Krisis" Nitro Institute Of Banking and Finance Makassar.

Basmar, E., (2020a) "Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengguran Di Indonesia", Jurnal Mirai Management, Vol. 6, No.1, pp 76-85.

Basmar, E., dan Rachmat S., (2020b) "Impact Of Financial Activities On The Welfare Of Farmers In Bulukumba", SEIKO Journal Of Management and Business, Vol. 3, No. 2, pp 37 – 45.

- Basmar, E., (2018b) "Assymetric Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Suku Bunga Deposito di Indonesia" Universitas Fajar 1 (1) pp 1-17.
- Basmar, E., (2018c) "The Analysis of Financial Cycle and Financial Crisis in Indonesia" Universitas Hasanuddin Makassar.
- Basmar, E., Carl M. C., Hasniaty, Erlin B., (2018d) "The Effect Of Interest Rates On The Financial Cycle In Indonesia", Advence in Economics, Business and Management Research Journal, Atlantis Press, Vol. 75, pp 99-102
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2015) "Dampak Krisis Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Jurnal Analisis Seri Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol 4 No 2, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2017) "Do The Bank Credit Cause The Financial Crisis In Indonesia" Scientific Research Journal, Vol. V, Issue X, pp 36-38.
- Basri, F., (2020). Faisal Basri. [Online] Available at: <https://faisalbasri.com/2020/01/19/sesat-pikir-omnibus-law/> [Accessed Februari 2021].
- Bhudianto, Wahyu, (2012) "Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian" Jurnal Transformasi, Vol.XIV, No. 22 Tahun 2012.
- Borthwick, M. (1992) STRATEGI-STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI ASIA PASIFIK, Pacific Century: The Emergence of Modern Pacific Asia. Boulder: Westview Press.
- BPS, (2020). Badan Pusat Statistik. [Online] Available at: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html> [Accessed Februari 2021].
- Brata, A. G. (2002) 'Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN', Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), pp. 113–122.
- Budiarta, K., Ginting, S. O. dan Janner Simarmata, J. (2020) Ekonomi dan Bisnis Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Candra Taufik. Amirudin (2015) 'Analisis Pertumbuhan dan Pengembangan Sektor Potensi di Kota Makassar'.

- Cateora, P. R. and Graham, J. L. (2007) *Pemasaran International*. Ketigabel. Edited by M. Budiarti. Jakarta: Salemba Empat.
- Chaskin, Robert J. (2000). "Building Community Capacity: A Definitional Framework and Case Studies from a Comprehensive Community Initiative." *Urban Affairs Review*.
- Chaudhry, Muhammad S., (2012) "Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar" Kencana, Jakarta.
- Coe, D. T. and Helpman, E. (1995) 'North-south R&D spillovers', *European Economic Review*, 39(5), pp. 859–887. doi: 10.1111/1468-0297.00146.
- Cornelis R., (1995) "Perekonomian Indonesia" Liberty, Yogyakarta.
- Corsetti, G., Pesenti, P., Roubini, N., (1999) "What Caused The Asian Currency and Financial Crisis ? Japan and The World Economy", Vol 11, pp 305-373.
- D.F. Griffith, (1984) "What Is Socialism? A Symposium" London.
- Dafflon, B. (2010) 'Responsibility To Fiscal Discipline'.
- Dahliah; Kurniawan, Agus; Putra, A. H. P. K. (2020) 'Analysis and Strategy of Economic Development Policy for SMEs in Indonesia', *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(5), pp. 103 – 110.
- Demirguc K, Asli, Levine R., (1998) "Financial Structure Across Country : Stylized Facts" Policy Research Working Paper No. 2143, World Bank, Washington D.C.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, (2009) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008-2009" Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Komunikasi dan Informatika, (2008) "Memahami Krisis Keuangan Global : Bagaimana Harus Bersikap" Badan Informatika Publik Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta.
- Dowling, J. Malcolm; Chin-Fang, Y. (2008) 'Indonesian economic development: Mirage or miracle?', *Journal of Asian Economics*, 19, pp. 474–485.
- Dumairy, (1996) "Perekonomian Indonesia" Erlangga, Jakarta.

- Edison, H.J., Levine, R., Ricci, L., Slok, T., (2002) "International Finance Integration and Economic Growth", National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 9164.
- Ekananda, M. (2014) *Ekonomi Internasional*. Edited by N. I. Sallama. Jakarta: Erlangga.
- Elena, M., (2020). *Bisnis.com*. [Online] Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201222/12/1334167/menaker-uu-ciptaker-akan-jadi-key-driver-pemulihan-ekonomi-2021> [Accessed Februari 2021].
- Fakhrudin, U. (2008) 'Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang', *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Available at: <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>.
- Farida, Ai S., (2011) "Sistem Ekonomi Indonesia" Pustaka Setia, Bandung.
- Ferinia, R. et al. (2020) *Komunikasi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Florida, R. (2014) 'The Creative Class and Economic Development', *Economic Development Quartely*, 28(3), pp. 196–205.
- Fransiskus, M. and Heliati, R. (2019) 'Keterkaitan Antara Terorisme Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 1985-2017', *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 19(1), pp. 61–72.
- Ghasemi, H. (2010) 'Globalization and International Relations : Actors Move from Non-cooperative to Cooperative Games', *Jurnal Global dan Strategis*, 4(1), pp. 1–13.
- Gilarso T., (2014) "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro". Kanisius, Yogyakarta.
- Ginantra, N. L. W. S. R. et al. (2020) *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Goulet, Denis. (2006). *Development Ethics at Work: Explorations - 1960-2002*. Development Ethics at Work: Explorations - 1960-2002.
- Gregory G, (2004) "Sistem-Sistem Ekonomi" Cetakan Ketiga, PT Bumi Aksara, Jakarta.

- Gunawan, H., (2020). lokadata. [Online] Available at: <https://lokadata.id/artikel/pengangguran-melonjak-jutaan-pekerja-masuk-sektor-pertanian> [Accessed Februari 2021].
- Gupta, S. et al. (2004) 'Fiscal Dimensions of Armed Conflict in Low and Middle-income Countries', *European Journal of Political Economy*, 20(2), pp. 403–421.
- Gwartney, J. D. et al. (2011) *Microeconomics*. 13th edn. Masin, USA: South-Western Cengage Learning.
- Harahap, I. (2019) 'Ekonomi pembangunan: pendekatan transdisipliner'.
- Hasan, M. and Azis, M. (2018) 'Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal'. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hasan, M. and Azis, M. (2018) *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makasar: CV. Nur Lina.
- Herman, (2021). Berita Satu. [Online] Available at: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/722943/minim-kesempatan-kerja-penyebab-pergeseran-penduduk-ke-luar-jawa-lambat> [Accessed Februari 2021].
- Hoessin, B., (2001). *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Huda, N. (2017) *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- International Monetary Fund, (1998) "World Economic Outlook" September 1998
- Jain, S. C. (2001) *Manajemen Pemasaran International*. 5th edn. Edited by Y. Sumiharti. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan (2010) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Jhingan, M. . (2018) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Pertama. Depok: Rajawali Pers.
- Jhingan, M. L. (2016) 'Ekonomi pembangunan dan perencanaan'.

- Kaplan, Morton. (1962) *System and Process in International Politics*. New York: Wily.
- Knoepfel, Peter, Corinne Larrue, Frédéric Varone, and Michael Hill. (2007). *Public Policy Analysis Public Policy Analysis*.
- Krueger, A. O. (1997) *Trade Policy and Economic Development: How We Learn*. 5896. Cambridge.
- Kuncoro, M. (1997) *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit Dan Percetakan PN.
- Kuncoro. Mudrajad (2010) *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STMI YKPN.
- Kuncoro. Mudrajad (2014) *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Akademi Peremajaan Perusahaan. Yogyakarta: YKPN.
- Kurniawan, Robii; Managi, S. (2018) 'Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 64(5), p. 25.
- Kusuma, A. J. et al. (2019) 'Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial', *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Sosiohumaniora*, 21(3), pp. 333–341.
- Lestari, R., (2020). *Ekonomi Bisnis*. [Online] Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201202/620/1325330/oecd-pangkas-pertumbuhan-global-2021-jadi-42-persen> [Accessed Februari 2021].
- Malleson, T., (2014). *After Occupy: Economic Democracy for the 21st Century*. s.l.:Oxford Scholarship.
- Mankiw, N. G. (2012) *Principles of Economics 6th Edition*, Cengage Learning.
- Marzuki I., Edwin B., (2021) "Covid 19 Seribu Satu Wajah", Yayasan Kita Menulis. Medan
- Mccann, Eugene J. (2012). "Revue Interventions Économiques." *Revue*.
- Mukhtar, S. (2016) 'Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme Dalam Era Demokratisasi', *Jurnal Reformasi*, 6(2), pp. 143–153.
- Mulyani, E. et al. (2017) *'Ekonomi pembangunan'*. UNY Press, Yogyakarta.

- Munthe R.N., Mardia, Nur A.N., Edwin B., Ahmad S., Anita F.P., Yuliasnita V., Eko S., Arfandi S.N., Abdul R., Darwin D., Bonaraja P., Hasyim, (2021) "Sistem Perekonomian Indonesia", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 41-62.
- Muradi (2015) 'Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia', Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1), pp. 25–34.
- Murni. Asfia (2016) EKONOMI MAKRO. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nastiti, A., (2020). The Conversation Bisnis Ekonomi. [Online] Available at: <https://theconversation.com/mengapa-uu-cipta-kerja-tidak-menciptakan-lapangan-kerja-tapi-memperkuat-oligarki-147448> [Accessed Februari 2021].
- Nitsch, V. and Schumacher, D. (2004) 'Terrorism and international trade: An empirical investigation', European Journal of Political Economy, 20(2), pp. 423–433.
- Nurhayati, D. (2015) 'Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global di Bidang Ekonomi', Heritage, 3(1), pp. 33–48.
- Nurkse, R. (1953) Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford: Basic Black Weel.
- Opan Arifudin. Rahman Tanjung. Yayan Sofyan (2020) Manajemen Strategi : Teori dan Implementasi. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Pandjaitan (2008) 'Strategi Pembangunan Ekonomi', in. Jakarta: Kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
- Pangiuik, Ambok, (2011) "Kepemilikan Ekonomi Kapitalid Dan Sosial (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam" Jurnal Nalar Fiqih, Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 4, No 2.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Peters, Alan; Fisher, P. (2004) 'The Failures of Economic Development Incentives', Journal of the American Planning Association, 70(1), pp. 27–37.
- Posma Sariguna Johnson Kenedy (2020) Modul ekonomi pembangunan. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- PPN/Bappenas, K. (2020a) Narasi Rencana Kerja Pemerintah 2021. Jakarta.

- PPN/Bappenas, K. (2020b) Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Qardhawi, Yusuf (2004) "Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam", Rabbano Press, Jakarta.
- Rahayu, S. A. T. (2017) 'Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000)'.
- Rawan (2014) Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPEE.
- Rayi K., (2011) "Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli Beserta Macam-Macam Sistem Ekonomi" September 2011.
- Reese, L. (2012) 'CREATIVE CLASS OR PROCREATIVE CLASS: IMPLICATIONS FOR LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY', Theoretical and Empirical Research in Urban Management, 7(1), pp. 5–26.
- Resosudarmo, Budy P.; Kuncoro, A. (2006) 'The Political Economy of Indonesian Economic Reforms: 1983–2000', Oxford Development Studies, 34(3), pp. 341–355.
- Rinaldi, M. and Rahmadana, M. F. (2020) 'Determinant analysis of household income inequality and poverty in Indonesia', International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2).
- Rock, M. T. (2002) The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia. 632. Michigan.
- Roubini, Nouriel, (2016) "Kapitalisme Yang Layak Suatu Cetak Biru Reformasi Ekonomi Kita" Friedrich Ebert Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta.
- Rumondang, A. et al. (2019) Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- S, L. A., (2017). PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. SELAT, Oktober, 5(1), pp. 74-87.

- Safitriani, S. (2014) 'Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment Di Indonesia', 8(1), pp. 93–116.
- Sari, A. R., Hakim, D. B. and Anggraeni, L. (2014) 'Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Utama', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(2), pp. 111–135. doi: 10.29244/jekp.3.2.111-135.
- Sentosa, Sri Ulfa. (1991) "Pembentukan Modal Dalam Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang" IKIP Padang
- Septarina, M. (2014) 'Sengketa-Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Indonesia', *Al'Adl*, 6(11), pp. 1–8.
- Siagian, V., Muhammad F.R., Edwin B., Pretiwi B.P., Lora E.N., Nur A.N., Robert T.S., Endang L., Elisabeth L.M., Hengki M.P.S., Agustian B.P., Bonaraja P., (2020) "Ekonomi dan Bisnis Indonesia", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-54.
- Singer, H.W. (1949) "Economic Progress in Underdeveloped Countries," *Social Research The Johns Hopkins University Press. JSTOR*, 16(1), hal. 1-11.
- Siregar P.A., Supriyani, Luthfi P., Astuti, Khairul A., Hengki M.P.S., Rosintan S., Elly S., Irdawati., Eko S., Misnawati, Bonaraja P., Sudang S., Hasyim, Edwin B., Arfandi S.N., (2021) "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 209-238.
- Siswanti I., Conie N.B.S., Novita B., Edwin B., Rahmita S., Sudirman, Mahyuddin, Luthfi P., Laura P., (2020) "Manajemen Risiko Perusahaan", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-58.
- Sjafrizal (2008) *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Baduouse Media.
- Soleh, A. dan M. H. S. (2017) 'Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Hubungannya dengan Kesempatan Kerja dan Investasi di Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*', 7(1).
- Steiner, George A., and John B. Miner. (1977). "Management Policy and Strategy." *Health Care Management Review*.
- Subandi, (2011) "Sistem Ekonomi Indonesia" Alfabeta, 2011.
- Subandi, M. (2011) 'Developing Islamic economic production', *Science Technology and Development*, 31(4), pp. 348–358.

- Sukirno, S. (2007) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Sukirno, Sadono. (2008) “Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan,” Jakarta: Kencana.
- Suprijanto, A. (2011) ‘Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia’, *Jurnal Imiah CIVIS*, I(2), pp. 100–119.
- Supriyanto, (2009) ”Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol.6 No.2 November 2009.
- Suroso, (1997) ”Perekonomian Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyono, B. & HernawaN, H., (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja pada Industri Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan. *Ekomaks*, 2(2), pp. 1-15.
- Szirmai, A. (2005) ‘Developing countries and the concept of development’, in *The Dynamics of Socio Economic Development: An Introduction*, pp. 1–10.
- Tarigan (2014) *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tho’in M., (2015) ”Konsep Ekonomi Islam Jalan Tengah (Kapitalis-Sosialis)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No, 03, November 2015.
- Todaro, [Michael P. (1990). “Economic Development in the Third World, Fourth Edition.” *Population and Development Review*.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2011) *Pembangunan Ekonomi*. Kesebelas. Edited by A. Maulana. Jakarta: Erlangga.
- Trialdi L., I Kadek D.S.A., Joko A., (1999) ”Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juni 1999.
- Wardhan, M. & D. (2020) ‘Covid-19 Outbreak and Development Planning in Indonesia’, *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(1).
- Wibowo, E. (2008) ‘Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia’, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(1), pp. 16–24.
- Wildan, M. (2019) *Bank Dunia: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2019 Terjaga pada Level 5 Persen*, 10 Oktober. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191010/9/1157640/bank-dunia->

pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2019-terjaga-pada-level-5-persen
(Accessed: 2 February 2021).

- Winarno, Budi. (2006) *Globalisasi Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*. Penerbit Erlangga:Jakarta
- Witjaksono, M. (2009) 'Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan: Telaah istilah dan orientasi dalam konteks studi pembangunan', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1).
- Wuryandari, G. (2014) 'Politik luar negeri indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional', *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), pp. 71–83.
- Zaki, Khozin, (2017) "Sistem Ekonomi Islam"Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Biodata Penulis



Dr. Bonaraja Purba, M.Si, Lulus Sarjana Pendidikan (S1) dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Ilmu Ekonomi (S2) dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor Ilmu Ekonomi (S3) juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini selalu aktif menulis jurnal nasional dan jurnal internasional, buku ajar dan buku referensi, dan berkarir sebagai Dosen Tetap dan Peneliti di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Telah menulis lebih dari 50 judul Buku Ekonomi, Manajemen, Agribisnis, dan Pendidikan, yang telah diterbitkan oleh berbagai Penerbit.



Dr. Muhammad Fitri Rahmadana, SE., M.Si, lahir di Medan pada tanggal 14 September 1977. Ia menyelesaikan kuliah dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi UMSU tahun 2000. Meneruskan studinya dan memperoleh gelas Magister Sains bidang Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala tahun 2004. Kemudian menyelesaikan program doktor Ilmu Perencanaan Wilayah pada tahun 2012 di Universitas Sumatera Utara. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan sejak tahun 2005 sampai sekarang. Kegiatan lain penulis saat ini adalah menjadi salah satu Wakil Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2016. Selain itu penulis juga menjadi konsultan pada lembaga konsultan Banyaneer yang berdomisili di Adelaide – Australia untuk monitoring dan

evaluasi, baseline, midline dan endline survei yang dilakoninya sejak tahun 2010.



Edwin Basmar, lahir di Makassar, menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, serta mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.



Diana Purnama Sari, SE. Karyawan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang Bukittinggi. Penulis dilahirkan di Pilubang, 22 Mei 1996. Penulis adalah karyawan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Andalas di Padang Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Penulis sedang melanjutkan kuliah S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Syariah. Penulis menekuni bidang ilmu ekonomi dan juga perbankan. Penulis dapat dihubungi melalui email dianaps369@gmail.com atau nomor telepon 085265319369.



Antonia Klara, dilahirkan di Biak, Papua. Saat ini adalah pengajar pada FEB- Uncen, menyelesaikan pendidikan di FEB-Uncen tahun 2003 dan melanjutkan Pasca Sarjana di Magister Sains-UGM Yogyakarta tahun 2009. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di UB Malang. Mengajar pada mata kuliah Matematika Ekonomi, Ekonomi Internasional dan Ekonomi Ketenagakerjaan



Darwin Damanik, SE, MSE. lahir di Jakarta, 28 Desember 1981. Ia menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (FE UNILA) pada tahun 2005. Selanjutnya, ia merampungkan studi S-2 di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2008. Saat ini, ia tengah menempuh studi doktor (S-3) di Jurusan Ilmu

Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Tak hanya itu, ia juga beraktivitas sebagai Dosen Tetap dan juga menjabat saat ini sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (FE USI) di Kota Pematangsiantar. Mata kuliah yang diampunya adalah Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, dan Perekonomian Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Pengantar Ekonomi Makro (Citapustaka Media, 2014) dan Buku Kolaborasi "Sistem Perekonomian Indonesia (Kita Menulis, 2020). Penulis dapat dihubungi melalui email: darwin.damanik@gmail.com.



Annisa Ilmi Faried. Menamatkan S2 ke Megister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, sedang mengikuti studi lanjutan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Sedang proses pembuatan disertasi. Bekerja menjadi staf pengajar pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dari tahun 2012 sampai sekarang. Menjadi staf ahli bidang kependudukan dan kebudayaan di Lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan mengikuti beberapa judul penelitian. Aktif memasukkan jurnal nasional

maupun internasional. Sudah mengeluarkan berbagai buku dengan judul Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia, Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan : Teori-Teori Dasar Ekonomi. Saya juga menulis beberapa buku kolaborasi dengan beberapa dosen di berbagai

universitas yaitu Kewirausahaan UMKM, Teaching From Home Dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar, Pandemi covid 19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Belajar Dari Covid-19 Perspektif Ekonomi & Kesehatan, Kita Menulis : Merdeka Menulis, Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan. Semua buku sudah memiliki ISBN, E-ISBN dan HKI. Semoga para pembaca bisa menambah khazanah dari buku ini.



Dr. Darwin Lie, S.E., M.M., Lahir di Kota Pematangsiantar, 10 Januari 1963. Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Simalungun Tahun 1988. Melanjut studi Magister (S-2) di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara lulus pada tahun 2004. Tahun 2010 melanjutkan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan lulus bulan Juni tahun 2012. Saat ini aktif mengajar dan menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung.



Nadia Fazira, S.E, M.Sc. Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (FE UNAND) tahun 2016. Lulus S2 di Program Magister Sains Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) tahun 2018. Saat ini merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fort De Kock (FEB UFDK).



Noni Rozaini lahir di Medan 2 juli 1978, menamatkan jenjang S1 di UNRI tahun 2000, melanjutkan ke jenjang S2 di UNSYIAH selesai tahun 2005 dan mendapatkan gelar Dr di UINSU tahun 2018 . terlahir sebagai anak seorang guru, sekarang saya juga menjadi staff pengajar di FE UNIMED dan PPS UNIMED



Rahman Tanjung lahir di Karawang 12 Januari 1981. Menikah dengan Neng Sri Ekawati dan saat ini dikaruniai 2 anak, Azka dan Azkia. Penulis saat ini bekerja sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDM Kabupaten Karawang dan juga aktif mengajar di STIT Rakeyan Santang Karawang.

Menamatkan pendidikan dasar di SDN Nagasari VII Karawang, jenjang menengah pertama di SMPN 2 Karawang, menengah atas di SMAN 1 Karawang dan melanjutkan Pendidikan jenjang sarjana di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UNSOED Purwokerto, kemudian S2 Magister Manajemen dengan konsentrasi MSDM di STIE Kampus Ungu Jakarta dan saat ini sedang menempuh studi doktoral (S3) di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.

Penulis sudah menghasilkan beberapa judul buku diantaranya Manajemen Humas Lembaga Pendidikan, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Konsep dan Perkembangan), Manajemen Pemasaran Pendidikan, Manajemen Strategi dan Manajemen Mitigasi Bencana. Saat ini penulis aktif menulis jurnal ilmiah nasional maupun internasional.



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Dia menyelesaikan kuliah di Program Diploma III Pajak dan mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan pada tahun 1999 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 9 September 1999. Setelah mengawali karir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Oktober 1999, dia melanjutkan studi Program Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan mendapat gelar Sarjana Sains Terapan pada 3 Februari 2006. Selepas lulus, kemudian

diangkat menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Pada tahun 2011, dia mendapatkan beasiswa S2 dari Australia Development Scholarships (ADS) sampai akhirnya mendapatkan gelar Master of Public policy and Management di The University of Melbourne, Australia. Setelah lulus, ditempatkan di Kantor Pusat DJP selama hampir 3 tahun. Setelah lulus seleksi penerimaan dosen di lingkungan Kementerian Keuangan, pada bulan November 2016, dia pindah dari DJP ke Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, akhirnya pada Desember 2017 diangkat menjadi Dosen Tetap di PKN STAN dan sampai sekarang ditempatkan di Jurusan Pajak pada program studi Diploma III Pajak.

EKONOMI PEMBANGUNAN

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan.

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi dan studi pembangunan.

Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menguraikan tentang:

Bab 1 Konsep, Kriteria, dan Ukuran Pembangunan Nasional

Bab 2 Persoalan Dalam Pembangunan Nasional

Bab 3 Karakteristik dan Sistem Ekonomi Indonesia

Bab 4 Struktur dan Prospek Ekonomi Indonesia

Bab 5 Teori Umum Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 6 Masalah Pembentukan Modal Di Negara Berkembang

Bab 7 Masalah Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Indonesia

Bab 8 Aspek Perdagangan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi

Bab 9 Masalah Hubungan Internasional Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 10 Analisa Ekonomi Dalam Perumusan Kebijakan pembangunan Nasional

Bab 11 Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

Bab 12 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6840-76-4

